

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PANTAI TAMARUNANG KABUPATEN JENEPONTO



STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PANTAI TAMARUNANG KABUPATEN JENEPONTO

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020



PANTAI TAMARUNANG

KABUPATEN JENEPONTO



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020

ISBN 978-623-94120-5-0



9 786239 412050

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE

Syafruddin, SH. MM.

Andry Machmury, SE., M.Si.

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PANTAI TAMARUNANG KABUPATEN JENEPONTO

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Syafuruddin, SH. MM
Andry Machmury, SE. M.Si.

**Penerbit:
Politeknik Pariwisata Makassar
2020**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
PANTAI TAMARUNANG KABUPATEN JENEPONTO**

Penulis:

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Syafruddin, SH. MM
Andry Machmury, SE. M.Si

ISBN: 978-623-94120-5-0

Editor:

Muhammad Zainuddin Badollahi

Tata Letak/Desain Cover:

Ahmad Suthami Putra

Penerbit:

Politeknik Pariwisata Makassar

Redaksi:

Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga Kota Mandiri
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224
Telp/Fax +62411 838456
Email: email@poltekparmakassar.ac.id

Cetakan Pertama, Juni 2020

Hak Penerbitan © 2020 Politeknik Pariwisata Makassar

Dilarang mengutip dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik cetak photoprint, microfilm tanpa ijin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius

Politeknik Pariwisata Makassar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang sebagai salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang menghasilkan arahan rencana pengembangan obyek wisata Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata sekaligus memicu minat kunjungan, pertumbuhan angka kunjungan dan penerimaan dari wisatawan.

Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Jeneponto telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto.

Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Dinas Pariwisata Jeneponto beserta segenap jajarannya;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
4. Kepala Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
5. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT menjadikan ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB - 1	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	7
D. Sasaran Kegiatan	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Pendekatan Perencanaan	9
G. Lingkup Wilayah Studi	17
H. Tahapan Kegiatan dan Jangka Waktu Pelaksanaan	17
I. Sistematika Pelaporan	19
BAB - 2	
KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO	
A. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional	21
B. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Prov Sulawesi Selatan	25
C. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto	32
BAB - 3	
KONDISI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO	
A. Sejarah Kabupaten Jeneponto	40
B. Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto	43
C. Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto	45
D. Perekonomian Kabupaten Jeneponto	52
BAB - 4	
RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BIRTARIA KASSI	
A. Kondisi Eksisting Obyek Wisata	57
B. Desain Pengembangan Obyek Wisata	73

BAB - 5

PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	141
Daftar Pustaka	143
Identitas Penulis	146

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto

DAFTAR TABEL

NO.	No TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	1	Bagan Kerangka Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, Kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	18
2.	2	Jadwal Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, Kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	19
3.	3	Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya Dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan	31
4.	4	Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2017	45
5.	5	Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	46
6.	6	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	48
7.	7	Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	51
8.	8	Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017	52
9.	9	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)	56
10.	10	Jumlah Wilayah Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto	58
11.	11	Karakteristik Wilayah Kab. Jeneponto	59
12.	12	Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	59
13.	13	Ketersediaan Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet	105
14.	14	Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet	105
15.	15	Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet Bagi Wisatawan Berkebutuhan Khusus	106

DAFTAR GAMBAR

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	1	Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan	12
2	2	Pengembangan Berbasis Masyarakat	13
3	3	Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar	14
4	4	Konsep Klaster Destinasi Pariwisata	16
5	5	Sistem Kepariwisata Nasional (Tatanan Makro)	23
6	6	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taka Bonerate dan Sekitarnya	25
7	7	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bulukumba dan Sekitarnya	30
8	8	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jeneponto	44
9	9	<u>Lokasi Obyek Wisata Pantai Tamarunang</u>	57
10	10	Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	60
11	11	Kondisi Eksisting Gerbang Identitas Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	61
12	12	Kondisi Eksisting Akses Jalan Masuk Ke Kawasan Pantai Tamarunang	62
13	13	Kondisi Eksisting Jalan Tapak Dengan Permukaan Paving Block Pada Pantai Tamarunang	62
14	14	Kondisi Eksisting Jalan Tapak Dengan Permukaan Tanah Pada Pantai Tamarunang	63
15	15	Panorama Senja Di Pantai Tamarunang	63
16	16	Kondisi Eksisting Tanggul Pantai Tamarunang	64
17	17	Kondisi Eksisting Budidaya Rumput Laut Di Sekitar Kawasan Pantai Tamarunang	64
18	18	Kondisi Eksisting Lingkungan kawasan Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	65
19	19	Kondisi Eksisting Fasilitas Penunjang Aktivitas Wisata Di Pantai Tamarunang	66
20	20	Kondisi Hotel Sebagai Fasilitas Akomodasi Di Pantai Tamarunang	66
21	21	Kondisi Eksisting Restoran dan Meeting Room Sebagai Fasilitas Akomodasi Di	67

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

Pantai Tamarunang			
22	22	Kondisi Eksisting Cafe Sebagai Fasilitas Akomodasi Di Pantai Tamarunang	68
23	23	Kondisi Eksisting Ruang Pameran Pada Kawasan Pantai Tamarunang	68
24	24	Kondisi Eksisting Panggung Pertunjukan Pada Kawasan Pantai Tamarunang	69
25	25	Kondisi Eksisting Reservoir Atas Pada Kawasan Pantai Tamarunang	69
26	26	Kondisi Eksisting Fasilitas Kuliner Pada Kawasan Pantai Tamarunang	70
27	27	Kondisi Eksisting Sculpture Patung Kuda Pada Kawasan Pantai Tamarunang	70
28	28	Kondisi Eksisting Fasilitas Toilet/Restroom Pada Kawasan Pantai Tamarunang	71
29	29	Kondisi Eksisting Fasilitas Gazebo Pada Kawasan Pantai Tamarunang	71
30	30	Kondisi Eksisting Fasilitas Tempat Ibadah Pada Kawasan Pantai Tamarunang	72
31	31	Kondisi Eksisting Fasilitas Dermaga Pada Kawasan Pantai Tamarunang	72
32	32	Rencana Pemanfaatan Kawasan Obyek Wisata Pantai Tamarunang	75
33	33	Block Plan Obyek Wisata Pantai Tamarunang	76
34	34	Desain Rencana Pengembangan Struktur Jalan Kawasan Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	78
35	35	Kebutuhan Gerak Minimum Pejalan Kaki	80
36	36	Ilustrasi Kemiringan Jalur Pejalan Kaki	80
37	37	Contoh Ilustrasi Penaung Pada Jalur Pedestrian	81
38	38	Contoh Ilustrasi Diagramatis Sistem Penerangan Ruang Luar Pada Kawasan Pantai Tamarunang	82
39	39	Desain Lampu Penerangan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	83
40	40	Ilustrasi Pengembangan Dermaga Wisata Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	86
41	41	Rencana Pengembangan Panggung Kesenian/ Pertunjukan Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	88
42	42	Rancangan Gazebo Kecil Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	88
43	43	Rancangan Pergola Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	89

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

44	44	Desain Lampu Taman Obyek Wisata Pantai Tamarunang	90
45	45	Ilustrasi Pagar kawasan Dan Jalur Pedestrian Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	91
46	46	Desain Pagar Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	91
47	47	Ilustrasi Aktivitas Canoeing di Kawasan Pantai Tamarunang	92
48	48	Ilustrasi Area Sekitar Pantai di Kawasan Pantai Tamarunang	93
49	49	Ilustrasi Area Pertunjukan di Kawasan Pantai Tamarunang	93
50	50	Ilustrasi Area Outbound di Kawasan Pantai Tamarunang	94
51	51	Ilustrasi Area Olah Raga di Kawasan Pantai Tamarunang	95
52	52	Ilustrasi Area Berenang di Kawasan Pantai Tamarunang	96
53	53	Ilustrasi Lokasi Pusat Jajanan/ Plaza Kuliner Pada Area Pantai Obyek Wisata Pantai Tamarunang	97
54	54	Rencana Pengembangan Pusat Jajanan/ Plaza Kuliner Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	98
55	55	Rencana Area Terintegrasi Untuk Kegiatan MICE Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	99
56	56	Rencana Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	100
57	57	Rencana Pengembangan Ruang Ganti/ Toilet Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	103
58	58	Rencana Desain Ruang Ganti/ Toilet Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	107
59	59	Rencana Desain Menara Pandang/ Menara Pantau Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	110
60	60	Rencana Pengembangan Pusat Penjualan Cinderamata Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang	112
61	61	Ilustrasi Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang	113
62	62	Ilustrasi SRP Untuk Mobil Penumpang (dalam cm)	113
63	63	Ilustrasi Konsep Sebagai Acuan Penetapan SRP	114

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

64	64	Ilustrasi SRP Untuk Sepeda Motor	114
65	65	Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus	115
66	66	Ilustrasi Pola Parkir Sudut	115
67	67	Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus Yang Berhadapan	116
68	68	Ilustrasi Pola Parkir Sudut Yang Berhadapan	116
69	69	Ilustrasi Taman Parkir Tegak Lurus Dengan Dua Gang	117
70	70	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe A	117
71	71	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe B	118
72	72	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe C	118
73	73	Ilustrasi Pola Parkir Satu Sisi	119
74	74	Ilustrasi Pola Parkir Dua Sisi	119
75	75	Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Satu Sisi	120
76	76	Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Dua Sisi	120
77	77	Ilustrasi Parkir Sepeda Motor Pola Pulau	121
78	78	Ilustrasi Tempat Parkir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	121
79	79	Detail Rancangan Tempat Parkir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	122
80	80	Ilustrasi Contoh Rambu Panduan Informasi	122
81	81	Ilustrasi Contoh Rambu Atraksi Layanan Pariwisata	123
82	82	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe Utama	124
83	83	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe B (Regular Sign)	124
84	84	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe C (Blazer)	125
85	85	Ilustrasi Contoh Gateway Sign	127
86	86	Ilustrasi Contoh Advance Sign	127

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

87	87	Ilustrasi Contoh Intersection Sign	128
88	88	Ilustrasi Contoh Position Sign	128
89	89	Ilustrasi Contoh Reassurance Sign	129
90	90	Ilustrasi Contoh Route Marker	129
91	91	Ilustrasi Contoh Temporary Sign	129
92	92	Ilustrasi Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	131
93	93	Rancangan Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	131
94	94	Ilustrasi Loket Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	132
95	95	Desain Bangunan Reservoir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	133
96	96	Desain Bak Penampungan Reservoir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	134
97	97	Ilustrasi Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	135
98	98	Ilustrasi Breakwater/ Talud Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	138
99	99	Ilustrasi Penyediaan Tanda dan Wadah Sampah Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	99
100	100	Sistem Pengelolaan Limbah Cair Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang	140

BAB - 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan penghasil devisa yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan masyarakat yang bertumbuh sangat signifikan dan memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor tersebut.

Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari performa terhadap jumlah angka kunjungan wisatawan, penerimaan dari pembelanjaan wisatawan, pertumbuhan industri, pertumbuhan infrastruktur pariwisata, penyerapan tenaga kerja, serta tren positif lainnya dari kinerja sektor pariwisata. Dukungan kekayaan aset sumber daya wisata alam, budaya dan kreativitas masyarakat yang dimiliki, maka kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional dan daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di masa depan.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang harus dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisataan.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional sehingga dalam pengembangannya harus mengacu pada pembangunan pariwisata terpadu.

Pembangunan pariwisata terpadu (*integrated tourism development*) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, dibutuhkan Rencana Induk (*Masterplan*) Pengembangan Obyek Wisata sebagai implementasi dari perencanaan yang lebih generik dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) sehingga dapat mengakomodasi konstelasi komponen-komponen terkait dengan daya tarik wisata sebuah destinasi, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan pada sebuah daya tarik wisata sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.

Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata diperlukan untuk menghindari pembangunan sarana prasarana dan fasilitas wisata yang tidak bersesuaian dengan tema pengembangan dan aktivitas wisata sesuai karakteristik serta kebutuhan wisatawan sehingga obyek wisata yang dikembangkan tidak terbengkalai karena tidak sesuai harapan pasar wisatawan; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata terhadap kerusakan alam, lingkungan serta sosial budaya masyarakat yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar obyek wisata dalam wilayah kabupaten Jeneponto.

Selain itu, *masterplan* pengembangan obyek wisata kabupaten Jeneponto dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa yang akan melakukan apa bagi instansi tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan keterkaitan antar sektor.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai daerah tujuan wisata yang diunggulkan sebagai destinasi pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari potensi alam, sejarah, dan

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya tentu membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari para *stakeholders* untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai pendukung minat kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi pariwisata.

Ada beberapa alasan dalam penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata kabupaten Jeneponto antara lain adalah sebagai berikut :

1. Visi, misi dan kebijakan pemerintah kabupaten Jeneponto merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga agar dapat sejalan dengan visi, misi dan kebijakan daerah, maka perlu menyusun master plan pengembangan obyek wisata.
2. Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Jeneponto, dibutuhkan penyesuaian dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten Jeneponto.
3. Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan kabupaten Jeneponto, diperlukan perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terencana terhadap perencanaan pengembangan, antara lain :
 - a. Zonasi obyek wisata;
 - b. Pengembangan fasilitas umum obyek wisata;
 - c. Pengembangan fasilitas pariwisata pada obyek wisata;
 - d. Pengembangan aktivitas wisata; dan
 - e. Pengembangan atraksi wisata.
4. Analisa data yang digunakan dalam penyusunan *masterplan* obyek wisata ini menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, analisa *Point Rating System* yaitu dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata dan analisis tata ruang yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan pemanfaatan ruang pada obyek wisata.
5. Kebijakan, strategi dan indikasi pengembangan dibuat secara lebih mendalam dan terinci sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

Di samping hal hal tersebut di atas, juga dipertimbangkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyerasikan dengan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dari konsep ini dapat disimpulkan :

Pertama : Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan;

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- Kedua : Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitas yang berakibat berkurangnya kemampuan lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan dan akan menimbulkan gangguan pada keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia;
- Ketiga : Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup;
- Keempat : Pola pembangunan sumber daya alam yang baik tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pilihan lain di masa depan dalam penggunaan sumber daya alam.
- Kelima : Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkat kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang.

Sebagai obyek wisata berbasis daya tarik alam, obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu direncanakan untuk dikembangkan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yang sekurang kurangnya harus memperhatikan pada enam hal yaitu :

1. Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam sampai pada batas daya dukung lingkungan;
2. Pengambilan keputusan *bottom-up* dengan mengikut sertakan seluruh komponen *stakeholders*;
3. Menghapus kemiskinan, isu gender dan tetap menghormati hak asasi manusia;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan obyek wisata;
5. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan sebagai perlindungan kehidupan; dan
6. Pelestarian pengetahuan, sistem nilai, budaya, dan cara hidup kelokalan dengan tetap menghargai perbedaan.

Beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan apabila sebuah obyek wisata tidak memiliki *masterplan* pengembangan, antara lain adalah :

1. Pengembangan obyek wisata tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada kepastian dalam pembangunan kepariwisataan. Kepastian hukum ini sangat penting terutama bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada bidang kepariwisataan di daerah. Investor sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan mengingat kemampuan pemerintah terutama dalam bidang pembiayaan masih relatif sangat terbatas. Investor sangat membutuhkan kepastian hukum dalam perencanaan karena akan menjamin bahwa investasi yang telah dan akan ditanamkan akan kembali dan selanjutnya akan memberi keuntungan;
2. Pengembangan obyek wisata yang tidak berkelanjutan, mengingat bahwa pengembangan wisata tidak mungkin dilakukan sekaligus sebab obyek wisata merupakan fenomena yang terus berkembang

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

mengikuti perkembangan peradaban, masyarakat, dan pasar wisatawan. Disamping itu perencanaan pengembangan obyek wisata juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pengembangan obyek wisata dilakukan secara bertahap. Untuk menjamin keberlanjutan pengembangan obyek wisata, dibutuhkan perencanaan yang matang. Pengembangan obyek wisata yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan terkesan bongkar pasang atau kemungkinan bila terjadi pergantian pemerintahan di daerah maka berubah pula kebijakan pengembangan obyek wisata. Artinya apa yang telah dibangun oleh pemerintahan daerah sebelumnya dapat saja dibongkar oleh pemerintahan daerah berikutnya. Bila suatu obyek wisata telah memiliki *masterplan* pengembangan obyek wisata yang baik, hal ini dapat dihindari sebab walaupun pemerintahannya berganti namun pengembangan obyek wisata akan dapat terus berlanjut berdasarkan *masterplan* yang telah ada.

3. Pengembangan Obyek wisata yang tidak terarah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam pengembangan dan penataan obyek wisata. Master plan pengembangan obyek wisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) kabupaten Jeneponto. Dengan demikian pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang akan terarah, karena disusun secara hirarki, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan obyek wisata yang lainya.
4. Pengembangan Obyek wisata tidak terkoordinir dengan baik karena kepariwisataan merupakan pembangunan multi sektoral dan multi dimensional artinya pengembangan obyek wisata tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor dan bidang oleh karena itu dibutuhkan kordinasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan pengembangannya. Dengan adanya *masterplan* pengembangan obyek wisata yang baik, maka ada dua hal yang dapat dihindari berkenaan dengan kordinasi yaitu pertama : tidak terjadi saling mengaharapkan antara sektor atau bidang sehingga dapat menyebabkan pengembangan obyek wisata justru terbengkalai (tidak terlaksana) dan yang kedua adalah antara satu sektor atau bidang melaksanakan pengembangan obyek wisata yang berbeda (tumpang tindih) sehingga justru menyebabkan pengembangan obyek wisata yang tidak efisien dan efektif. Dalam master plan pengembangan obyek wisata yang baik, telah terdapat perencanaan yang matang termasuk keterlibatan sektor-sektor dan bidang-bidang yang terkait sehingga tiap sektor atau bidang sudah jelas apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan obyek wisataan.

Secara umum perencanaan obyek wisata diperlukan dengan berbagai alasan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah *masterplan* pengembangan obyek wisata yang menyeluruh dan terpadu dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan;

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

2. Obyek wisata bersifat sangat kompleks, multi-sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kelautan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan obyek wisata yang baik akan mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
3. Obyek wisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata secara khusus sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto mengacu pada berbagai produk hukum yang ada, baik berskala nasional, regional maupun lokal, yang mengatur tentang kepariwisataan, lingkungan, tata ruang, dan pembangunan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2039;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018; dan
17. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2033.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto tahun 2019 dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang memuat tujuan pengembangan obyek wisata dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2033.

Tujuan pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto tahun 2019;
- b. Mewujudkan rencana pengembangan obyek wisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, sejarah, budaya, dan sumber daya buatan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pengembangan obyek wisata;
- e. Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar obyek dalam wilayah; dan
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto tahun 2019, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya konsep pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto tahun 2019 yang dilandasi pendekatan perencanaan obyek wisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya;
2. Teridentifikasinya pemanfaatan ruang dalam prioritas pengembangan atraksi, aktivitas, dan fasilitas wisata pada obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto; dan
3. Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kajian dalam penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto, meliputi :

1. Gambaran dan kajian terhadap potensi kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto, yang mencakup aspek:

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- a. Aspek pemanfaatan ruang;
 - b. Aspek pengembangan atraksi dan aktivitas wisata;
 - c. Aspek pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d. Aspek pengelolaan lingkungan;
 - e. Aspek pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Aspek aksesibilitas wisata.
2. Pengkajian terhadap prospek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk di dalam kawasan obyek wisata.
 3. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

Agar penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, maka dilakukan 5 (lima) tahapan kegiatan. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Survey dan pengumpulan serta pengolahan data
2. Analisis data yang terdiri atas analisis SWOT, analisis *Point Rating System* dan analisis tata ruang.
3. Penetapan zonasi pemanfaatan ruang pada obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu
4. Perumusan sasaran pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto
5. Perumusan rencana pengembangan aksesibilitas, atraksi, aktivitas dan amenitas pariwisata pada obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu.

F. Pendekatan Perencanaan

Dalam pengembangan destinasi pariwisata, obyek wisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk wisata, wilayah dan citra atau karakteristik atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding (*Comparative Advantages*) dan keunggulan saing (*Competitive Advantages*) dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional.

Pemahaman terhadap Destinasi Pariwisata yang operasional perlu dijabarkan dalam pendekatan perencanaan pariwisata mengingat terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan oleh karena itu definisi di bawah ini dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sebagai berikut :

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenitas dan akses) yang menawarkan pengalaman utuh/ terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara Tradisional, destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997).

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangannya, Kelly & Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu ;

1. **Atraksi** (*attractions*) yang mencakup alam, budaya, buatan (*artificial*), *event* dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi.
3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, Bank, pemadam kebakaran, keamanan, Rumah sakit dan sebagainya. Dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma, sarana makan dan minum, dan sebagainya.
5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesibilitas dan unsur penunjang lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem yang saling menunjang.

Berdasarkan tren, indikator dan motivasi wisatawan, World Tourism Organization (2004) Mengklasifikasikan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari 17 jenis, yaitu :

1. Kawasan Perairan/Bahari (*coastal zone*)
2. Kawasan Pantai (*beach destination and sites*)
3. Gugusan Kepulauan (*small island*)
4. Kawasan Gurun (*destination in desert and arid areas*)
5. Kawasan Pegunungan (*mountain destination*)
6. Kawasan Taman Nasional (*natural and sensitive ecological areas*)
7. Kawasan Ekowisata (*ecotourism destinations*)
8. Kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam (*park and protected areas*)
9. Komunitas disekitar Kawasan Lindung/Konservasi (*communities within or adjacent to protected area*)
10. Jalur atau Rute Perjalanan (*trail and routes*)
11. Situs Peninggalan Sejarah (*built heritages sites*)
12. Kawasan Pemukiman Tradisional (*small and traditional communities*)
13. Kawasan Wisata Kota (*urban tourism*)
14. Pusat Kegiatan MICE dan Konvensi (*MICE and convention centre*)
15. Kawasan Taman Bertema (*theme park*)

16. Kawasan Taman Air (*water park*)
17. Kapal Pesiar dan Simpul-simpul perjalanannya (*cruise ship and their destinations*)

Selain itu perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pariwisata yang dilakukan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Hal ini dilakukan karena di dalamnya terkandung makna pengembangan pariwisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan pada intinya menekankan 4 (empat) prinsip, yaitu :

a. **Layak secara ekonomi (*economically viable*).**

Bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan efisien untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. **Berwawasan lingkungan (*enviromental viable*).**

Bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya) dan menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekologi.

c. **Diterima secara sosial (*socially acceptance*).**

Bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta tidak merusak tatanan dan nilai-nilai budaya yang mendasar dimasyarakat.

d. **Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*).**

Bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 1
PENDEKATAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pendekatan perencanaan pembangunan berkelanjutan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang.
- 2) Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal.
- 3) Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari.
- 4) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah.
- 5) Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
- 6) Antisipasi yang tepat dan pemantauan terhadap perubahan

2. Pendekatan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas Lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan *local genuine*.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

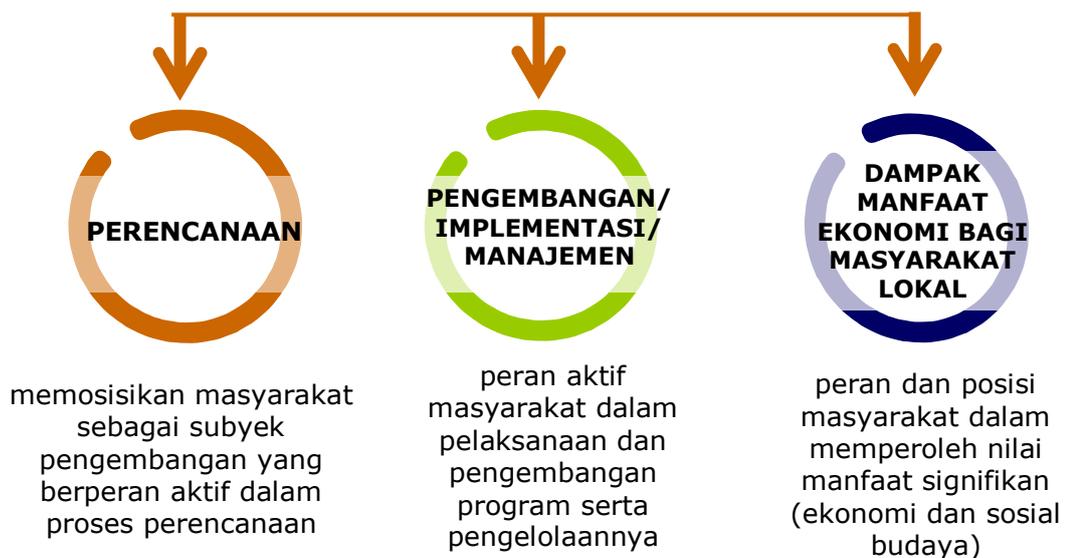
- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata kepada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap besar dalam hal tenaga kerja dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat bertumpu pada penguatan masyarakat setempat sehingga sejak dalam tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pelestarian sumber daya pariwisata pada setiap destinasi yang dikembangkan akan bersinerji dengan kearifan lokal masyarakat disekitar destinasi tersebut. Lebih jelasnya mengenai pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 2
PENGEMBANGAN BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)



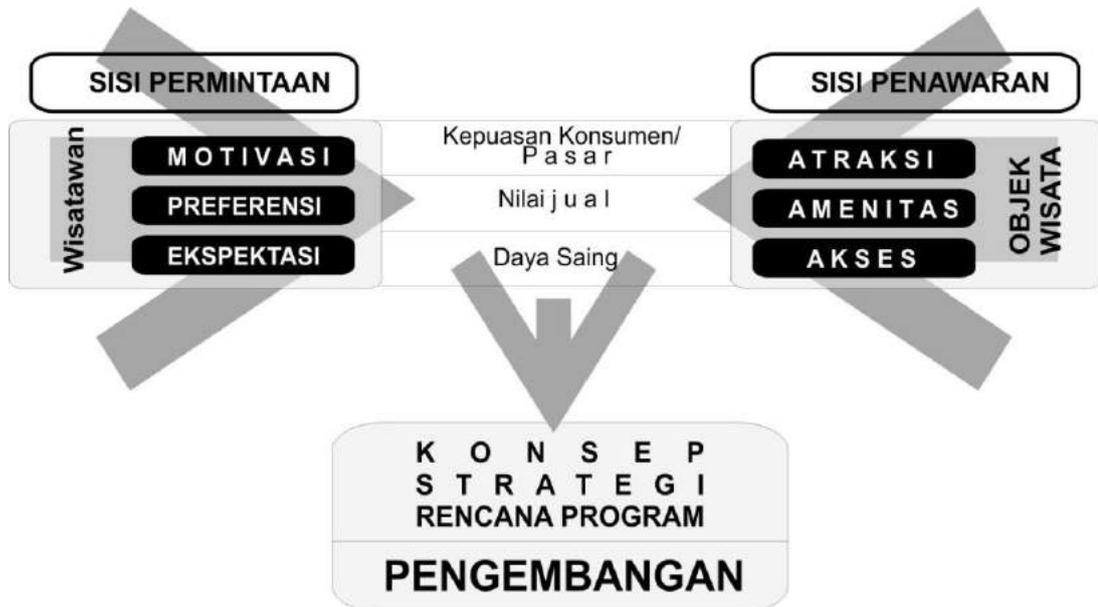
Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih jauh dalam pembangunan pariwisata diperlukan upaya memberdayakan atau memperkuat posisi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan pariwisata.

3. Pendekatan Kesesuaian Aspek Produk dan Pasar

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat ditampilkan sebagai berikut :

GAMBAR 3
PENDEKATAN KESESUAIAN ANTARA ASPEK PRODUK DAN PASAR



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto pada dasarnya merupakan perpaduan pengembangan 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek produk dan aspek pasar. Aspek produk terkait dengan penyediaan unsur-unsur penawaran (*supply side*) yang di dalamnya tercakup; atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia dan unsur penunjang lainnya. Sedangkan aspek pasar berkaitan dengan unsur-unsur permintaan (*demand side*) yang di dalamnya tercakup demografi dan psikografi pasar (persepsi, motivasi, ekspektasi).

4. Pendekatan *Borderless*

Konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas (*borderless*), merupakan salah satu implikasi dari dampak globalisasi. Pendekatan perencanaan Kabupaten Jeneponto didasarkan pada konsep tersebut mengingat kegiatan pariwisata tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenitas, aksesibilitas dan sebagainya.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/kabupaten/ provinsi bahkan negara lain dengan mengaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan tersebut dapat

membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

5. Pendekatan *Cluster*

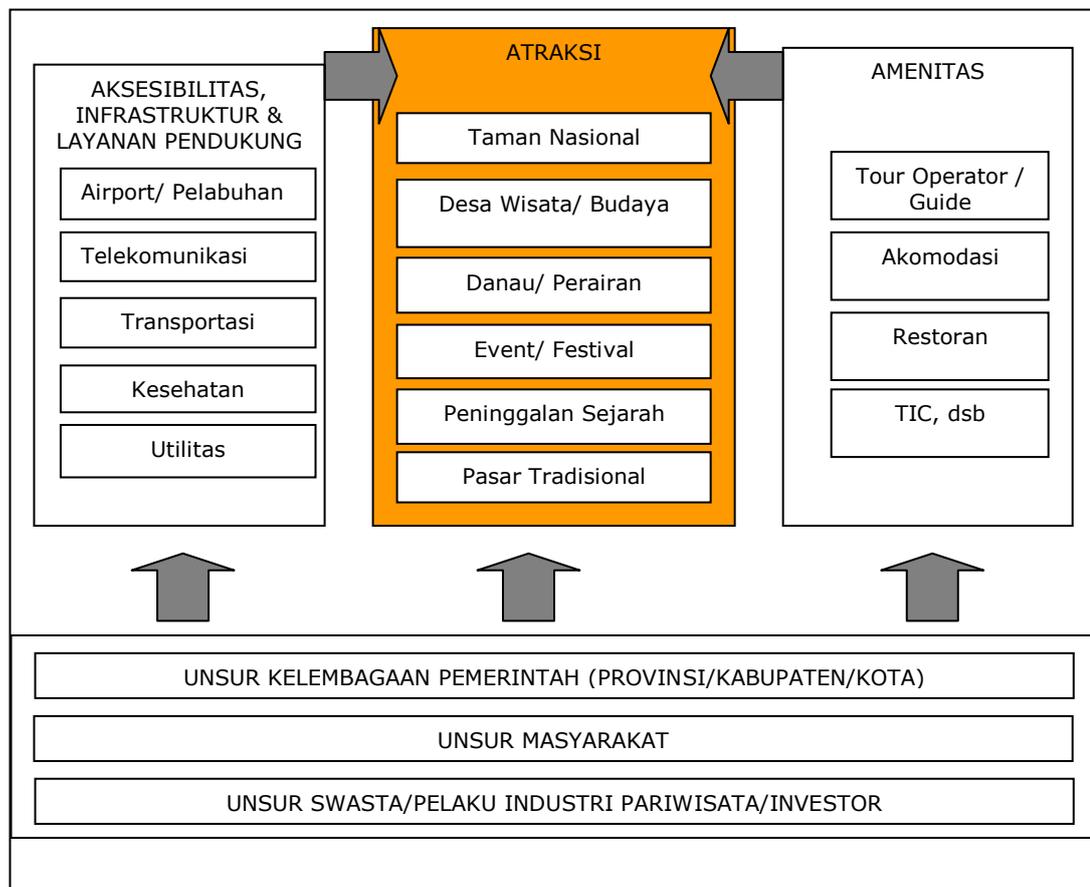
Pendekatan *cluster* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha di sektor industri. Pendekatan tersebut menggambarkan sekelompok sektor usaha yang memiliki mata rantai atau keterkaitan fungsi yang saling mendukung dan dikembangkan secara terintegrasi pada suatu lokasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya saing usaha yang tinggi.

Pendekatan *cluster* dalam pengembangan destinasi dalam kaitan perencanaan pariwisata berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas kinerja hubungan mata rantai usaha yang terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan daya saing destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komponen *cluster* pariwisata dapat mencakup unsur-unsur;

- a. Atraksi/ daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/ khusus)
- b. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, *tour operator* dan maskapai penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk pariwisata)
- c. Institusi di bidang penyiapan sumber daya manusia, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah menengah pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya.
- d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Komponen *cluster* pariwisata tersebut secara skematis dapat digambarkan konfigurasi dan keterkaitannya sebagai berikut :

GAMBAR 4
KONSEP KLUSTER DESTINASI PARIWISATA



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi

Seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto, termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta implikasi-implikasinya terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, ekonomi, dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional.

Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata juga perlu memperhatikan antara lain :

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- a. Kepentingan nasional dan daerah.
- b. Arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional dan provinsi
- c. Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan provinsi.
- d. Pokok permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
- f. Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumber daya lainnya.
- g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- h. *Masterplan* obyek wisata lain yang berdekatan.

G. Lingkup Wilayah Studi

Lingkup wilayah studi penyusunan *masterplan* obyek wisata Pantai Tamarunang adalah pada wilayah pada kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

H. Tahapan Kegiatan Dan Jangka Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan penyusunan master plan pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto ini dilakukan, sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelompok Kerja melalui nota kesepahaman antara Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dengan Bupati Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.
2. Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara maupun *focus group discussion* serta pelaksanaan survey berupa peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan obyek wisata.
3. Penyusunan Rancangan *masterplan* obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
4. Uji Publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.
5. Penetapan master plan pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto.

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

b. Kerangka Penyusunan

Kerangka penyusunan *masterplan* pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

TABEL 1

***Bagan Kerangka Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata
Pantai Tamarunang, Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019***

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	INDIKATOR
1	Pengumpulan data	Mengungkapkan potensi yang dimiliki dan permasalahan umum yang dihadapi oleh obyek wisata sebagai sektor kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian kegiatan pengembangan wilayah	Gambaran potensi dan permasalahan pengembangan obyek wisata	Kebijakan Pengembangan Karakteristik obyek wisata Ketersediaan produk wisata Aspek Pasar
2	Analisis	Menilai keadaan Masa kini Menilai kecenderungan perkembangan Menghitung kapasitas pengembangan Memperkirakan kebutuhan masa datang	Teridentifikasi-nya prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi obyek wisata	Kebijakan pengembangan Sumberdaya wilayah Ketersediaan produk wisata & penunjang Pasar dan proyeksi Wisatawan Pola kunjungan wisatawan makro
3	Pemetaan obyek wisata	Menentukan kawasan pengembangan Menentukan pemanfaatan ruang	Peta dasar rencana pengembangan	Zonasi obyek wisata
4	Pemetaan Rencana Pengembangan	Menyusun peta rencana Pengembangan obyek wisata	Rencana pengembangan obyek wisata	Jumlah dan jenis sarana prasarana. Jenis aktivitas wisata

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

c. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan *Masterplan* Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 ini dilakukan dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.

TABEL 2
**Jadwal Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata
Pantai Tamarunang, Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019**

No.	Kegiatan	Bln Ke-1	Bln Ke-2	Bln Ke-3
1.	Penyelesaian Administrasi			
2.	Survey lapangan			
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan			
3.	Seminar Laporan Pendahuluan			
4.	Penyusunan Laporan Kemajuan			
5.	Seminar Laporan Kemajuan			
6.	Penyusunan Draft Laporan Akhir			
7.	Seminar Draft Laporan Akhir			
8.	Penyempurnaan Laporan Akhir			
9.	Penyerahan Buku-Buku Laporan Akhir.			

I. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika pelaporan penyusunan *Masterplan* Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup kajian; metodologi; kerangka pendekatan; tahapan pelaksanaan pekerjaan; jangka waktu perencanaan; dan sistematika pelaporan.

Bab II Kebijakan Pengembangan Pariwisata, meliputi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Nasional; Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; dan Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Bab III Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, dan Kelurahan Pabiringa Dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, meliputi Kondisi Fisik; Potensi Pariwisata; dan Perekonomian wilayah.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Bab IV Rencana Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tamarunang, meliputi Tipologi Obyek Wisata, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pengembangan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata; Aksesibilitas Pariwisata; dan Prasarana Umum Pendukung Pariwisata.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB - 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

A. Kepariwisataaan Kab. Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata. Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah dan Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (*Yacht*) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (*Cruise*), Pengembangan dan Pemutakhiran *Database* Situs Selam (*Dive Site*) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan *Geopark* Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (*Sport Tourism Event*), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan *Action Plan* Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk *Special Event Carnival Indonesia*.

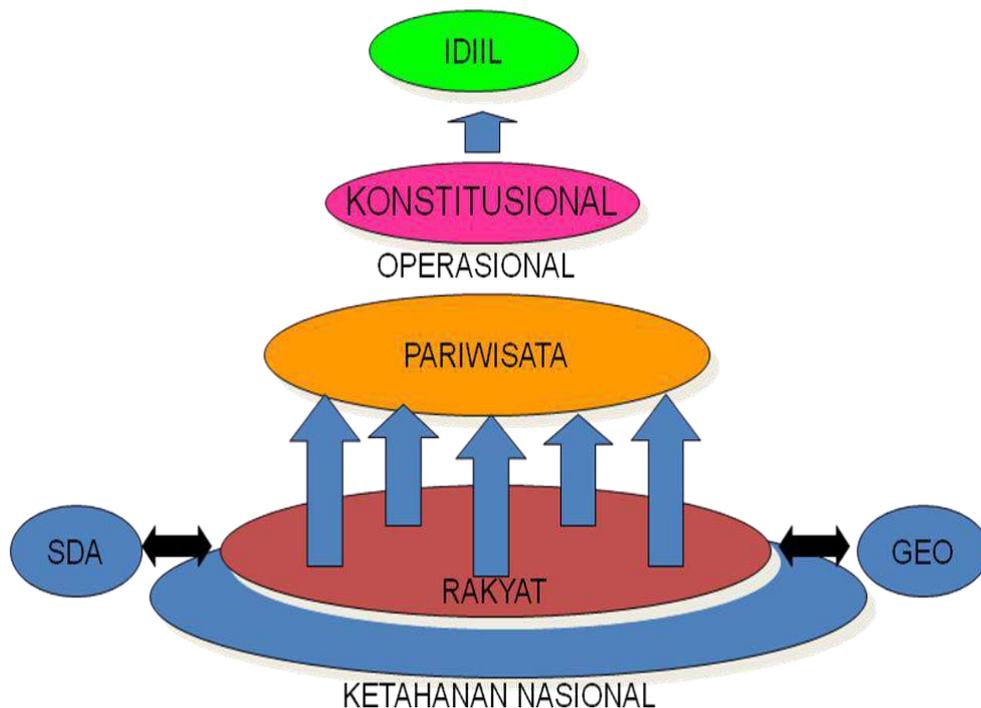
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisataan.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang

secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Gambar 5
Sistem Kepariwisata Nasional
(Tatanan Makro)



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata yang dikenal dengan istilah pentaheliks adalah unsur akademisi, dunia usaha (bisnis), masyarakat (komunitas), media dan pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

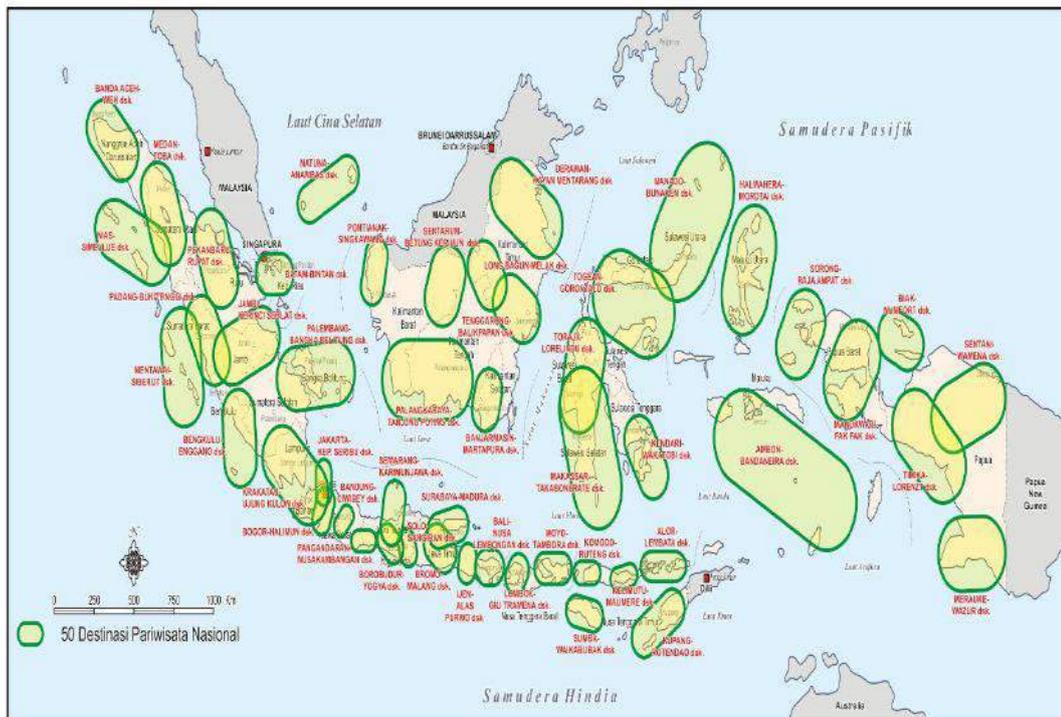
Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu Makassar-Takabonerate dan Sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Bone dan sekitarnya, KPPN Pare-Pare dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya.

Gambar 6
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Takabonerate dan sekitarnya



Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, 2011

Dengan demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto dengan segala keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata telah ditetapkan dan menjadi bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional sehingga menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain, telah menjadi citra daya tarik kepariwisataan nasional.

B. Kepariwisataaan Kab. Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Prov. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
4. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah; dan
5. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
2. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
3. Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
4. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
5. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
6. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
7. Kawasan laut Sangkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

8. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Selain itu, terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan.

Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan. Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten-kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Selain itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu faktor urgen yang harus dipertimbangkan, daya dukung fisik, sosial, ekonomis, dan budaya perlu diperhatikan dengan; dengan menyediakan ruang untuk kehidupan manusia yang sehat dan nyaman beserta segenap kegiatan pembangunannya, menyediakan sumber daya untuk kepentingan manusia baik melalui penggunaan langsung maupun melalui proses produksi atau pengolahan, menyerap atau menetralisasi limbah, serta melakukan fungsi-fungsi penunjang termasuk siklus biokimia, siklus hidrologi, dan lainnya. Mengacu pada azas keadilan, maka akses transportasi laut dan terutama akses informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan keseluruhan pulau-pulau kecil. Perairan pantai selatan dan timur Sulawesi Selatan yang potensial sebagai budidaya rumput laut dapat dikembangkan dengan agrobisnis maupun agroindustri khusus rumput laut yang mengikut sertakan komunitas petani rumput laut. Untuk peningkatan perekonomian rakyat dan perekonomian wilayah, maka wisata bahari tepat dikembangkan dengan potensi Kawasan Wisata Bahari Kapoposang dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kawasan wisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Jeneponto, serta Kawasan Wisata Bahari Takabonerate, Perairan pantai bila diperlukan juga dapat direklamasi untuk penambahan luas daratan untuk pembangunan dan atau perluasan pelabuhan, bandara, kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, industri, pergudangan.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Selatan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga dapat memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tarik wisata dalam suatu DTW, sehingga para wisatawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), ditinjau dari aspek: karakteristik tiap daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik wisata. Adapun SKPP dalam wilayah DTW Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengan Daya Tarik Wisata Tirta.
4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.
5. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.
6. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

7. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, terdiri dari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro. Pusat pelayanan pada KPP Makassar terletak di Kota Makassar.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam. Pusat pelayanan pada KPP Bulukumba dan sekitarnya terletak di Kabupaten Bulukumba.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate, dengan mempertimbangkan arahan Destinasi Kepariwisata Nasional yang menetapkan daya tarik wisata Takabonerate sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan nasional maka penetapan KSPD Jeneponto yang hanya mengkhususkan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu koridor pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mempertimbangkan letak geografis wilayah yang merupakan daerah kepulauan namun dengan potensi daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata tirta yang sangat unik. Pusat Pelayanan KSPD Takabonerate ini ditetapkan di Kota Benteng yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya, terdiri dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Pusat KSPD Bugis Pantai Timur ini terletak di Kabupaten Bone. Pada KSPD Wajo dan Sekitarnya terdapat beberapa daya tarik wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

Posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, dengan

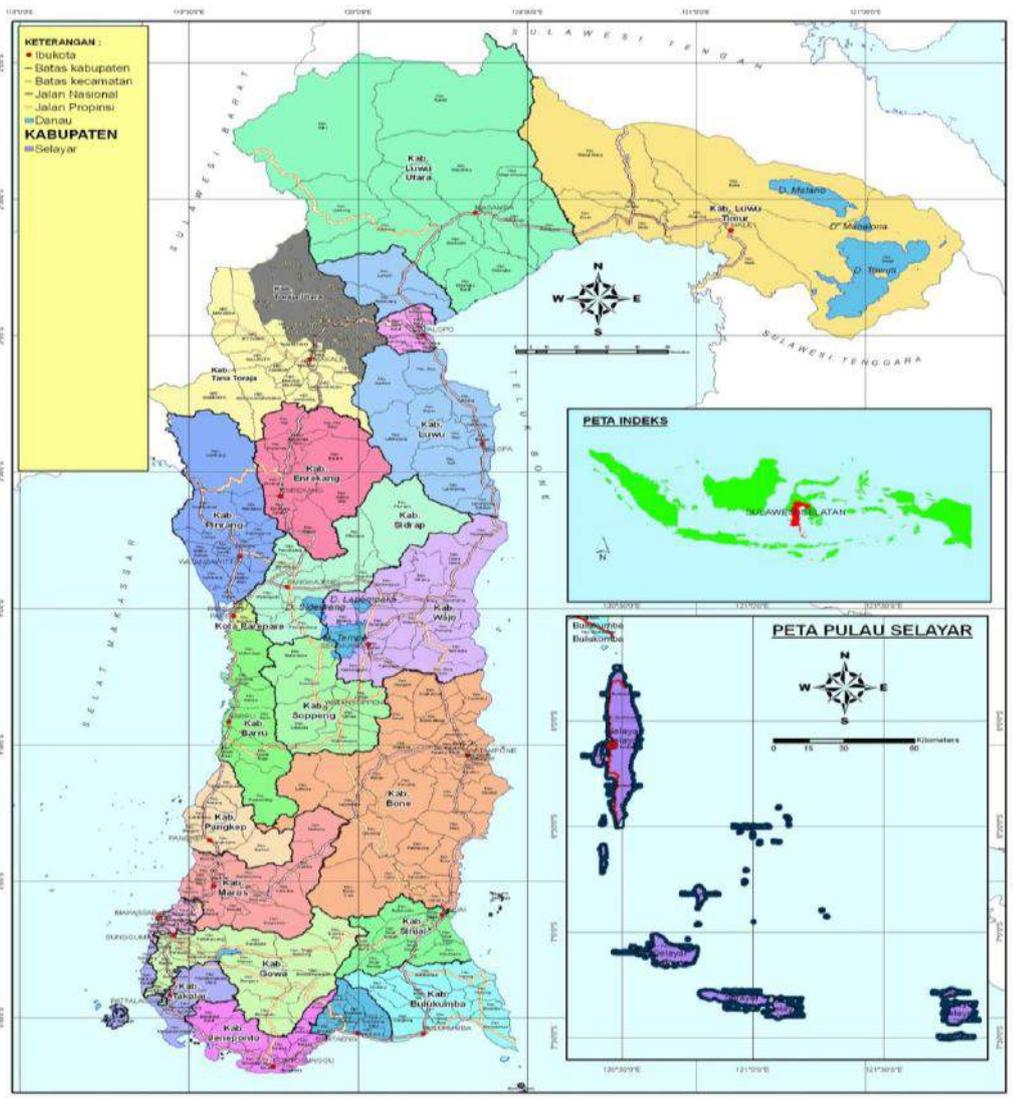
Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

pusat pelayanan terletak di Kota Makassar. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.

Berdasarkan penetapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Jeneponto merupakan salah satu destinasi prioritas provinsi Sulawesi Selatan yang secara bersama-sama dengan kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata dengan daya tarik utama adalah wisata bahari, wisata tirta, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus alam dan agro.

Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 7
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bulukumba dan Sekitarnya



Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

Adapun daya Tarik wisata kabupaten Jeneponto yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya Dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
1	Permandian Birta Ria Kassi	Alam	Kecamatan Tamalatea	Sudah dikembangkan
2	Pasanggarahan Loka	Alam	Kecamatan Kelara	Sudah dikembangkan
3	Air Terjun Boro	Alam	Kecamatan Kelara	Belum dikembangkan
4	Batu Jangang	Alam	Kecamatan Tarawang	Belum dikembangkan
5	Pulau Libukang	Tirta	Kecamatan Bangkala	Belum dikembangkan
6	Pantai Kalumpang	Tirta	Kecamatan Tamalatea	Belum dikembangkan
7	Garam Nasara	Industri	Kecamatan Barangkala Barat	Belum dikembangkan
8	Makam Raja-Raja Binamo	Sejarah	Kecamatan Bontoramba	Sudah dikembangkan
9	Makam I Maddi' Dg. Rimakka	Sejarah	Kecamatan Tamalatea	Belum dikembangkan
10	Bungung Salapan	Sejarah	Kecamatan Batang	Belum dikembangkan
11	Pacuan Kuda Pabiang	Budaya	Kecamatan Binamu	Sudah dikembangkan
12	Upacara Jene-Je'ne Sappara'	Budaya	Kecamatan Tarawang	Belum dikembangkan
13	Rumah Adat Patealla	Budaya	Kecamatan Kelara	Belum dikembangkan
14	Balla Lompoa	Budaya	Kecamatan Binamu	Belum dikembangkan

Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

C. Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas pada visi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026, yaitu "**Jeneponto Yang Maju, Tangguh, dan Bermartabat Dengan Bernafaskan Keagamaan**". Hal ini dimaksudkan dapat diwujudkan melalui penjabaran visi sebagai berikut :

1. **Tangguh**; adalah suatu daya atau kemampuan untuk menghadapi tantangan dan persaingan global dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri dalam mewujudkan kehidupan maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain.
2. **Bermartabat**; adalah suatu nilai yang memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Jeneponto dalam mematuhi norma-norma hukum dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat turatea.
3. **Bernafaskan Keagamaan**; adalah suatu pegangan pada nilai-nilai yang bersifat religius dalam pencapaian kehidupan masyarakat jeneponto yang maju, tangguh dan bermartabat.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Jeneponto, adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Pemerintahan dan Kelembagaan yang Baik**; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan tata pemerintahan dan kelembagaan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif, efisien dan aparatur yang profesional serta akuntabel, dengan infrastruktur yang memadai dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.
2. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan**; Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur kabupaten agar mampu mendukung dan memwadahi aktifitas pengembangan wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. **Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas**; Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas adalah upaya mendorong pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahluk pribadi maupun sosial sebagai perwujudan nilai-nilai humanis dan pluralis.
4. **Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya**; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto yang bermoral, beretika, dan berbudaya dengan memperkuat jati diri dan karakter daerah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, dan menerapkan nilai-nilai luhur masyarakat Turatea dan budaya bangsa.
5. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi**; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

dilakukan dengan upaya mendorong bidang pertanian melalui implementasi teknologi dan optimalisasi pemanfaatan lahan dan perdagangan sebagai aktifitas ekonomi utama atau sebagai tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas pelengkap dan pendukung.

6. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah;** Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam secara optimal dan daya saing daerah adalah upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dengan keunggulan kompetitif dan terpadu.

Sebagai ukuran tercapainya Jeneponto yang Maju, Tangguh dan Bermartabat dengan Bernapaskan Keagamaan Menuju Masyarakat Sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kepemerintahan dan Kelembagaan yang baik, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat.
 - c. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan dan kelembagaan yang memadai;
 - d. Terjaminnya ketersediaan produk hukum daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Infrstruktur yang Berkelanjutan, yang ditandai dengan :
 - a. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata disemua tingkatan pemerintahan.
 - c. Terbangunnya Infrastruktur lingkungan diseluruh wilayah Perdesaan dan Perkotaan.
3. Terwujudnya Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat 2020
 - b. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia serta meraih predikat 4 Besar di Sulawesi Selatan sehingga lebih mampu bersaing,
 - c. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan target 5 Besar di Sulawesi Selatan.
 - d. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

4. Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya yang ditandai dengan:
 - a. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu dengan nilai moderen yang universal;
 - b. Meningkatnya aktivitas dan derajat kehidupan keagamaan.
 - c. Menurunya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tak bertanggung jawab baik pada lingkungan Birokrasi, Politis maupun pada lingkungan masyarakat, sehingga Kabupaten Jeneponto Sebagai daerah bebas KKN di Sulawesi Selatan.
5. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi, yang ditandai dengan :
 - a. Terciptanya struktur ekonomi yang berbasis sumber daya (*resources based economic*) yang maju terutama sektor pertanian, kehutanan, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang didukung dengan industri serta aktifitas ekonomi kerakyatan lainnya;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta melalui pengembangan pola kemitraan usaha dalam pembangunan;
 - c. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja
6. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah, yang ditandai dengan :
 - a. Terkelolanya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk andalan dan unggulan nasional dan regional yang berimplikasi pada meningkatnya iklim investasi.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan menguasai IPTEK dalam menghadapi tantangan global.
 - c. Meningkatnya kualitas produk-produk daerah yang memiliki nilai kompetitif di pasar nasional, regional maupun di pasar global yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah secara makro;

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 tersebut, maka dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis serta mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang terpilih masa bakti 2014 – 2018, maka Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2018 adalah : **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dengan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”**.

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif Transfaran dan Akuntabel;
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan dasar di setiap desa/ Kelurahan;

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jeneponto yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2018 yang berhubungan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi Kedua.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua dan keempat yakni :

a. **Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;**

Tujuan 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni, dan Pengelola Obyek Wisata yang memiliki kompetensi dan lebih kompetitif. dengan sasaran pembinaan SDM Aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni dan Pengelola Obyek Wisata yang handal dan kompetitif.

Tujuan 4 : Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, dengan sasaran pembinaan Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan Kebudayaan

b. **Misi Keempat : Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;**

Tujuan 5 : Melaksanakan perencanaan yang realistis, terukur, transparan, efektif, efisien dan professional serta melaksanakan pelaporan yang akuntabel, dengan sasaran optimalisasi perencanaan dan sistem pelaporan yang professional

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto menyangkut hubungan kehidupan yang berkeeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Jeneponto.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Isu-isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto tersebut adalah:

1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan obyek wisata.
2. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
3. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien.
4. Kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan masih rendah.
5. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.
6. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona.
7. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.
8. Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri asli sebagai bagian dari kebudayaan daerah.
9. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya serta peningkatan kualitas paket/event wisata.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing Kabupaten Jeneponto pun semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu kepada visi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang tangguh, berdaya saing dan berkesinambungan sebagai pilar Perekonomian menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera”**.

Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

1. Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan bermakna bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto adalah Pusat

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- Penggalian, Pelestarian, Pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata dan kebudayaan;
2. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*
 3. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.
 4. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
 5. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang sejahtera dengan jalan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka visi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto yang ditetapkan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religious, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto tahun 2018-2033 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

1. Destinasi pariwisata alam, budaya dan minat khusus berbasis ekologi unggulan di provinsi Sulawesi Selatan mengandung makna bahwa kabupaten Jeneponto sesuai dengan potensi alam, masyarakat dan budaya harus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang spesifik pada variasi bentang alam pulau, pantai, dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kekayaan flora dan fauna serta sejarah budaya tinggalan masa lampau perlu dikemas secara unik dengan memperhatikan pelestarian alam, lingkungan, dan budaya sehingga tercipta karakter destinasi yang berbeda dan unggul di Sulawesi Selatan;
2. Religious mengandung makna bahwa masyarakat Jeneponto sangat taat dalam memeluk dan beribadah sesuai ajaran agama serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga dalam pengembangan pariwisata tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan sistem nilai masyarakat tersebut;
3. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*.

4. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.
5. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
6. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang sejahtera dengan jalan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto tersebut, maka tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Jeneponto yang berdaya saing.
2. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Jeneponto sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi.
3. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis ekologi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat.
5. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata.
6. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata.
7. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Jeneponto
8. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Jeneponto ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah.
9. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto.
10. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
11. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jeneponto, dengan sasaran utama tahun 2018-2033 adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
2. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;
 3. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganeekaragaman produk dan atraksi wisata;
 4. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
 6. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

BAB - 3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

A. Sejarah Kabupaten Jeneponto

Sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama Belanda di Sulawesi Selatan, pemerintahan setiap daerah masih berbentuk kerajaan dan pada kelompok kerajaan yang berlatar etnis Makassar, melalui literatur sejarah, relatif hanya memperkenalkan tentang Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai pioner kerajaan Makassar. Adapun kerajaan-kerajaan lainnya termasuk kategori kerajaan kecil bahkan pernah menjadi wilayah pemerintahan dari kerajaan besar Gowa-Tallo. Demikian halnya di Jeneponto yang mempunyai banyak kerajaan-kerajaan lokal seperti Garassi, Bangkala, Binamu, Tarowang, Sapanang, Arungkeke dan lain-lain, justru tenggelam di bawah kebesaran nama Kerajaan Gowa-Tallo.

Riwayat beserta catatan sejarah kerajaan-kerajaan (*wanua*) tersebut pada masa kini praktis hanya di kenal melalui suguhan informasi yang sangat kurang bahkan dapat dikatakan sangat minim. Padahal, pada sisi lain setiap kerajaan dalam skala kekuasaan sekecil apapun pasti memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, demikian halnya dengan daerah Jeneponto yang pada masa lampau merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai keunikan dan eksotisme sejarah dan budaya tersendiri.

Jeneponto atau lazim disebut *Turatea* dahulu adalah sebuah Kerajaan Makassar yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri, yang didalamnya terhimpun enam kerajaan lokal (*Palili*) yaitu Garassi, Bangkala, Binamu, Arungkeke, Tarowang dan Sapanang serta 16 kampung atau domain (Caldwell dan Bouges, 204 dalam Hadrawi 2008:8). Kemudian disisi lain Jeneponto beserta seluruh kerajaan-kerajaan lokalnya memiliki sejarah awal kemunculannya menjadi sebuah kerajaan serta perjalanannya hingga berinteraksi dengan agama Islam.

Sejarah keberadaan Jeneponto dikaji melalui dua pendekatan sejarah. Pertama, pada bulan November 1863, yang merupakan tahun berpisahannya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Hal ini membuktikan jiwa patriotisme *Turatea* dalam melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu dan pada tahun tersebut mulai diangkat "*Todo*" sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat. Pada tanggal 1 Mei 1959, berdasarkan Undang - undang No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Pendekatan Kedua adalah pada tanggal 1 Mei 1863, merupakan bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu yang diangkat secara demokratis oleh “*Toddo Appaka*” sebagai lembaga representatif masyarakat *Turatea*. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 dan diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling negeri- negeri *Turatea* setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Pada tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (*Mattewakkang Dg Raja*) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda .

Pada abad ke-XVII, selain Arungkeke terdapat pula beberapa kerajaan yang eksis, diantaranya kerajaan Gowa, Balanipa (Mandar), Sanrobone (Takalar), Bulo-bulo (Sinjai), Binamu (Jeneponto), dan Suppa. Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan didaerah *Turatea* yang eksis pada abad ke-XVII, dimana secara geografis, Arungkeke terletak di pesisir pantai selatan Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Arungkeke diapit oleh dua Wanua, yaitu Palajau di sebelah barat dan Togo-Togo di sebelah timur. Dahulu bentuk pemerintahan di *Butta Turatea*, berbentuk pemerintahan “*Kare*” (Tompo, 2001:6). Sekarang ini wilayah Arungkeke merupakan sebuah daerah kecamatan dalam pemerintah Kabupaten Jeneponto. Didaerah ini mempunyai nilai-nilai historis masa lalu yang sangat tinggi serta nilai budaya *siri' na pacce* masih dijaga. Didaerah ini juga menjunjung tinggi adat istiadat dari leluhurnya. Salah satu contohnya yakni tradisi *addengka ase lolo* atau pesta panen yang diadakan di *Balla Lompoa* atau istana Arungkeke.

Sebagai salah satu kerajaan yang ada didaerah Jeneponto dahulu, Kerajaan Arungkeke mempunyai peranan yang cukup strategis dalam menentukan dan menciptakan suasana kondusif di wilayah kekuasaannya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yang memungkinkan kerajaan ini disegani. Disamping itu dari catatan silsilah raja-raja Arungkeke, kebangsawan serta kekerabatan raja-rajanya punya hubungan dengan kerajaan di sekitar wilayah *Turatea* juga punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan diluar. Diantaranya dapat dilihat dari silsilah Arungkeke, dimana terdapat integrasi kebangsawanannya dengan Tarowang dan Boengoeng, Karaeng Tarowang bernama Patta Dulung Aroeng Areojoeng yang menikah dengan Maryam Daeng Rawang Karaeng Rawang dan melahirkan lima orang anak (Hadrawi, 2008:68-69).

Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan yang berdiri sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah-daerah di Nusantara ini khususnya di Sulawesi Selatan masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Sehingga tidaklah

mengerankan jika pelopor-pelopor atau tokoh-tokoh yang akan memimpin suatu kerajaan adalah berdasarkan garis keturunan atau ahli waris dari kerajaan itu sendiri. Telah menjadi anggapan umum masyarakat tradisional Sulawesi Selatan dimasa lampau, bahwa raja-raja dan cikal bakal raja yang memerintah adalah titisan darah dari Tumanurung.

Kisah Tumanurung itu merupakan awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Tomanurung inilah Sulawesi selatan mengalami perkembangan kemasyarakatan, kenegaraan dan kepemimpinan bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang memulai kecenderungan spesialisasi fungsi-fungsi dan peranan-peranannya.

Seperti halnya di Kerajaan Arungkeke, mitos Tumanurung masih di percaya bahwa sejarah Kerajaan Arungkeke diawali dengan munculnya wanita cantik (*uru-urua*) yang tidak diketahui asal-usul keberadaannya serta kematiannya tidak diketahui oleh masyarakat, jadi kuburannya pun tidak ada, sehingga masyarakat pada waktu itu menyebutnya *Tumanurung* (Manusia yang turun dari Khayangan). *Toalu' Daeng Taba'* turun di Kerajaan Arungkeke, tepatnya di bawah pohon Asam, dia ditemani oleh pengawal dan budaknya. Tumanurung ini memakai baju, Mahkota dari emas. Disamping itu ada juga peralatan yang dibawanya, antara lain Lesung, Alu dan beberapa perhiasan. Saat ia muncul ia menggunakan Lesung dan Alu dibawah pohon Asam, maka dari itu pelantikan raja Arungkeke dilakukan dibawah pohon asam sambil di ayun, disaat pelantikan itulah suara gendang dan alat-aalat musik lainnya yang berusia ratusan tahun diperdengarkan. Suara alat musik ini dikenal dengan nama *Ganrang Talluna Arungkeke* (Al-Maruzy, 2010:2).

Arungkeke juga sebuah kerajaan yang besar sama seperti Binamu, Bangkala dan Tarawang, dengan raja pertamanya yaitu seorang *Tumanurung* yang diberi gelar Ratu atau Karaeng Baine Toalu' Daeng atau Karaeng Taba Karaeng Arungkeke. Kerajaan ini diperhitungkan kebesarannya khususnya di wilayah Turatea dan umumnya di wilayah Sulawesi Selatan sebagai kerajaan lokal dengan daerah kekuasaannya antara lain, meliputi Palajau, Bulobulo, Arungkeke Tamanroya, Arungkeke Pallantikang, Pettang dan satu kerajaan Palili' yaitu kerajaan Bungeng. Dalam konteks kerajaan lokal di Turatea, Arungkeke merupakan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah pemerintahan tersendiri, situasi ini terjadi pada awal abad munculnya Arungkeke sebagai sebuah kerajaan (Hadrawi, 2008:68).

Namun pada perkembangannya, yaitu pada akhir abad ke-XVII, Arungkeke mengalami perubahan status sebagai kerajaan yang bernaung di bawah Binamu, sebagai domain atau daerah istimewa. Walaupun pada saat itu, kerajaan Arungkeke tidak bersedia ikut atau tunduk.

Turatea merupakan sebuah kerajaan beretnis Makassar yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kerajaan lokal tersebut

mempunyai sistem pemerintahan, wilayah, komunitas, beserta tradisi tersendiri. Adapun kerajaan kuno *Turatea* seperti; Binamu, Bangkala, kalimporo', Garassi, Layu, Sapanang, Tarowang, Sidenre dan Arungkeke. Salah satu keunikan Jeneponto pada beberapa kerajaan lokal ada yang mempunyai mitologi tersendiri perihal munculnya raja pertama atau lazim disebut *tumanurung*. Mitos-mitos *tomanurunga* itu mempunyai formula-formula cerita yang unik yang menjadi karakter penceritaan setiap daerah.

Dalam sejarahnya, Jeneponto berada dalam lintas politik tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, kemudian Gowa dan yang terakhir Bone. Pengaruh tiga kerajaan tersebut semakin memberi warna Jeneponto dalam perjalanan sejarah dan budayanya disamping tetap memperlihatkan identitas lokalnya yang khas. Kata Jeneponto adalah sebuah nama yang baru muncul pada abad XIX dan munculnya nama tersebut sangat terkait dengan kepentingan administratif pemerintahan kolonial di wilayah Selatan Sulawesi Selatan.

Situasi di wilayah Jeneponto dalam peta saat ini dengan gambaran yang ada pada beberapa abad silam terutama abad XVI-XVII sangatlah berbeda. Wilayah-wilayah yang ada sekarang sudah dalam model pemerintahan administrasi modern dengan menempatkan nama Jeneponto sebagai sebagai nama kabupaten dalam provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto membawahi 11 kecamatan, dimana tiap-tiap kecamatan membawahi desa atau kelurahan. Pada umumnya kerajaan-kerajaan lokal atau *wabuwa* sekarang ini ada yang menjadi desa atau kelurahan dan ada pula yang menjadi kecamatan.

B. Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto

1. Aspek Fisik Dasar

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 24 Kabupaten/ Kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 90 km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan).

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara $5^{\circ} 16'13''$ sampai $5^{\circ} 39'35''$ Lintang Selatan dan antara $12^{\circ} 14'19''$ sampai $12^{\circ} 7'31''$ Bujur Timur. Topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Jeneponto yang memiliki luas $749,79 \text{ km}^2$ terdiri dari 11 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 82 dan 31 kelurahan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Takalar

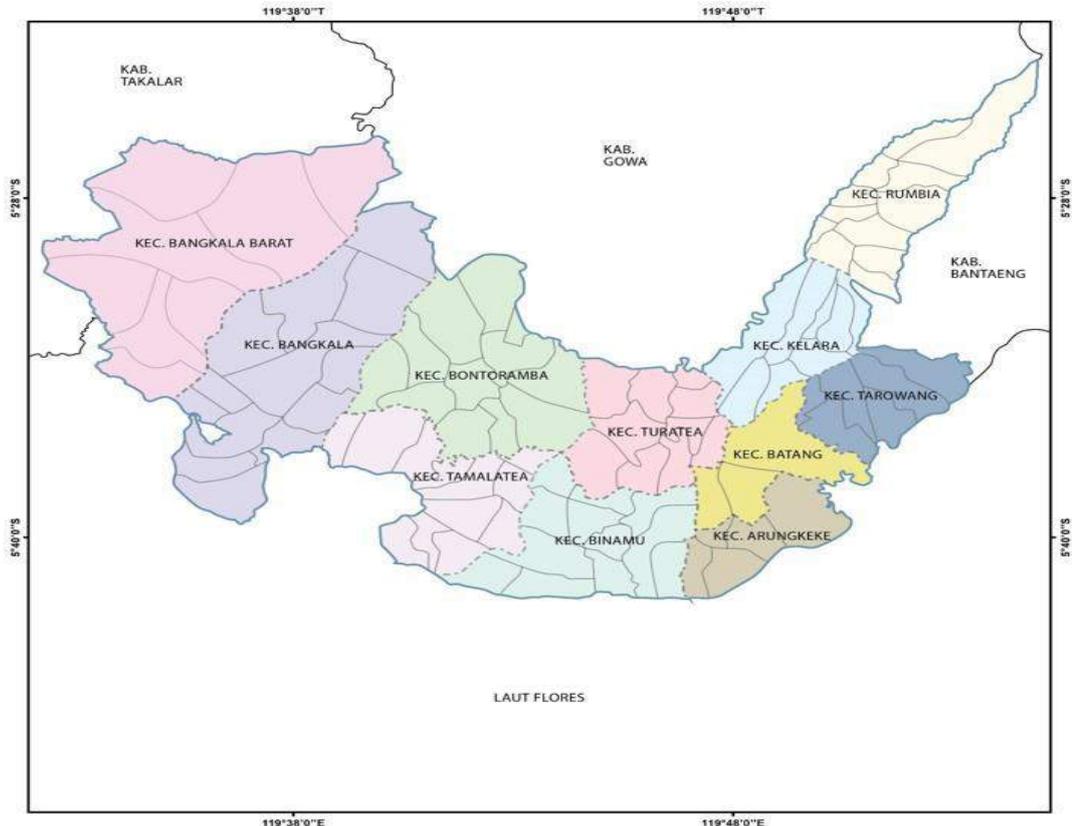
Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- 2) Sebelah Selatan : Laut Flores.
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Takalar.

Secara ekonomi, kabupaten Jeneponto memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada jalur perhubungan darat yang menghubungkan kota-kota kabupaten kearah kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai, serta jarak yang cukup dekat dengan kota Makassar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai wilayah administratif Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 8
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jeneponto



Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

2. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten Jeneponto tahun 2017 sebesar 359.787 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk berjumlah 95,42%, terdiri dari 173.771 jiwa penduduk laki-laki dan 186.016 jiwa penduduk perempuan dengan penyebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkala yaitu sebanyak 53.887 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan jumlah penduduk hanya sebesar 18.517 jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2017

No	Kecamatan	2010	2017	Laju Pertumbuhan
1.	Bangkala	49.924	53 887	1 ,10
2.	Bangkala Barat	26.374	28 469	1 ,10
3.	Tamalatea	40.384	41 810	0 ,50
4.	Bontoramba	35.003	36 242	0 ,50
5.	Binamu	52.483	56 068	0 ,95
6.	Turatea	29.954	32 002	0 ,95
7.	Batang	19.203	19 494	0 ,22
8.	Arungkeke	18.244	18 517	0 ,21
9.	Tarowang	22.350	22 682	0 ,21
10	Kelara	26.877	27 269	0 ,21
11	Rumbia	23.012	23 347	0 ,21
Jumlah		343.808	359.787	0,65

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Selama periode 2010-2017 laju pertumbuhan penduduk mengalami percepatan sebesar 0,65%. Sedangkan kepadatan penduduk setiap km² dihuni sebanyak 247 jiwa. Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan Tamalatea yang mencapai 372 jiwa per km², dan kepadatan penduduk terendah terletak di wilayah kecamatan Bangkala Barat yang hanya mencapai 93 jiwa per km².

C. Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto terdiri dari daya tarik wisata pantai, gua, laut, pulau, panorama, agro, sejarah, budaya masyarakat tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata). Adapun potensi daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto dilihat dari aspek sejarah, aspek sosial budaya masyarakat, dan sektor-sektor lain yang terkait lainnya

1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam sebagai salah satu daya Tarik wisata Kabupaten Jeneponto menjadi daya tarik utama bagi

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

wisatawan untuk berkunjung. Data dan sebaran potensi wisata alam pantai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Goa Gantarang Buleng	1. Goa 2. Panorama Alam	Desa Gantarang Kec. Kelara
2	Pantai Ujung Timur	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan olahraga pantai	Desa Bonto Ujung Kec. Tarawang
3	Wisata Hutan Mangrove	1. Panorama alam 2. Flora dan fauna 3. Wisata Edukasi	Desa Balang Beru Kec. Tarawang
4	Lembah Hijau Rumbia	1. Panorama Alam 2. Kolam Renang 3. Out-bound 4. Wisata Agro	Desa Bontonampo Kec. Rumbia
5	Air Terjun Tama'lulua Bossolo	1. Panorama Alam 2. Air Terjun 3. Goa	Desa Rumbia Kec. Rumbia
6	Air terjun Boro	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Bontonampo Kec. Rumbia
7	Pasanggarahan Loka	1. Panorama Alam	Desa Loka Kec. Rumbia
8	Salu Lompoa	1. Panorama Alam	Desa Lebang Manai Kec. Rumbia
9	Air terjun Lembah Impian	1. Panorama Alam 2. Air terjun 3. Goa dan Sumur	Desa Bontomanai Kec. Rumbia
10	Wisata Lembah Bontolojong	1. Panorama Alam	Desa Ujung Bulu Kec. Rumbia
11	Air terjun Tuang Loe	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Datara Kec. Bontoramba
12	Air terjun Kara'ngasa	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Lebang Manai Kec. Rumbia
13	Pantai Karaeng Sutte (Karsut)	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Desa Kampala Kec. Arungkeke
14	Pantai Kampung Sicini	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan	Desa Sicini Kec. Arung

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

		Olahraga	Keke
15	Sungai Ta'lambua	1. Panorama Alam 2. Permandian Alam	Desa Paitana Kec. Turatea
16	Birtaria Kassi	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Tonro Kassi Kec. Tamalatea
17	Bukit Toenga	1. Panorama Alam	Kel. Pallengu Kec. Bangkala
18	Pulau Libukang (Pulau Harapan)	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
19	Je'ne A'ribaka	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Kapita Kec. Bangkala
20	Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya)	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Marayoka Kec. Bangkala
21	Pantai Katubiri	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Desa Bisoli Kec. Bangkala Barat
22	Batu Sipinga	1. Panorama Alam	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
23	Pantai Garassikang	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Kec. Bangkala
24	Bukit dan Danau Bulu Jaya	1. Panorama Alam 2. Danau	Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi keindahan alam, tinggalan benda sejarah masa lampau yang dimiliki oleh kabupaten Jeneponto memiliki keunikan tersendiri serta memiliki keterkaitan sejarah dengan berbagai masyarakat di berbagai wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Nusantara di masa lampau. Hal ini menunjukkan posisi dan peran strategis kabupaten Jeneponto dalam kehidupan dan peradaban masa lalu termasuk lintas sejarah yang menempatkan kabupaten Jeneponto menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut.

Kabupaten Jeneponto juga memiliki berbagai jenis atraksi budaya sebagai tinggalan kebudayaan berbagai masyarakat yang mendiami dan bermukim serta melakukan hubungan sosial ekonomi di masa lalu. Adapun jenis daya tarik wisata sejarah budaya kabupaten Jeneponto terdiri dari benda tinggalan sejarah, tarian, ritual, permainan rakyat, benda pusaka, dan benda cagar budaya lainnya. Jenis daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto

Tabel 6
Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Rumah adat Kambara' Tolo'	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Tolo' Kec. Kelara
2	Mesjid Tua Tolo'	1. Rumah Ibadah 2. Benda Sejarah	Mataere Tolo' Kec. Kelara
3	Makam Tuang Nong (Tung Nung)	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Mataere Tolo' Kec. Kelara
4	Rumah Adat Kampala	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Kampala Kec. Arungkeke
5	Rumah Adat Bulu – Bulu	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Bulu-Bulu Kec. Arungkeke
6	Rumah Adat Arungkeke	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Arungkeke Kec. Arungkeke
7	Rumah Adat Bonto Tangnga	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Tamalatea Kec. Tamalatea
8	Makam Joko	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba
9	Makam Raja-Raja Binamu	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba
10	Rumah Adat Kerajaan Binamu	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Pabiringa Kec. Binamu
11	Rumah Adat Kerajaan Binamu Raja Patappoi Kr Loloa	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu
12	Rumah adat Sapanang	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Sapanang Kec. Binamu
13	Makam Kr. Balang dan Gallarang Tannginunga Je'ne	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu
14	Makam Kr. Karampang Butung	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu
15	Makam Kr. Bebang	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Sapanang Kec. Binamu
16	Makam Patima Dg Ti'no	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Pabiringa Kec. Binamu
17	Makam Kr. Toayya (Kr. Ngilanga)	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Benteng Kec. Bangkala
18	Makam Kr. Lompo Bongga	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

			Kec. Bangkala
19	Makam Kr. Lompo Lappe	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
20	Makam Kr. Tanatoa	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala
21	Makam Parang Loe	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala
22	Makam Manukulang Dg. Pasore'	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Pallantikan Kec. Bangkala
23	Rumah Adat Alm. Pabisei Kr. Tunru	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Pantai Bahari Kec. Bangkala
24	Rumah Adat Kr. Tanatoa	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Tanatoa Kec. Bangkala
25	Makam Kr. Banri Manurung	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat
26	Makam Pabisei Kr. Tunru	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat
27	Kawasan Pacuan Kuda	1. Pacuan Kuda 2. Atraksi Budaya	Desa Kalimporo Kec. Bangkala
28	Accera Gaukang Bangkala	1. Pesta Rakyat 2. Tinggalan Sejarah	Desa Bisoli Kec. Bangkala Barat
29	Pesta Panen	1. Pesta Panen 2. Atraksi Budaya	Desa Beroanging Kec. Bangkala Barat
30	Maulid Sidenre Khusus Kelompok Sayye	1. Ritual Budaya	Sidenre' Kec. Binamu
31	Je'ne-je'ne Sappara	1. Pesta Rakyat 2. Ritual Budaya	Desa Tarowang Kec. Tarowang
32	Je'ne-je'ne sappara Karampang Pa'ja	1. Pesta Rakyat 2. Ritual Budaya	Karampang Pa'ja Kec. Tamalatea
33	Je'ne-je'ne sappara Borong Tala	1. Pesta Rakyat 2. Ritual Budaya	Karampang Pa'ja Kec. Tamalatea

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

34	Lapangan Pacuan Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba	1. Pacuan Kuda 2. Atraksi Budaya	Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu
35	Permandian Bungung Salapang	1. Sumur Permandian 2. Ritual Budaya	Desa Bontorappo Kec. Tarowang
36	Rumah Adat Kalimporo	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala
37	Artefak Serpilh Bilah	1. Tinggalan Sejarah	Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala
38	Situs Serpilh Bilah Karama	1. Tinggalan Sejarah	Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat
39	Kompleks Makam Kalimporo	1. Makam Sejarah	Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala
40	Makam Pasiri Dg Mangasa Karaeng Labbua Talibannanna	1. Makam Sejarah	Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

3. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan di kabupaten Jeneponto. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata,

Selain potensi wisata buatan manusia (*man-made*), potensi wisata minat khusus juga merupakan sarana atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada saat melaksanakan kunjungan ke kabupaten Jeneponto. Potensi wisata minat khusus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktivitas wisata selain aktivitas wisata yang secara operasional melekat dalam aktivitas wisata alam. Potensi daya tarik wisata wisata tersebut berupa taman, rekreasi keluarga, dan kuliner. Adapun Daya Tarik wisata buatan manusia dan minat khusus kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto

Tabel 7
Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Dermaga pantai Garassikang	1. Rekreasi Keluarga 2. Panorama Pantai	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
2	Tambak Garam (Pacelanga)	1. Kreativitas Masyarakat 2. Industri Garam Rakyat	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
3	Tambak Garam	1. Kreativitas Masyarakat 2. Industri Garam Rakyat	Pallantikang Kec. Arungkeke
4	Water Park Boyong	1. Rekreasi Keluarga 2. Kolam Renang	Tonro Kassi Timur (Boyong) Kec. Tamalatea
5	Taman Turatea	Rekreasi Keluarga	Kel. Empoang Kec. Binamu
6	Taman Siswa	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
7	Taman PKK	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
8	Taman Dharma Wanita Persatuan	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
9	Taman Lalu Lintas	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
10	Taman Pacuan Kuda	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
11	Pantai Tamarunang	1. Rekreasi Keluarga 2. Panorama Pantai	Kec. Binamu
12	Hutan Kota	Rekreasi Keluarga	Kel. Balang Kec. Binamu
13	Coto/ Konro Kuda	Kuliner Tradisional	Kab. Jeneponto
14	Ballo' Tanning/ Tuak Manis	Minuman Tradisional	Kec. Tamalatea
15	Lammang	Kuliner Tradisional	Ruku-Ruku Kel. Palangu' Kec. Bangkala

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

D. Perekonomian Kabupaten Jeneponto

1. Struktur Ekonomi

Berdasarkan penghitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jeneponto tahun 2017 adalah sebesar 8,26 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 5.967.176,40 juta rupiah. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB kabupaten Jeneponto. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Struktur Perekonomian Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor terbesar masih diberikan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,42 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih bertumpu pada sektor agraris.

Pada Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya yang mencapai 51,69%. Sementara untuk sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu menyumbang dan memberikan kontribusi sebesar 0,29 % walaupun menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,01% per tahun. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih besar dalam struktur perekonomian kabupaten Jeneponto.

Adapun gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2017
(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	52,40	51,80	51,69	41,42
2.	Pertambangan Dan Penggalian	2,34	2,60	2,64	2,72
3.	Industri Pengolahan	3,38	3,41	3,34	3,42
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,15	0,11	0,11	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07
6.	Konstruksi	8,99	9,18	9,18	10,75

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	11,08	11,38	11,67	12,30
8.	Transportasi Dan Pergudangan	1,02	1,08	1,01	1,01
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,26	0,27	0,28	0,29
10.	Informasi Dan Komunikasi	3,87	3,59	3,61	3,69
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,34	2,27	2,33	2,22
12.	Real Estate	2,35	2,44	2,40	2,35
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,90	6,83	6,73
15.	Jasa Pendidikan	2,14	2,10	2,04	2,06
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	2,17	2,25	2,24	2,27
17.	Jasa Lainnya	0,52	0,52	0,53	0,54

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2017 kabupaten Jeneponto mengalami pertumbuhan berada di posisi ke tiga setelah kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,26% dari 24 buah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator perekonomian utama yang digunakan dalam analisis struktur dan pertumbuhan perekonomian wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB. PDRB merupakan suatu ukuran kuantitatif dari hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu saat tertentu untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian pada masa-masa lalu dan masa sekarang serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/ *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan

salah satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin- mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya terdiri dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Berdasarkan PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mencapai 8.645.022,9 milyar rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang tertinggi dengan sumbangan sebesar 49,42%. Data mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto menurut lapangan usaha pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto

Tabel 9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	9,28	4,43	7,85	5,20
2.	Pertambangan Dan Penggalian	14,08	15,98	12,84	12,08
3.	Industri Pengolahan	9,68	6,67	7,05	8,70
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	17,31	-0,37	5,03	5,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4,55	0,56	4,77	5,47
6.	Konstruksi	5,31	8,79	7,08	23,26
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	8,90	10,09	11,17	11,09
8.	Transportasi Dan Pergudangan	10,41	8,16	5,67	9,12
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	10,39	13,74	13,69	12,47
10.	Informasi Dan Komunikasi	4,01	10,68	10,16	9,30
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	10,06	4,83	12,06	0,85
12.	Real Estate	3,60	7,39	6,26	3,28
13.	Jasa Perusahaan	0,07	5,87	5,71	8,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	4,59	7,85	5,07
15.	Jasa Pendidikan	2,91	7,25	6,40	7,80
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	8,98	9,31	7,21	8,18
17.	Jasa Lainnya	6,54	8,99	9,16	9,27

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

BAB - 4

RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI TAMARUNANG

A. Kondisi Eksisting Obyek Wisata

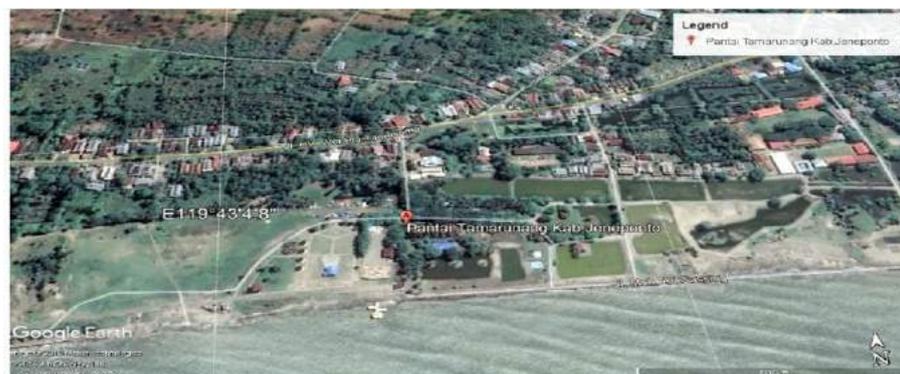
Sebagai kabupaten yang memiliki potensi laut dan pantai di provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Jeneponto juga berbenah mengembangkan potensi pantai tersebut sebagai salah satu pesona yang dapat menarik minat kunjungan berwisata. Salah satu pantai yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Jeneponto adalah Pantai Tamarunang. Pantai Tamarunang terletak di Tamarunang kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu. Lokasi Pantai Tamarunang berjarak sekitar 8km dari kota Bontosunggu sebagai pusat kota kabupaten Jeneponto atau kurang lebih sekitar 130 km dari kota Makassar.

Daya tarik wisata yang ada di Pantai Tamarunang adalah panorama alam pantai dengan hamparan pasir di sepanjang bibir pantai dan debur ombak serta semilir angin yang sejuk memanjakan pengunjung. Fasilitas yang telah dimiliki dan terus dikembangkan pada Pantai Tamarunang adalah hotel dan restoran, gazebo, panggung terbuka, dermaga, dan sarana olah raga.

Aktivitas wisata yang saat ini dapat dilakukan di Pantai Tamarunang adalah kegiatan olah raga dan rekreasi pantai dan alam terbuka bagi keluarga dan menikmati kuliner pada restoran yang tersedia sambil menikmati pesona alam pantai. Beberapa aktivitas yang merupakan potensi kawasan belum dapat dilakukan karena keterbatasan fasilitas serta beberapa kondisi degradasi alam seperti abrasi dan kerusakan talud akibat hempasan ombak pada musim barat di kawasan ini.

Gambaran tentang lokasi daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 9
Lokasi Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Google Earth, 2019

1. Gambaran Umum Wilayah

Kerangka konsep wilayah mendefinisikan bahwa wilayah merupakan bentangan permukaan bumi yang meliputi segenap makhluk hidup untuk dapat saling berinteraksi. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan, wilayah menjadi satu kesatuan secara geografis beserta segenap unsur yang terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administrasi dan aspek fungsional. Kabupaten Jeneponto secara geografis di bagian tengah merupakan dataran datar dan bagian perbukitan disisi utara serta kawasan pesisir pantai di tepi selatan. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah 749,79 km² yang terdiri dari 11 kecamatan :

Tabel 10
Jumlah Wilayah Kecamatan dan Luas Wilayah
Kabupaten Jeneponto

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Kabupaten (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,96	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,68
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turatea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
Total		749,79	100,00

Sumber : BPS Kab Jeneponto, 2019

Sebahagian wilayah Kabupaten Jeneponto memiliki curah hujan yang rendah, mengakibatkan aktifitas diwilayah tersebut lebih cenderung pada petambak garam, budidaya rumput laut di pesisir pantai dan di daerah dataran tengah pertanian tadah hujan serta di wilayah pegunungan banyak terdapat padang rumput sabana (*savana*) dan pohon lontar (*borassus flabellifer*).

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto

Tabel 11
Karakteristik Wilayah Kab. Jeneponto

Kawasan	Keterangan
	Kawasan Padang Rumput dan tanaman endemic
	Aktivitas Masyarakat Pesisir Pantai dengan melakukan budidaya rumput laut
	Pohon Lontar, masyarakat jeneponto menamakan pohon <i>tala</i> sebagai bahan baku gula merah
	Kawasan Pertanian dengan metode Tadah Hujan.

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2019*

Salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang berada di kabupaten Jeneponto adalah kecamatan Binamu dengan luas wilayah kecamatan binamu 69,49 km². Kecamatan Binamu memiliki 13 kelurahan/ desa yang terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai. Data tentang kecamatan Binamu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Biringkasi	8,73	12,56
Pabiringa	2,91	4,19

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

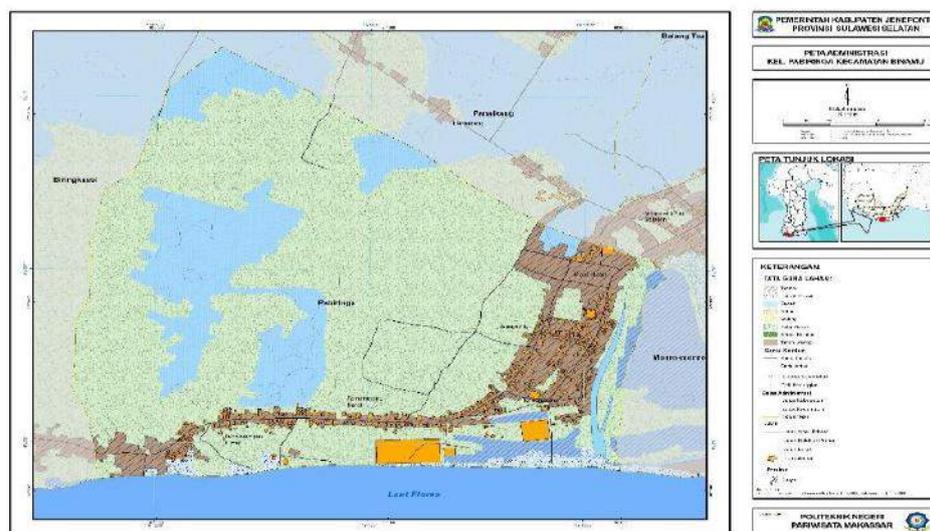
Panaikang	3,14	4,52
Monro-monro	4,28	6,16
Sidenre	3,19	4,50
Empoang Selatan	8,01	11,53
Empoang	9,45	13,60
Balang Toa	2,63	3,78
Balang	4,02	5,79
Balang Baru	5,04	7,25
Bontoa	4,13	5,94
Sapanang	3,87	5,57
Empoang Utara	10,09	14,52
Jumlah	69,49	100

Sumber BPS Kab. Jeneponto, 2019

Pemanfaatan lahan kecamatan Binamu meliputi terdiri dari lahan tagelan sekitar 3.210,1 Ha dan lahan sawah sekitar 1.903 Ha selebihnya merupakan daerah pesisir pantai, secara geografis memiliki ketinggian yang sama dari permukaan laut. Kabupaten Jeneponto merupakan daerah beriklim tropis tetapi relatif cukup kering di wilayah dataran tengah dan pesisir pantai, berbeda dengan wilayah pegunungan bahagian utara Kecamatan Rumbia dan Kelara, curah hujan di wilayah tersebut relatif sedang dan aktifitas masyarakat di kedua kecamatan tersebut adalah berkebun.

Pantai Tamarunang termasuk wilayah curah hujan yang rendah, suhu udara di Kecamatan Binamu Kelurahan Pabiringa berkisar 27° Celcius-32° Celcius. Batasan wilayah sebelah Utara dengan kecamatan Turatea, sebelah Timur dengan kecamatan Arungkeke, sebelah Barat dengan kecamatan Tamalatea, dan sebelah Selatan dengan Laut Flores.

Gambar 10
Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Pabiringa
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto



Sumber; Olah Map Politeknik Pariwisata Makassar

2. Kondisi Aksesibilitas

Infrastruktur mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah, termasuk pada pengembangan obyek wisata. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah.

Secara umum kondisi aksesibilitas dari dan ke obyek wisata Pantai Tamarunang saat ini cukup memadai untuk aksesibilitas umum berupa ketersediaan dan kondisi jalan raya dari akses utama ke gerbang masuk kawasan. Namun untuk kepentingan pariwisata dalam hal akses bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini masih tergolong rendah. Akses jalan dari jalan poros Makassar-Jeneponto menuju obyek wisata Pantai Tamarunang merupakan jalanan yang sepenuhnya diaspal secara menyeluruh dengan kondisi permukaan jalan tergolong baik.

Akses dan kondisi jalan dari gerbang identitas kawasan ke zona inti kawasan tergolong cukup baik, namun akses jalan tapak di dalam kawasan masih berupa jalan tanah dan belum tertata. Pada musim kemarau, jalan tapak akan berdebu dan sebaliknya pada musim hujan akses jalan tersebut akan berlumpur, sehingga sangat dibutuhkan proses pengembangan dan perbaikan khususnya akses jalan setapak dalam kawasan Pantai Tamarunang.

Gambaran tentang kondisi eksisting gerbang identitas kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut:

Gambar 11
Kondisi Eksisting Gerbang Identitas
Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran kondisi eksisting akses jalan masuk kawasan dari gerbang identitas kawasan ke zona inti daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 12
Kondisi Eksisting Akses Jalan Masuk Ke Kawasan
Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Kondisi jalan tapak dari akses jalan kawasan ke fasilitas pariwisata pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang menunjukkan bahwa beberapa bagian jalan terbuat dari *paving block* dan sebahagian besar masih berupa permukaan jalan tanah dengan kondisi jalan kurang memadai. Dengan kondisi akses jalan dalam kawasan wisata Pantai Tamarunang saat ini, akan memberikan pengaruh terhadap minat kunjungan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Pantai Tamarunang. Untuk itu perlu menjadi prioritas dalam melakukan perbaikan akses jalan yang lebih nyaman dan memadai.

Gambaran kondisi eksisting jalan tapak dengan permukaan jalan *paving block* pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 13
Kondisi Eksisting Jalan Tapak Dengan Permukaan Piving Block
Pada Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran kondisi eksisting jalan tapak dengan permukaan jalan tanah pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 14
Kondisi Eksisting Jalan Tapak Dengan Permukaan Tanah Pada Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

3. Kondisi Atraksi

Atraksi wisata yang menjadi daya tarik utama di kawasan Pantai Tamarunang adalah bentangan alam yang bervariasi dari bentangan pantai dan laut hingga kawasan dengan kontur datar dan perkampungan penduduk. Pada kawasan ini juga ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon rimbum sehingga menjadikan beberapa bagian dari kawasan ini menjadi teduh dari panas matahari serta semilir angin yang menghembus rimbum rumpun pohon kelapa menambah eksotisme atraksi wisata Pantai Tamarunang. Panorama alam pantai pada saat *sunset* merupakan atraksi yang sangat menarik.

Gambar 15
Panorama Senja Di Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Kondisi eksisting atraksi wisata Pantai Tamarunang saat ini cenderung terdegradasi oleh hempasan ombak yang cukup deras pada musim barat karena pada bagian luar pantai tidak terdapat talud atau pemecah gelombang sehingga derasnya hempasan ombak akan merusak tanggul pantai.

Gambar 16
Kondisi Eksisting Tanggul Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Aktivitas masyarakat dalam budi daya rumput laut juga berpotensi terhadap degradasi lingkungan kawasan. Dalam budi daya rumput laut, petani rumput laut menggunakan botol kemasan plastik sebagai pelampung yang dapat mengotori dan merusak lingkungan dan cenderung merusak atraksi pantai yang sangat mempesona.

Gambar 17
Kondisi Eksisting Budidaya Rumput Laut
Di Sekitar Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Selain itu, kondisi daya tarik Pantai Tamarunang yang belum dikelola secara profesional mengakibatkan lingkungan kawasan yang

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

kurang tertata dan tidak terawat sehingga penempatan dan pengembangan fasilitas di lingkungan kawasan, termasuk penanganan sampah kurang menjadi perhatian dan mengakibatkan rendahnya kondisi atraksi wisata.

Gambaran kondisi eksisting lingkungan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 18
Kondisi Eksisting Lingkungan kawasan
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

4. Kondisi Aktivitas

Aktivitas wisata yang ditawarkan dan dapat dinikmati oleh wisatawan di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sangat bervariasi. Dengan kelengkapan fasilitas yang disiapkan oleh pengelola Pantai Tamarunang saat ini, maka aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan antara lain adalah berenang di menikmati panorama alam pantai, menikmati panorama alam dari dermaga, rekreasi keluarga, *meeting*, event pada panggung pertunjukan atau sekedar melepas kepenatan dengan menikmati alam pantai sambil menikmati makanan dan minuman yang disediakan di kawasan ini.

Kondisi eksisting aktivitas wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di kawasan Pantai Tamarunang saat ini menjadi sangat terbatas dan kurang memadai akibat pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini terlihat dari kerusakan dan penampilan yang tidak terawat dari hampir keseluruhan fasilitas wisata yang disediakan di kawasan ini seperti area kuliner, kawasan pinggir pantai, *meeting room*, gazebo, *rest room*, dan lain sebagainya.

Gambaran kondisi eksisting dari aktivitas wisata dengan ketersediaan fasilitas wisata di kawasan Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 19
Kondisi Eksisting Fasilitas Penunjang
Aktivitas Wisata Di Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

5. Kondisi Akomodasi

Ketersediaan akomodasi pada daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang dapat meningkatkan minat kunjungan dan akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke daya tarik wisata karena di sela-sela kegiatan menikmati aktivitas wisata, wisatawan akan membutuhkan tempat dan ruang untuk beristirahat atau menikmati makan minum. Bahkan beberapa kelompok wisatawan menjadikan akomodasi sebagai tujuan utama berkunjung ke daya tarik wisata dengan motivasi ingin tidur dan istirahat pada suasana yang berbeda dari rutinitas kesehariannya.

Fasilitas akomodasi dalam konteks ini adalah seluruh jenis fasilitas yang menyiapkan kamar, tempat istirahat sementara, fasilitas ruang pertemuan, dan sarana menikmati makanan dan minuman selama melakukan kunjungan di daya tarik wisata. Fasilitas akomodasi yang tersedia di daya tarik wisata Pantai Tamarunang saat ini terdiri dari Hotel, restoran, dan *cafe*.

Gambaran kondisi eksisting dari hotel sebagai fasilitas akomodasi di kawasan Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 20
Kondisi Hotel Sebagai Fasilitas Akomodasi
Di Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Pada kawasan Pantai Tamarunang telah tersedia bangunan hotel, restoran, dan sebagai sarana akomodasi yang tersedia bagi wisatawan saat berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Kondisi hotel yang ada saat ini tidak dikelola dengan baik sehingga nampak tidak menarik dan kualitas serta kondisi fasilitas mengalami penurunan dengan kondisi yang tidak terawat dan tidak layak sebagai fasilitas wisatawan.

Fasilitas restoran yang juga berfungsi sebagai *meeting room* terletak di depan bangunan hotel pada sisi yang menghadap ke pantai Tamarunang. Fasilitas restoran disediakan bagi wisatawan saat berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang untuk menikmati makanan dan minuman pada saat berekreasi atau melakukan pertemuan (*meeting*).

Gambar 21 **Kondisi Eksisting Restoran dan Meeting Room** **Sebagai Fasilitas Akomodasi Di Pantai Tamarunang**



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Fasilitas lain pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah cafe yang terletak di bagian belakang bangunan hotel pada sisi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Fasilitas cafe saat ini cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan pada waktu tertentu khususnya pada sore hari untuk bercengkerama dengan keluarga atau kerabat sambil menikmati makanan dan minuman yang ditawarkan.

Gambar 22
Kondisi Eksisting Cafe Sebagai Fasilitas
Akomodasi Di Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

6. Kondisi Amenitas

Amenitas pariwisata adalah seluruh sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata dan menikmati aktivitas wisata di kawasan daya tarik wisata. Amenitas pariwisata yang saat ini tersedia di Pantai Tamarunang terdiri dari dermaga, panggung pertunjukan, ruang pameran, *rest room*, area kuliner, gazebo dan pagar pembatas zona inti kawasan Pantai Tamarunang.

Gambar 23
Kondisi Eksisting Ruang Pameran
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Sampai saat ini, amenities wisata yang tersedia di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang cukup variatif namun karena dalam kondisi yang sebahagian besar tidak tertata dan terawat dengan baik sehingga aktivitas wisata yang dilakukan masih sangat terbatas dan sebahagian besar tidak berfungsi dengan baik serta

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

menimbulkan kesan yang kurang baik bagi wisatawan. Pada akhirnya kondisi tersebut ikut berpengaruh pada minat kunjungan wisatawan ke Pantai Tamarunang.

Gambaran tentang kondisi eksisting panggung pertunjukan pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 24
Kondisi Eksisting Panggung Pertunjukan
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting *reservoir* atas pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 25
Kondisi Eksisting Reservoir Atas
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting fasilitas kuliner pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 26
Kondisi Eksisting Fasilitas Kuliner
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting *sculpture* berupa patung kuda sebagai identitas kabupaten Jeneponto pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 27
Kondisi Eksisting Sculpture Patung Kuda
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting fasilitas *toilet/ restroom* pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 28
Kondisi Eksisting Fasilitas Toilet/ Restroom
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting fasilitas gazebo pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 29
Kondisi Eksisting Fasilitas Gazebo
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting fasilitas tempat ibadah pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

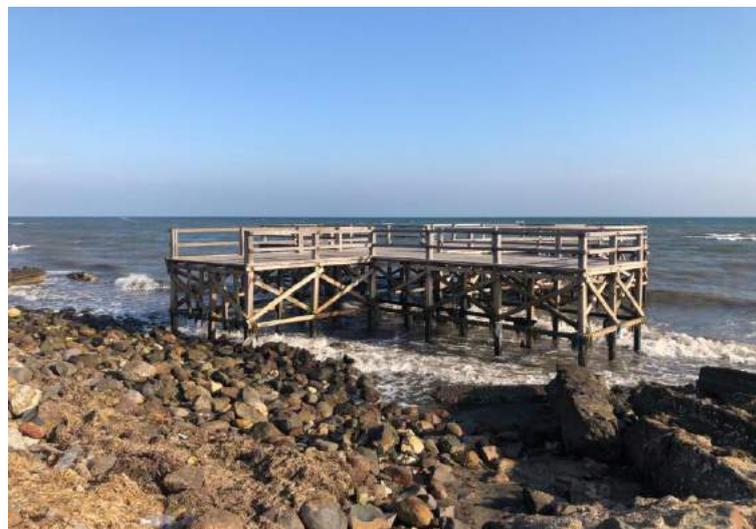
Gambar 30
Kondisi Eksisting Fasilitas Tempat Ibadah
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Gambaran tentang kondisi eksisting fasilitas dermaga pada Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 31
Kondisi Eksisting Fasilitas Dermaga
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Ketersediaan fasilitas tempat parkir secara khusus belum ada. Wisatawan yang berkunjung memarkir kendaraan pada area kawasan yang kosong, bahkan beberapa pengunjung yang menggunakan kendaraan roda dua, memarkir kendaraannya pada zona inti di sekitar bangunan atau fasilitas pariwisata yang ada. Fasilitas lainnya yang dibutuhkan namun belum tersedia secara khusus di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah loket wisata.

Selain kondisi area parkir dan loket wisata, amenities pariwisata lain yang belum tersedia di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah *souvenir shop*. Ketidaksiediaan atau tidak berfungsinya dengan baik fasilitas dan amenities pariwisata yang ada pada kawasan wisata sehingga sangat mempengaruhi citra daya tarik wisata Pantai Tamarunang yang memiliki potensi alam yang sangat memikat untuk dikunjungi.

Keberadaan dan ketersediaan amenities pariwisata memiliki peran yang sangat besar dalam memotivasi dan mendorong wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan alam pantai dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Pantai Tamarunang karena di dalam berwisata selain pemandangan dan suasana alam yang indah, wisatawan juga membutuhkan beberapa sarana prasarana penunjang yang terawat, bersih dan berfungsi dengan baik.

B. Desain Pengembangan Obyek Wisata

1. Rencana Struktur Ruang.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/ kota adalah tahapan awal sistem pengaturan pelayanan kegiatan ekonomi maupun pemerintahan kabupaten/ kota yang tersusun satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mengelola kehidupannya selain itu dengan adanya rencana struktur ruang juga berfungsi sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota dan sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa pemanfaatan dan penggunaan lahan adalah bagian dari kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan bagian - bagian yang diperlukan.

Kabupaten Jeneponto telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah di tahun 2012 sampai dengan 2031 yang berfungsi untuk memetakan zona-zona yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk dapat dilihat fungsi dan kelayakan setiap daerah yang ada di sana. Pembagian zona-zona tersebut meliputi filosofi dasar pengembangan ruang yakni:

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- a. Kawasan Lindung, memanfaatkan dan melestarikan kawasan lindung yang menjamin fungsi hidrologis serta sebagai pengendali pelestarian alam yang meliputi kawasan lindung, kawasan hutan lindung setempat, kawasan suatu alam, dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana.
- b. Kawasan Budi Daya, mengembangkan kawasan wisata sebagai mata pencaharian pokok penduduk jangka panjang, sekaligus pembentukan ruang wisata yang menunjang keindahan dan keseimbangan alam, pengalihan lahan-lahan yang tidak produktif pada pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
- c. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah di Kabupaten, Dari pembagian kawasan yang ada di Kabupaten Jeneponto, Pariwisata masuk kedalam Kawasan Budi Daya dengan beberapa ketentuan yang di atur didalamnya seperti, Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap terjaganya alam sekitar yang ada di kawasan pariwisata serta membatasi budaya luar yang mampu masuk dengan cepat dan merusak budaya lokal yang ada, Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau agar situs budaya yang sudah ada tetap terjaga dengan baik, Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang berfungsi untuk kawasan wisata ini berfungsi untuk menjaga kawasan pariwisata agar terjaga kebersihan dan kelestariannya.

Menurut Gumelar (2010). Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam angka pembinaan masyarakat untuk menjadi sadar wisata antara lain adalah pendidikan, sosial, agama, kebudayaan, ekonomi, adat istiadat. Apabila faktor faktor tersebut sudah memadai, dalam arti dapat memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan wisata pantai Tamaruanang, maka masyarakat dengan sendirinya akan mudah menerima program-program pengembangan wisata pantai ini dan bahkan akan mendukung sepenuhnya.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap sikap hidup, tingkah laku, wawasan dan daya adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi, sedangkan agama akan memberikan warna terhadap sikap dan prilaku orang yang bersangkutan, mereka akan menerima hal-hal yang positif dan menolak hal-hal yang negatif dari akses program-program pengembangan obyek wisata atas dasar ketaatan dan pengetahuan agamanya.

Melalui kebudayaan akan mencerminkan sikap dan prilaku mewarnai kehidupan masyarakat melalui keramah-tamahan. Prilaku masyarakat yang ramah akan sangat mudah untuk menerima siapapun pendatang yang mengunjungi obyek wisata pantai Tamarunang. Faktor ekonomi turut menentukan pula terhadap taraf hidup masyarakat di pedesaan. Makin tinggi tingkat

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

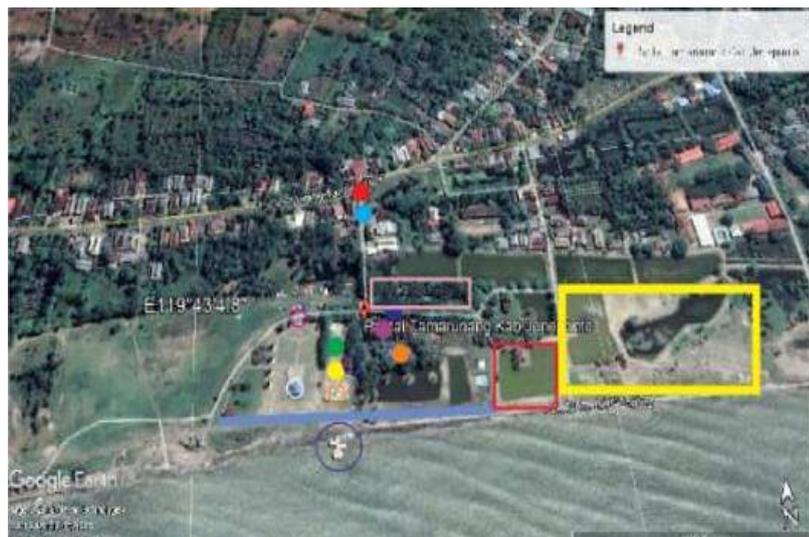
ekonomi di pedesaan akan semakin tinggi cara berpola hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Berikut ini akan dibahas komponen yang terkait dengan rencana pengembangan kawasan yang berhubungan dengan rencana tata ruang kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang Kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu, sebagai berikut :

a. Rencana Pemanfaatan Kawasan

Rencana pemanfaatan obyek wisata permandian Pantai Tamarunang disesuaikan dengan karakteristik fisik dan sosial di kawasan tersebut, selain itu pertimbangan RTRW yang telah ditetapkan yaitu Kawasan Peruntukan Pariwisata obyek wisata permandian Pantai Tamarunang di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu. Berdasarkan hasil survei lapangan, maka rencana tata guna untuk kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 32
Rencana Pemanfaatan Kawasan
Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Gambar rencana pemanfaatan kawasan obyek wisata tersebut, penggunaan Lahan di Obyek Wisata Pantai Tamarunang terbagi menjadi 6 bagian rencana pengembangan. 1) Tema Daya Tarik; 2) Aksesibilitas 3) Atraksi 4) Aktivitas 5) Amenitas 6) Akomodasi, dengan rincian:

- 1) Tema Daya Tarik : Rekreasi wisata keluarga perkotaan (*urban tourism*)
- 2) Aksesibilitas : Jalan masuk dan keluar kawasan, jalan tapak, transportasi darat, dan transportasi laut
- 3) Atraksi : Panorama laut, sunset, dan kontur alam dan Pohon Rindang
- 4) Aktivitas : Olah raga, *out bound*, *meeting*, berkuda,

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- renang, rekreasi keluarga dan berjemur
- 5) Amenitas : Toilet, Sarana ibadah, Gazebo, ATM, area parkir, talud, *photo spot*, *sport & recreation facilities*, dan gerbang
- 6) Akomodasi : Hotel, Restoran, Cinderamata, dan *Meeting Room*

b. Rencana Ruang Pariwisata

Kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan wisata di tempat lain, hal ini dikarenakan kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang yang berlokasi di Kelurahan Pabiringan Kecamatan Bangkala ini memiliki gabungan wisata yakni pantai, laut, dan lingkungan perkotaan kabupaten Jeneponto yang sebahagian besar fasilitas sudah dibangun, namun karena perencanaan dan pengelolaan yang kurang baik sehingga dibutuhkan penyempurnaan konsep pengembangan agar pesona obyek wisata yang sangat potensial pada kawasan ini dapat menjadi ikon utama kepariwisataan kabupaten Jeneponto.

Untuk itu diperlukan strategi sistematis dalam merencanakan dan mengembangkan ruang untuk aktivitas pariwisata yang menarik dan memberikan akses yang memadai dalam kegiatan kepariwisataan dalam konteks nyaman dan keamanan wisatawan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dan keselerasan serta pelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat di sekitar kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang.

Adapun rencana pengembangan ruang pariwisata di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar *block plan* berikut :

Gambar 33
Block Plan Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

2. Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata

Perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu adalah penataan potensi kawasan yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pasar wisatawan sehingga pengembangan kawasan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar kawasan pada khususnya dan kabupaten Jeneponto secara umum, sekaligus meningkatkan citra provinsi Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Di sisi lain, pengembangan kawasan daya tarik Pantai Tamarunang juga diharapkan dapat berfungsi dalam mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, sosial budaya, serta menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan pendapatan asli daerah melalui pembelanjaan wisatawan pada saat berwisata di kawasan ini.

Kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik di kabupaten Jeneponto. Dengan kondisi topografi dan vegetasi yang dimiliki saat ini, maka orientasi pengembangannya diarahkan sebagai daya tarik wisata alam pantai untuk rekreasi keluarga dan wisata rekreasi olah raga pantai. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang akan dilakukan melalui beberapa rencana pengembangan sebagai berikut :

a. Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata

Fasilitas wisata diartikan sebagai sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan daya tarik wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/ penginapan, restoran, dan toko cinderamata), transportasi (jalan alternatif, pedestrian dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum dan moda transportasi lokal) dan pemenuhan kebutuhan lainnya (mushola, tempat parkir, toilet dan *shetler*).

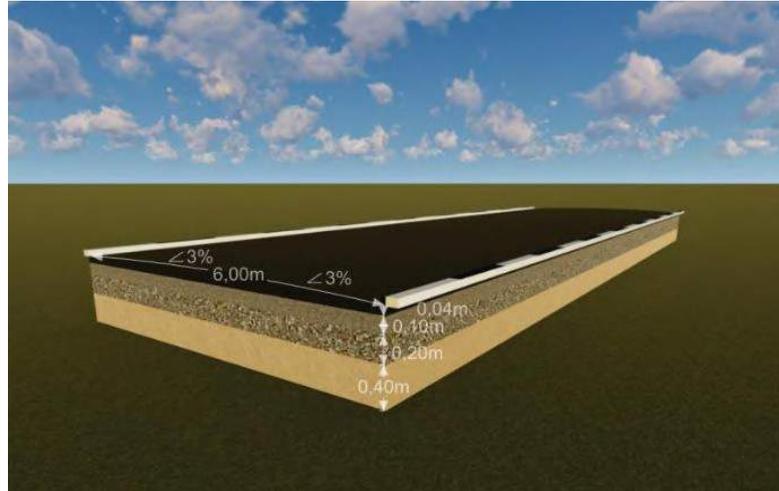
1) Rencana Pengembangan Aksesibilitas

a) Jalan Kawasan

Jalan kawasan merupakan akses utama bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Jalan kawasan ini menghubungkan akses utama jalan yang menghubungkan gerbang identitas kawasan dengan area parkir kendaraan serta fasilitas dan area aktivitas wisatawan. Dengan demikian maka kondisi dan kualitas jalan kawasan ini harus mampu diakses oleh kendaraan roda 4 dan roda dua serta dilengkapi dengan akses pejalan kaki pada masing-masing sisi jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Struktur jalan kawasan adalah dengan desain jalan sebagai berikut :

Gambar 34
Desain Rencana Pengembangan Struktur Jalan Kawasan
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

Pada sisi jalan kawasan direncanakan untuk membangun jalur untuk pejalan kaki yang akan digunakan wisatawan beraktivitas di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses yang memadai dan aman bagi wisatawan yang berkunjung mengingat pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang, aktivitas wisatawan tidak hanya pada areal dalam kawasan (zona inti) tetapi akan dilakukan juga di area luar kawasan karena fasilitas wisata yang disiapkan pada kawasan ini cukup menyebar pada seluruh area kawasan.

b) **Jalan Setapak/ Pedestrian**

Prinsip perencanaan jaringan jalan setapak sebagai jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah untuk :

- (1) Memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin;
- (2) Menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas;
- (3) Menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi;
- (4) Mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik; mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- (5) Memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri;
- (6) Mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki;
- (7) Mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi;
- (8) Menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat kabupaten Jeneponto, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan; dan
- (9) Prinsip perencanaan prasarana jalur pejalan kaki menekankan aspek kontekstual dengan kawasan yang direncanakan.

Tipe jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah jalur pedestrian dengan penangung berupa atap dan dilengkapi dengan jalur hijau peneduh di salah satu atau kedua sisinya. Selain itu, dalam pembangunan jalur pejalan kaki juga mempertimbangkan skala dan dimensi kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan dimensi tubuh manusia, yaitu :

- (1) Dimensi tubuh manusia yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya.
- (2) Kebutuhan ruang minimum pejalan kaki: 1) tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0,27 m² ; b) tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m²; dan c) membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1,35 m² -1,6 m² .
- (3) Ruang jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian berkebutuhan khusus adalah a) jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1,5 m dan luas minimum 2,25 m²; b) tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8% atau 1 banding 12 ; dan c) jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi

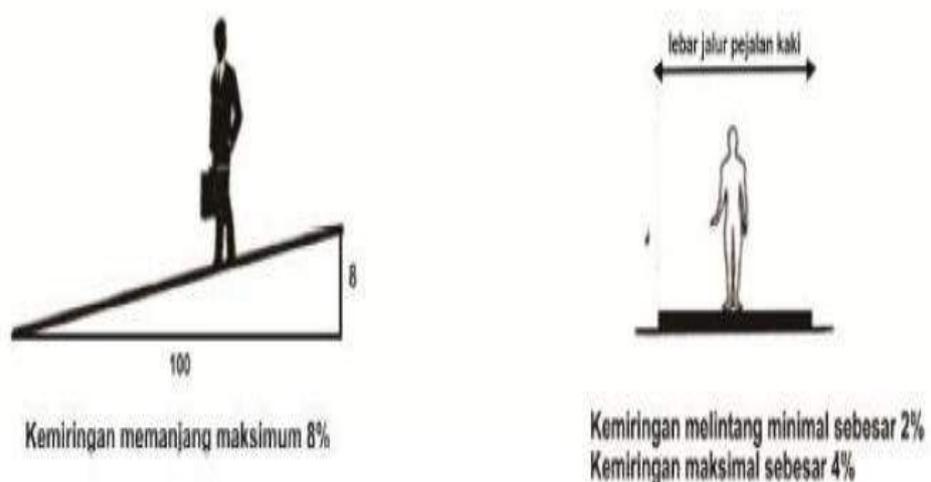
Gambar 35
Kebutuhan Gerak Minimum Pejalan Kaki

Posisi	Kebutuhan Ruang	
	Lebar	Luas
1. Diam		0,27 m ²
2. Bergerak		1,08 m ²
3. Bergerak membawa Barang		1,35 - 1,62 m ²

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Kemiringan jalur pejalan kaki pada kawasan daya tarik Pantai Tamarunang terdiri dari 1) kemiringan memanjang, kriterianya ditentukan berdasarkan kemampuan berjalan kaki dan tujuan desain; kemiringan maksimal sebesar 8% dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang minimal 1,2 meter pada setiap jarak maksimal 9 meter; 2) kemiringan melintang, kriterianya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk drainase serta material yang digunakan pada jalur pejalan kaki; kemiringan minimal sebesar 2% dan kemiringan maksimal sebesar 4% ; dan 3) dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan kemiringan memanjang, kemiringan dimaksud digantikan dengan penyediaan anak tangga.

Gambar 36
Ilustrasi Kemiringan Jalur Pejalan Kaki



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Sistem jaringan sirkulasi pejalan kaki pada kawasan daya tarik wisata direncanakan terintegrasi dengan perencanaan zona kegiatan wisata untuk optimalisasi akses antar fasilitas maupun akses dari dan menuju lokasi kawasan wisata; dan lokasi fasilitas berada dalam cakupan jarak pejalan kaki, yaitu antara 300 – 400 meter. Apabila jarak lebih dari 400 meter, harus diberikan jeda atau tempat istirahat pejalan kaki.

Furnitur pelengkap jalur pedestrian sebaiknya diletakkan sepanjang jalur pedestrian pada titik-titik amenities/ fasilitas atau area istirahat yang berlokasi di setiap jarak kurang lebih 400 meter. Furnitur pelengkap jalur pedestrian terdiri dari material kerkerasan jalur pedestrian; tanaman/ vegetasi di sekitar jalur pedestrian; penangung/ penutup atap jalur pedestrian; lampu/ penerangan; sistem tata informasi umum; sistem tata informasi kawasan wisata; bangku dan tempat sampah; dan toilet umum. Warna furnitur pelengkap jalur pedestrian bersifat selaras maupun kontras dengan warna latar belakang atau warna jalur pedestrian. Material dipilih sesuai dengan potensi lokal, misalnya: semen, batu, kayu, besi, dan lain-lain; dan permukaan material harus anti slip, tidak licin, serta rata dan datar.

Tanaman/ vegetasi di sekitar jalur pedestrian dengan tipe tanaman yang digunakan dalam perancangan jalur pedestrian adalah 1) Pohon besar yang rimbun dan berfungsi sebagai pengarah untuk digunakan dalam perancangan jalur pedestrian tanpa penutup atau pergola; 2) Tanaman rambat digunakan dalam perancangan jalur pedestrian dengan penutup pergola; dan 3) Perdu/ *shrubs*, rumput dan penutup tanah/ *ground cover* digunakan dalam perancangan jalur pedestrian secara umum.

Tipe tanaman dipilih bervariasi dengan urutan penanaman/ layer dari batas tepi jalur pedestrian: rumput atau *ground cover* – perdu atau *shrubs* – pohon besar; dan tanaman dipilih jenis natif atau sesuai dengan kondisi ekosistem kabupaten Jeneponto..

Gambar 37
Contoh Ilustrasi Penangung Pada Jalur Pedestrian



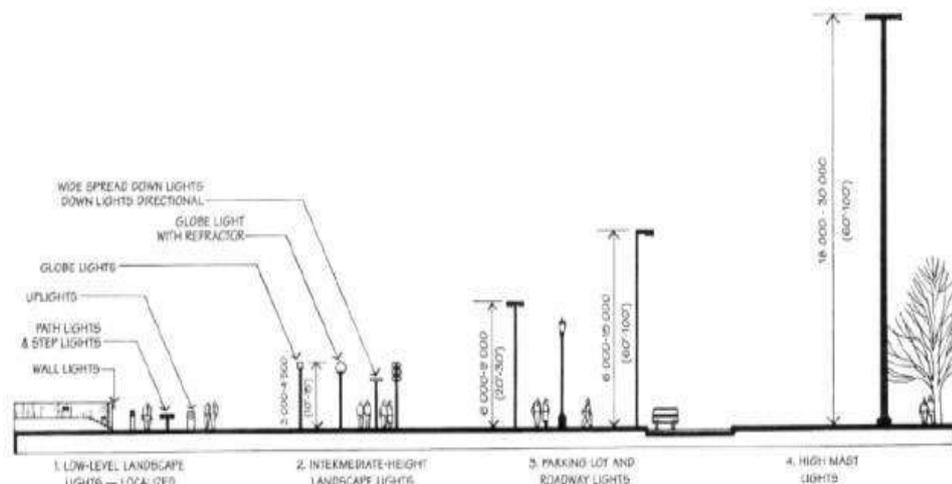
Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Atap (penaung) jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian adalah 1) sebagai jalur pedestrian, penaung berfungsi menghubungkan antar fasilitas atau area aktivitas di dalam taman. Gazebo, berfungsi sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Pada kedua fungsi tersebut, penaung bersifat memberikan perlindungan pada pengunjung dari sinar matahari langsung, tanpa menghalangi lewatnya angin sepoi atau cahaya matahari yang tidak terlalu terik; dan 2) selain bersifat fungsional, desain penaung juga memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau transformasi dari arsitektur lokal. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lain di dalamnya, desain penaung harus selaras dengan konsep perencanaan taman secara keseluruhan, dan secara khusus misalnya selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya.

Untuk lampu atau penerangan jalan merupakan fitur elemen pelengkap jalur pedestrian yang berkaitan erat dengan aspek keamanan, khususnya pada malam hari. Berikut tujuan pemasangan lampu taman antara lain:

- (1) Memberikan rasa aman bagi para pengguna jalur pedestrian, serta mengurangi potensi kerusakan atau kerugian properti
- (2) Meningkatkan kejelasan visual; dan
- (3) Meningkatkan potensi penggunaan fitur-fitur jalur pedestrian yang menonjol, khususnya di malam hari, yang membutuhkan suatu intensitas cahaya tertentu.

Gambar 38
Contoh Ilustrasi Diagramatis Sistem Penerangan Ruang Luar
Pada Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

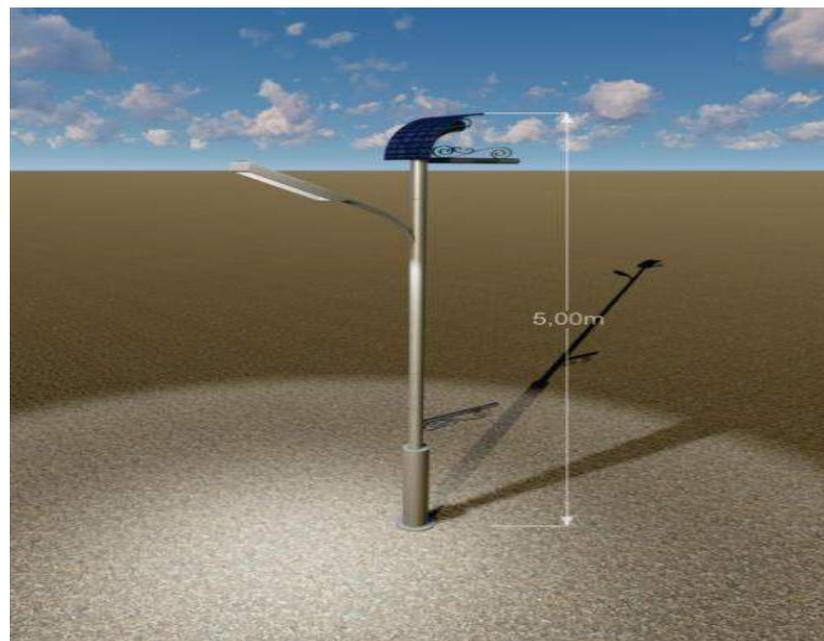
Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Sehubungan dengan pertimbangan terhadap faktor keamanan, pencahayaan yang dipilih untuk penerangan jalur pedestrian pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah jenis pencahayaan yang bersifat terang dengan warna cahaya lampu putih. Beberapa hal yang menjadi standar umum lampu jalan pada jalur jalan pedestrian adalah:

- (1) Lampu/ penerangan dipasang terintegrasi dengan elemen lainnya yang berbentuk tiang, seperti tiang penabung, dengan menyesuaikan tingginya;
- (2) Tiang lampu/ penerangan yang berdiri sendiri diletakkan dengan jarak minimum 6 – 7 meter antar lampu;
- (3) Lampu/ penerangan dipasang pada ketinggian bervariasi sesuai dengan fungsinya, yaitu : a) ketinggian tiang di bawah 1,8 meter untuk penerangan rendah; b) ketinggian tiang 3–4,5 meter penerangan menengah, umumnya digunakan untuk penerangan sepanjang jalur pedestrian; c) ketinggian tiang antara 6 – 15 meter digunakan untuk penerangan area parkir, area rekreasi dan jalan raya; dan d) ketinggian tiang antara 18 – 30 meter untuk penerangan tinggi, digunakan untuk area parkir, area rekreasi dan jalan bebas hambatan.

Rencana pengembangan penerangan jalan pada kawasan Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 39
Desain Lampu Penerangan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

c) Dermaga Wisata

Dermaga di sebuah kawasan pariwisata mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke kawasan pariwisata maupun pergerakan di dalam kawasan pariwisata. Dalam membangun dermaga di kawasan pariwisata perlu memperhatikan prinsip dan kaidah sebagai berikut:

- (1) Desain dalam perencanaan pembangunan dermaga di kawasan wisata dilakukan untuk:
 - (a) Pemenuhan aspek fungsional yaitu dermaga adalah fasilitas yang dibangun untuk keperluan kelancaran berbagai aktivitas penyeberangan. Di kawasan pariwisata, dermaga berfungsi untuk memudahkan wisatawan menjangkau atraksi wisata dan sebagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat. Untuk memenuhi aspek fungsional tersebut, pembangunan dermaga harus memenuhi persyaratan dari rancangan dermaga di kawasan pariwisata, baik dari segi dimensi, struktur maupun tata letak;
 - (b) Pemenuhan nilai estetika, yaitu dermaga kiranya juga memiliki nilai estetika. Nilai estetika mampu menyenangkan secara visual yang pada akhirnya menghasilkan apresiasi yang baik. Wujud estetika akan tampak pada keharmonian yang teraplikasikan dalam pembuatan desain dermaga. Nilai estetika tidak terlepas dari budaya yang berkembang di kawasan tersebut. Oleh karena itu desain dermaga di kawasan pariwisata kiranya memperhatikan nilai budaya masyarakat sehingga unsur estetika dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang.
 - (c) Pemenuhan prinsip ekonomis, yaitu pembangunan dermaga di kawasan pariwisata seyogyanya mampu memenuhi prinsip ekonomis yaitu dikonstruksikan dengan cara yang mudah, kuat dan biaya yang efisien.
 - (d) Terpenuhinya persyaratan kelestarian lingkungan, yaitu dalam perencanaan pembangunan dermaga sebagai bagian dari pelabuhan, dokumen tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dipersiapkan.
 - (e) Terpenuhinya prosedur keselamatan dan keamanan, maka rancangan dermaga di kawasan pariwisata harus memperhatikan : dimensi dermaga yang ditentukan oleh jenis, ukuran dan jumlah kapal yang menggunakannya; daerah perairan di sekelilingnya harus tenang, dan tidak mudah mengalami pendangkalan; ditempatkan pada daerah yang tidak terhalang angin pada saat kapal memasuki atau meninggalkan dermaga; ditempatkan pada daerah yang memungkinkan kapal dapat beroperasi dengan

lancar; lokasi dermaga harus berada dalam koordinasi dengan rencana pemanfaatan lahan untuk area-area di sekelilingnya; dermaga harus ditempatkan pada area dengan akses lalu lintas darat dan fasilitas penyimpanan yang baik; dermaga harus dikonstruksikan dengan cara yang mudah, kuat dan biaya yang efisien; dan lokasi dermaga harus memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.

Pembangunan dermaga termasuk ke dalam pembangunan pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dijalankan untuk menunjang kegiatan yang bersifat khusus dan pada umumnya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kriteria desain struktur dermaga berdasarkan lingkungan yang telah ditentukan yaitu: 1) Kondisi alam, yang digunakan dalam perencanaan terdiri dari : pasang surut, arus perairan, angin, kondisi geologi/ tanah, tinggi gelombang rencana; 2) Tinjauan karakteristik kapal; 3) Tinjauan dimensi dermaga yang ditentukan berdasarkan panjang dan lebar dermaga, kedalaman kolam pelabuhan dan luas daerah pendukung operasinya. Semua ukuran ini menentukan kemampuan pelabuhan dalam penanganan kapal. Ukuran dan bentuk konstruksi menentukan pula besar investasi yang diperlukan, sehingga penentuan yang tepat akan membantu operasional pelabuhan yang efisien.

Untuk dermaga di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang direncanakan berfungsi sebagai dermaga hub bagi wisatawan yang akan datang menggunakan kapal/ perahu wisata termasuk menghubungkan beberapa daya tarik wisata sekitar seperti Pantai Birtaria Kassi, Tanjung Mallasoro, dan Pulau Harapan serta wisatawan dari kota Makassar, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar dari akses laut sebagai salah satu pintu utama wisatawan ke kabupaten Jeneponto.

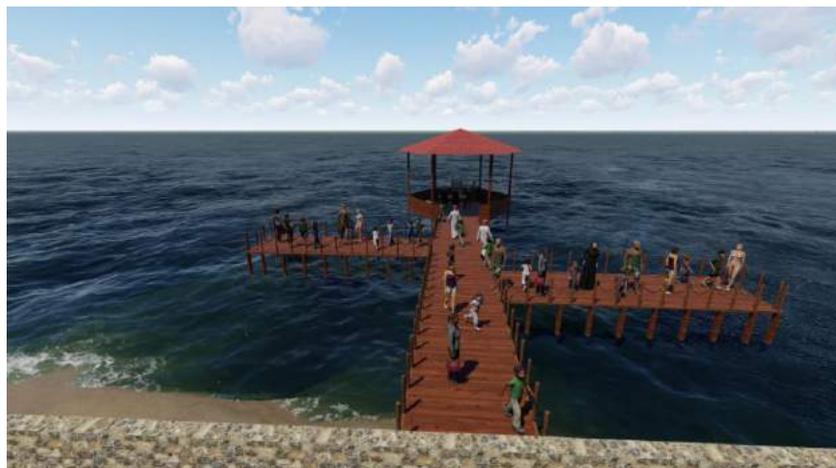
Dermaga jenis *jetty* tergolong sesuai dalam mendukung aktivitas wisata di kawasan Pantai Tamarunang. Dermaga merupakan batas muka antara daratan dan perairan dimana kapal dapat bertambat, untuk tipe *jetty* dibangun cukup jauh menjorok ke arah laut dengan maksud agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup bagi kapal besar untuk merapat.

Saat ini di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sudah terdapat dermaga, dan untuk kepentingan pariwisata maka dermaga yang telah ada tersebut akan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menambah minat berkunjung dan beraktivitas wisatawan dengan aman dan nyaman. Penambahan struktur dermaga tipe *jetty* untuk mendukung kegiatan wisata adalah :

- 1) Fasilitas bersandar (*berthing*), pada waktu kapal merapat ke dermaga masih memiliki kecepatan sehingga akan terjadi benturan antar kapal dan dermaga. Untuk itu maka disepanjang dermaga diberi bantalan yang berfungsi untuk menyerap energi benturan, bantalan ini disebut *fender*.
- 2) Fasilitas penambat (*mooring*), kapal yang merapat ke dermaga akan ditambatkan dengan menggunakan tali ke alat penambat untuk menahan gerakan kapal yang disebabkan oleh angin, arus dan gelombang. Alat penambat yang akan digunakan pada dermaga ini adalah pelampung penambat/ *mooring buoy*.

Rencana pengembangan dermaga wisata pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 40
Ilustrasi Pengembangan Dermaga Wisata
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

2) Rencana Pengembangan Atraksi
a) Panggung Kesenian

Panggung kesenian/ pertunjukan adalah bentuk dari tempat berkumpul yang di dalamnya tersedia tempat duduk dengan kapasitas besar serta area panggung untuk pertunjukan dan hiburan untuk pengunjung. Panggung kesenian dapat digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan yang berbasis budaya masyarakat atau kesenian tradisonal.

Selain itu pembangunan panggung kesenian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sebagai upaya peningkatan pengalaman wisata, lama tinggal serta distribusi wisatawan. Faktor-faktor yang diperhitungkan serta diperhatikan dalam pembangunan panggung kesenian/ pertunjukan antara lain: ukuran; orientasi; akustik; *stage/ panggung*; tempat duduk; dan pencahayaan/ *lighting*.

Theater dibuat menyesuaikan keterbatasan penglihatan penonton dan menyediakan ruang yang cukup untuk menampung penonton dalam jumlah yang banyak. Auditorium dari sebuah panggung kesenian/ pertunjukan berbentuk semi lingkaran dengan sudut 180 (seratus delapan puluh) derajat (gaya Romawi) dan sudut 220 (dua ratus dua puluh) derajat untuk panggung kesenian/pertunjukan (gaya Yunani). Bentuk tersebut dibuat agar secara visibilitas, penonton dapat melihat dengan baik panggung yang di letakkan di bagian tengah.

Selain dari segi bentuk, ukuran panggung kesenian/ pertunjukan di hitung sesuai batas penglihatan serta pendengaran yang dimiliki oleh manusia, hal tersebut dilakukan agar penonton yang mengunjungi panggung kesenian/ pertunjukan dapat menikmati pertunjukan dengan nyaman. Panggung merupakan pusat dari aktivitas yang terdapat di panggung kesenian/ pertunjukan. Dalam membuat sebuah *stage/* panggung, hal yang diperhatikan adalah aspek penyampaian bunyi kepada penonton.

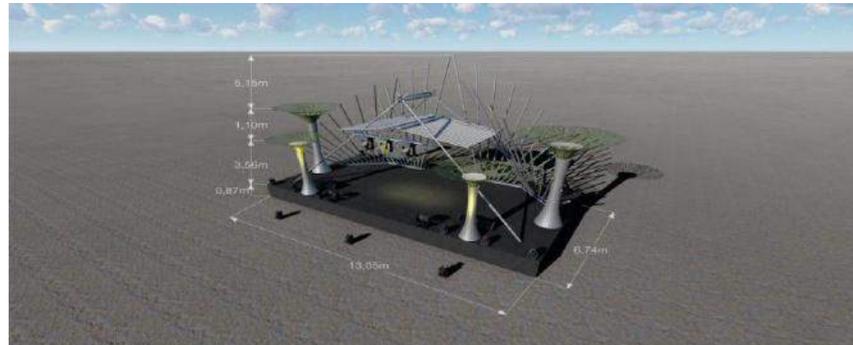
Pedoman ukuran panggung kesenian/ pertunjukan yang digunakan dalam perencanaan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah:

- 1) Batas maksimum terjauh agar penonton tetap bisa mendengar dengan baik adalah 65,62 ft atau sekitar 20,5 meter; dan
- 2) lebar minimum tempat duduk yang dibutuhkan untuk satu orang adalah 1,5 ft atau sekitar 55 cm .

Aspek visibilitas atau kemudahan melihat obyek dipertimbangkan dalam membuat panggung kesenian/ pertunjukan. Pembangunan tempat duduk panggung kesenian/ pertunjukan adalah dengan berbentuk cekung. Beberapa pilihan bahan yang digunakan untuk membuat tempat duduk, antara lain: kayu, besi, batu, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Pembuatan tempat duduk memperhatikan bahan yang digunakan dan drainasenya, karena hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan penonton.

Adapun rancangan pembuatan panggung kesenian/ pertunjukan pada kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 41
**Rencana Pengembangan Panggung Kesenian/
Pertunjukan Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang**



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

b) Landscape

Penataan *landscape* daya tarik wisata Pantai Tamarunang terdiri dari pembuatan pergola dan gazebo, pembuatan pagar pembatas dan pemasangan lampu taman. Pergola adalah pelengkap taman yang membentuk peneduh pada jalur pedestrian, area duduk atau area berkumpul (gazebo).

Pergola berupa deretan tiang/ kolom/ pilar yang umumnya menopang balok-balok melintang di atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penaung yang bersifat transparan, dan sering diberi tanaman merambat. Sebagai jalur pedestrian, pergola berfungsi menghubungkan antar fasilitas atau area aktivitas di dalam taman.

Sebagai gazebo, pergola berfungsi sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Pada kedua fungsi tersebut, pergola bersifat memberikan perlindungan pada pengunjung dari sinar matahari langsung. Rencana pengembangan gazebo untuk aktivitas beristirahat pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 42
Rancangan Gazebo Kecil
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Selain bersifat fungsional, desain pergola pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya dan kearifan lokal kabupaten Jeneponto. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lainnya, desain pergola dibuat selaras dengan konsep perencanaan taman kawasan Pantai Tamarunang secara keseluruhan, dan selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya.

Rancangan pembuatan Pergola pada kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 43
Rancangan Pergola
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Untuk menambah keindahan dan daya tarik obyek wisata Pantai Tamarunang dilengkapi dengan lampu taman. Lampu atau penerangan merupakan elemen pelengkap taman yang terkait dengan penciptaan suasana. Terkait dengan syarat penerangan, maka untuk tujuan tersebut jenis pencahayaan yang dipilih untuk penerangan taman dan area sekitarnya pada daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah pencahayaan untuk memberikan kesan hangat dan nyaman, yaitu dengan pemilihan lampu berwarna *orange*/ jingga.

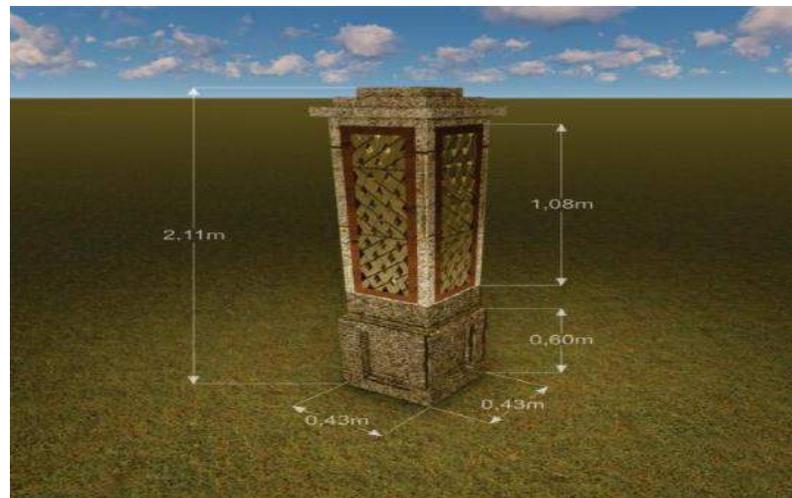
Pengecualian pada beberapa titik utama yang membutuhkan tingkat keamanan lebih tinggi sehingga menggunakan lampu dengan cahaya berwarna putih. Terkait syarat teknis tiang lampu, beberapa hal yang menjadi standar umum adalah, sebagai berikut:

- 1) Lampu/ penerangan di dalam gazebo dapat dipasang terintegrasi dengan tiang-tiang penyangga gazebo.

- 2) Tiang lampu/penerangan area luar sekitar gazebo (taman) diletakkan pada jarak minimum 0,8 – 1 meter dari batas tepi gazebo.
- 3) Lampu/penerangan dalam gazebo disesuaikan tingginya dengan ketinggian tiang penyangga gazebo.
- 4) Lampu/ penerangan area luar sekitar gazebo dipasang pada ketinggian 7 meter.

Rancangan pembuatan lampu taman pada kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 44
Desain Lampu Taman Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Untuk pertimbangan keamanan dan keselamatan pengunjung termasuk asset daya tarik wisata Pantai Tamarunang, maka rencana pengembangannya dilengkapi dengan pagar pembatas. Tujuan pembuatan pagar pembatas dalam kawasan wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai pemisahan zona aktivitas dengan zona tingkat intensitas yang berbeda. Pembuatan pagar pembatas taman bertujuan untuk mengarahkan sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tertentu, seperti misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada beragam titik-titik atraksi wisata dalam satu putaran serta mengoptimalkan pendapatan dari kunjungan wisatawan mengingat di sekitar kawasan merupakan area terbuka dan pemukiman masyarakat.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka desain pembatas taman mengacu pada persyaratan fungsional maupun kualitas estetika dari lingkungan di sekelilingnya. Secara prinsip pagar pembatas taman merupakan pembatas bangunan sehingga desainnya harus jelas dan memperhatikan faktor keamanan dari lingkungan sekitarnya. Selain bersifat fungsional, desain

pagar juga harus memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau kearifan lokal kabupaten Jeneponto.

Gambar 45
Ilustrasi Pagar kawasan Dan Jalur Pedestrian
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang

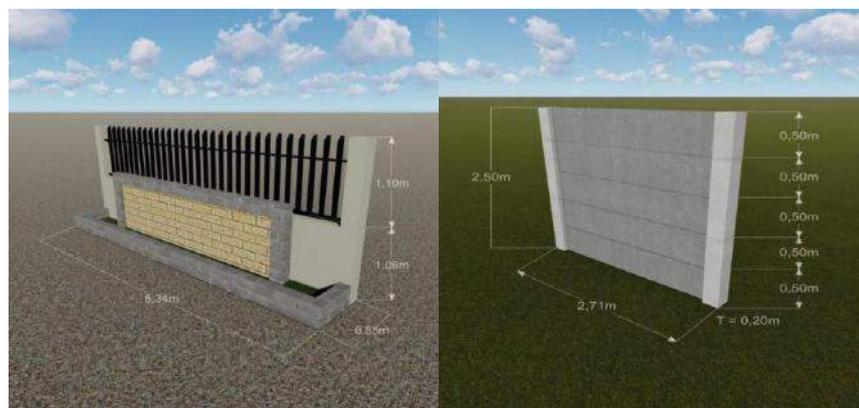


Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Pemilihan material disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya: kayu, batu bata, batu, besi, dan lain-lain. Pagar juga ditanami tanaman rambat agar memberikan kenyamanan pengunjung. Untuk memberikan kesan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, desain pagar pada beberapa bagian kawasan dibuat berbentuk deretan pohon, perdu atau semak tanpa pemasangan suatu batas dengan material yang bersifat masif. Ketinggian pagar pembatas yang bersifat masif adalah maksimum 1,2 meter. Hal ini untuk menghindari kesan tertutup dan terpisah pada taman tersebut.

Rancangan pembuatan pagar pada kawasan obyek wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 46
Desain Pagar Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

3) Rencana Pengembangan Aktivitas

Sejalan dengan rencana pengembangan berbagai fasilitas atraksi wisata dan amenities pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang maka akan mempengaruhi aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan pada saat berkunjung, seperti Olah raga dan rekreasi pantai, *outbound*, *waterboom*, *meeting*, pertunjukan, pameran, kuliner, berenang di pantai, laut atau kolam renang, serta bermain pada taman dan area permainan.

a) *Canoeing*

Aktivitas *Canoeing* adalah aktivitas yang juga dapat dikembangkan di Kawasan Pantai Tamarunang. Aktivitas ini mampu mendatangkan wisatawan baik aktivitas *canoeing* untuk rekreasi maupun aktivitas *canoeing* untuk olahraga. Aktivitas ini direncanakan dikembangkan dengan memanfaatkan sebagian wilayah di dalam zona *water break/* talud pada Pantai Tamarunang namun perlu pembatasan jalur sehingga tidak mengganggu aktivitas wisata lainnya pada area yang sama. Adapun ilustrasi aktivitas *canoeing* untuk rekreasi adalah sebagai berikut :

Gambar 47
Ilustrasi Aktivitas Canoeing di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

b) **Rekreasi dan Olah Raga Pantai**

Aktivitas rekreasi dan olah raga pantai yang akan dikembangkan di kawasan ini dan dapat menambah kepuasan wisatawan antara lain sebagai berikut :

- 1) Berenang (*Swimming*) di sekitar laut dan pantai dalam kawasan *waterbreak/* talud pada daya tarik wisata Pantai Tamarunang;
- 2) Berjemur (*Sunbathing*) di atas pasir buatan atau pada kursi jemur sepanjang pantai;
- 3) Bermain volley pantai pada area di sekitar pantai;
- 4) Berjalan (*Beach Walking*) atau pada *jogging track* di sepanjang pantai; dan

- 5) Aktivitas pantai dan laut lainnya yang diminati wisatawan dalam batas toleransi keamanan dan keselamatan diri pribadi dan pengunjung serta tidak berdampak terhadap lingkungan.

Gambar 48

Ilustrasi Area Sekitar Pantai di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

c) **Seni Pertunjukan**

Ketersediaan fasilitas panggung pertunjukan diharapkan dapat menjadi pemicu pelestarian seni budaya tradisional masyarakat Jeneponto yang berpotensi semakin tergerus oleh perkembangan dan arus global. Untuk itu, pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang direncanakan untuk dilakukan berbagai jenis pertunjukan tradisional sehingga apresiasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap kebudayaannya dapat terus tumbuh, bertahan dan lestari sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Kegiatan seni pertunjukan direncanakan dilakukan pada areal panggung pertunjukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati seni dan budaya tradisional, sanggar seni, serta praktisi dan profesional seni pertunjukan sehingga dapat melahirkan kualitas pertunjukan yang menarik dan menghasilkan bagi masyarakat, termasuk didalamnya seni pertunjukan modern.

Gambar 49

Ilustrasi Area Pertunjukan di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

d) Outbound dan Bermain Keluarga (*Play Ground*)

Kegiatan *outbound* merupakan salah satu aktivitas rutin yang terus berkembang dan menjadi pasar baru yang potensial untuk dilakukan di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Kegiatan ini secara reguler dan berkelanjutan dilakukan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta dan asosiasi industri serta profesi.

Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan jumlah peserta yang bervariasi antara 50 hingga 100 orang dan membutuhkan area terbuka yang cukup memadai dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang cenderung bersifat hiburan bertujuan meningkatkan kekerabatan dan kerjasama tim (*team building*). Kegiatan *outbound* ini biasanya juga dirangkaikan dengan kegiatan pertemuan (*meeting*) sehingga sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan kawasan daya tarik wisata.

Gambar 50
Ilustrasi Area Outbound di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

e) Olah raga

Sebagai kawasan daya tarik wisata rekreasi keluarga dan olah raga pada area perkotaan (*urban area*), maka kawasan daya tarik wisata Pantai tamarunang juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas olah raga seperti lapangan basket, dan tennis. Di sekitar area olah raga ini juga ditanami dengan tanaman penayang serta area *jogging* (*jogging track*) sehingga wisatawan memiliki banyak opsi kegiatan olah raga pada saat berkunjung ke kawasan ini

Gambar 51
Ilustrasi Area Olah Raga di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

f) Kegiatan Pertemuan (*Meeting*)

Kegiatan pertemuan di luar kantor merupakan aktivitas instansi pemerintah dan perusahaan yang semakin sering dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini merupakan strategi instansi pemerintah dan perusahaan yang memiliki fasilitas terbatas di tempat mereka sekaligus biasanya dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti *outbound* sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap produktivitas dan efisiensi instansi dan perusahaan tersebut.

Untuk dapat menangkap potensi pasar tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang, maka pada kawasan ini direncanakan untuk mengembangkan fasilitas *meeting* sebagai bagian terintegrasi dengan kegiatan *outbound* yang akan ditempatkan pada area sekitar area hotel dan di ruang pameran yang diintegrasikan dengan kegiatan MICE pada area panggung hiburan.

g) Berenang

Kegiatan berenang merupakan aktivitas yang paling banyak dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan, kelompok sosial, kelompok usia dan tanpa mengenal waktu. Kegiatan berenang pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang menjadi variatif karena wisatawan dapat memilih untuk berenang di laut, pantai, *waterboom*, atau di kolam renang air tawar yang disiapkan dalam kawasan.

Kolam renang yang direncanakan untuk dikembangkan pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah kolam renang rekreasi untuk hiburan dan kesehatan dengan ukuran untuk anak-anak dan dewasa, dan bukan untuk tujuan kolam renang prestasi. Keberadaan kolam renang pada kawasan daya tarik

wisata Pantai Tamarunang direncanakan dibangun pada area zona inti kawasan .

Gambar 52

Ilustrasi Area Berenang di Kawasan Pantai Tamarunang



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

h) Kegiatan Berfoto

Kegiatan berfoto bagi masyarakat millennial saat ini merupakan salah satu aktivitas wajib, baik oleh para profesional *photographer* maupun yang sekedar hobby apalagi saat berada di kawasan daya tarik wisata. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya baru masyarakat modern dalam eksistensi diri dan mendukung aktivitas pada aktualisasi diri di berbagai sosial media yang dimiliki.

Untuk itu, dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang juga direncanakan dikembangkan area photo spot yang unik dan menarik sebagai ikon Pantai Tamarunang. Hal ini penting dalam menarik minat kunjungan wisatawan, sekaligus menjadi media promosi yang bermanfaat bagi kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dan kabupaten Jeneponto.

Area *photo spot* yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk ber swafoto (*selfie*) atau berfoto bersama teman atau keluarga (*wefie*) adalah pada areal yang secara umum tersedia seperti *landscape* taman, dermaga, area olah raga, hotel dan restoran, gazebo, pinggir pantai, fasilitas yang tersedia ataupun obyek-obyek foto yang akan dibangun secara khusus seperti menara pandang/ foto.

4) Rencana Pengembangan Akomodasi

Akomodasi pariwisata merupakan salah satu fasilitas yang berkontribusi sangat besar terhadap citra dan pendapatan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Akomodasi pariwisata ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam hal beristirahat dan menginap serta kebutuhan makan dan minum.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Saat ini di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang telah terdapat beberapa fasilitas hotel yang dikelola oleh pihak ketiga, untuk itu dalam rencana pengembangan kawasan akan lebih diprioritaskan fasilitas akomodasi selain hotel. Pengembangan dan renovasi fasilitas hotel pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang akan direncanakan terpisah setelah kontrak pengelolaan hotel dengan pihak ketiga berakhir.

Adapun rencana pengembangan fasilitas akomodasi yang direncanakan pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

a) Pusat Kuliner

Pusat jajanan atau plaza kuliner merupakan fasilitas dimana terdapat kegiatan layanan jual beli makanan dan minuman. Satuan dimensi ruang per pengunjung untuk kegiatan makan minum adalah 2 m² per orang termasuk kursi meja dan sirkulasi pengunjung.

Lokasi plaza pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang ditempatkan pada area yang mudah diakses dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas serta tidak menimbulkan tekanan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Selain hal tersebut, pusat jajanan/ kuliner juga dirancang memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar sesuai standar; dan petunjuk arah dan papan nama plaza pusat jajanan/ kuliner dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat.

Rencana lokasi pusat jajanan/ plaza kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamrunang adalah sebagai berikut :

Gambar 53
Ilustrasi Lokasi Pusat Jajanan/ Plaza Kuliner
Pada Area Pantai Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

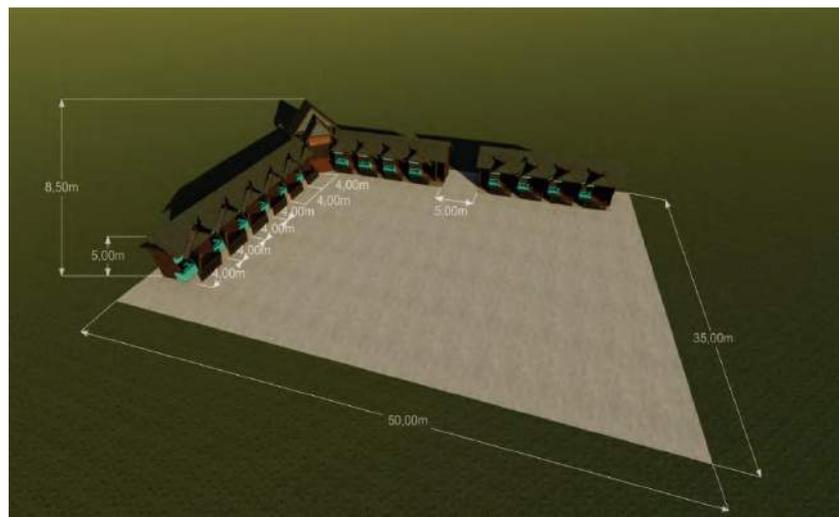
Kriteria dasar pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamrunang adalah untuk konsumsi masyarakat

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

umum; menampilkan kuliner tradisional yang sudah diseleksi; dan minimum 5 (lima) jenis kuliner, maksimum 20 (dua puluh) jenis kuliner dan tidak boleh ada duplikasi sehingga menghindari persaingan tidak sehat.

Infrastruktur untuk mendukung aktivitas pada pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah ketersediaan *loading dock* dan area bongkar muatan (bahan makanan bersih); jalur truk sampah yang tidak boleh digabung dengan jalur bongkar muatan (bahan makanan bersih) agar tidak terkontaminasi bakteri; sumber air bersih panas dan dingin; drainase atau saluran pembuangan air lengkap dengan proses pemeliharaan sebelum dibuang ke saluran kota; drainase/ saluran air hujan dan resapannya harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari genangan air di halaman bangunan; dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Gambar 54
Rencana Pengembangan Pusat Jajanan/ Plaza Kuliner
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Bangunan pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamrunang dirancang dengan ketentuan tiap gerai dengan luas 4 x 5 meter, di dalamnya ada dapur dengan ukuran minimum 2 x 3 meter; kapasitas sentra, maksimal 300 orang; area makan minum; kursi: 300 kursi; meja: 50 – 60 meja; tempat cuci tangan: 12 titik; area cuci piring dengan ukuran sebesar 36 m², dengan 8 titik bak cuci, lengkap dengan meja area pengering, dan rak simpan.

Selain hal tersebut, untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamrunang, maka dilengkapi dengan *hydrant*, sumber air untuk keadaan darurat api; pemadam kebakaran *portable* ditiap gerai, dan di *common area* sesuai hitungan yang berlaku; listrik disetiap gerai 1200 watt; stop kontak

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

atau *power* listrik 3 (tiga) titik ditiap gerai; untuk gerai yang membutuhkan arang atau kegiatan *grill* maka ditempatkan di luar area makan minum, agar asap tidak masuk ; *exhaust fan*, kipas udara untuk sirkulasi; AC untuk ruang *non-smoking*; *ceiling fan*/kipas angin untuk area *smoking*; dan saluran telepon dan data internet, terutama untuk pembayaran non tunai.

b) **Meeting Room**

Untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan pengunjung yang menggunakan fasilitas pada daya tarik wisata Pantai Tamarunang yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata bertema pariwisata perkotaan (*urban tourism*) yang salah satu pasar utamanya adalah pelaksanaan kegiatan *Meeting, Incentives, Conference and Exhibition* (MICE).

Perancangan pusat aktivitas MICE direncanakan berada pada zona inti pada area sekitar panggung hiburan dan ruang pameran. Pembangunan meeting room akan dilakukan dengan mengoptimalkan dan menambah fungsi ruang pameran yang sudah ada pada saat ini. Dengan demikian makan pelaksanaan meeting dan aktivitas MICE lainnya dapat dilakukan secara terintegrasi pada areal yang sama.

Gambaran tentang area terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan MICE dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 55
Rencana Area Terintegrasi Untuk Kegiatan MICE
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

5) Rencana Pengembangan Amenitas

a) Pusat Informasi Pariwisata

Pusat Informasi Wisata merupakan sarana yang menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru (*update*) kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tamarunang dan menjadi tempat mempromosikan daya tarik dan atraksi wisata kabupaten Jeneponto agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan .

Selain itu, Pusat Informasi Wisata juga berfungsi sebagai *travel advice and support*, yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan pariwisata di kabupaten Jeneponto, seperti: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Aktivitas Wisata; dan berperan aktif mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di kabupaten Jeneponto.

Penempatan lokasi bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC di daya tarik wisata Pantai Tamarunang pada area di dalam kawasan daya tarik wisata di bagian depan kawasan sehingga lebih strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai oleh pengunjung. Desain pusat informasi pariwisata/ TIC pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 56
Rencana Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Desain Pusat Informasi Wisata/ TIC Pantai Tamarunang mengikuti panduan sebagai berikut :

- (1) Standar Dimensi Pusat Informasi Wisata/ TIC, luas bangunan tidak lebih dari 80 meter².
- (2) Pengelola terdiri dari manajerial; staf, yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kemampuan berbahasa asing, minimal Bahasa Inggris; dan pramu ruang.
- (3) Sarana dan Prasarana terdiri dari Telepon (*fixed line*); Faks; Internet; Komputer; *Printer*; *Scanner*; Meja; Kursi/ Sofa; Materi Promosi Pariwisata; Peralatan Keamanan; Instalasi listrik; dan

Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Pada bagian *entrance* dan *lobby* yang merupakan area pintu masuk dan ruang tunggu pengunjung memiliki 2 (dua) pintu masuk (*double doors*). Pintu masuk dan *lobby* memiliki ukuran yang cukup luas untuk memberi ruang gerak lebih kepada pengunjung dan mengantisipasi banyaknya jumlah pengunjung yang datang. Desain ruangan dibuat nyaman dengan hiasan yang mencerminkan kearifan lokal, tulisan Selamat Datang (*welcome*); papan rambu arah petunjuk ruangan; dan d) fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Selain itu disediakan pula *Service Desk*, berupa area pelayanan informasi bagi pengunjung dengan kelengkapan sebagai berikut:

- (1) Meja layanan yang menghadap ke arah pintu masuk, sebanyak 2 (dua) buah dengan 1 (satu) buah kursi untuk staf pengelola dan 2 (dua) buah kursi untuk pengunjung;
- (2) Sarana pendukung seperti telepon dan komputer yang terhubung dengan internet.
- (3) Interior ruangan dirancang dengan komposisi warna yang hangat dan netral serta mencerminkan kearifan lokal.

Pada area Informasi, pengunjung dapat mencari informasi melalui brosur dan materi cetak maupun elektronik secara mandiri. Area informasi disatukan dengan ruang tunggu pengunjung, yang dilengkapi dengan:

- (1) Rak untuk memasang dan meletakkan peta, brosur, dan materi promosi cetak yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Dan masing-masing dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk memudahkan pengunjung memperoleh informasi dan mengantisipasi datangnya pengunjung asing;
- (2) Display informasi elektronik, berupa TV ataupun komputer yang dilengkapi dengan petunjuk pemakaian untuk masing-masing unit. Display informasi ini dilengkapi pula dengan materi promosi elektronik (CD dan/atau DVD mengenai atraksi wisata, peta, dan fasilitas wisata seperti hotel, transportasi, dan lain-lain); dan.
- (3) Fasilitas dan akses internet berupa jaringan internet pita lebar berbasis *Asymmetric Digital Subscriber Line* (ADSL) atau 3G.

Pada area *lounge* pengunjung, yang merupakan tempat bagi pengunjung untuk duduk, membaca, dan bersantai, didukung oleh kursi dengan sandaran tangan, bangku, dan/ atau sofa, serta meja. Ruang tamu pengunjung ditempatkan tidak terlalu dekat dengan area yang banyak dilalui orang untuk mempermudah alur pengunjung yang melalui ruangan. Area ini disatukan dengan area informasi.

Kantor administrasi yang merupakan kantor pengelola, dilengkapi dengan fasilitas kantor seperti telepon, meja, kursi, komputer, dan internet. Untuk ruang penyimpanan digunakan sebagai tempat penyimpanan persediaan brosur serta barang lainnya. Toilet dibuat terpisah sesuai jenis kelamin (pria dan wanita) serta pengguna (pengunjung dan pengelola).

Papan Petunjuk Lokasi Pusat Informasi Wisata/TIC, mencantumkan logo “i” (Informasi) disertai tulisan “*Tourist Information Center*” dan Logo Pesona Indonesia/ *Wonderful Indonesia* serta logo kabupaten Jeneponto. Tulisan dibuat dengan huruf jelas dan mudah dibaca. Papan penunjuk lokasi dibuat menggunakan unsur tradisional yang menjadi ciri khas kabupaten Jeneponto dengan lokasi penempatan, menarik, mudah terlihat, dan tidak terhalang apapun.

Arsitektur Desain eksterior dari Pusat Informasi Wisata/TIC menggambarkan lingkungan dan kearifan lokal dengan perpaduan ruang modern dengan desain bangunan yang merefleksikan elemen-elemen arsitektur lokal. Konstruksi Material yang digunakan untuk bangunan Pusat Informasi Wisata/ TIC selaras dengan lingkungan sekitar yaitu menggunakan perpaduan material alami seperti kayu dan batu.

Bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC mudah diakses untuk lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor (mobil, bus atau sepeda motor) dengan dilengkapi jalan akses bagi pejalan kaki dan area parkir serta memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, dengan menyediakan jalan khusus bagi lansia dan pengguna kursi roda.

b) Ruang Ganti/ Toilet

Ruang ganti dan/ atau toilet sangat diperlukan oleh wisatawan untuk mencuci tangan, membasuh wajah, membuang hajat atau untuk berganti pakaian ketika sedang beraktivitas di daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pengelola karena sangat terkait dengan kenyamanan wisatawan. Oleh sebab itu, ketersediaan ruang ganti dan/ atau toilet pada sebuah kawasan pariwisata adalah hal yang mutlak diperlukan. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berakibat pada ketidaknyamanan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata, yang akhirnya juga mempengaruhi tingkat kepuasan.

Adapun wisatawan yang perlu dipenuhi kebutuhannya secara khusus yaitu wisatawan berkebutuhan khusus (memiliki spesifikasi khusus), ibu menyusui dan bayi (ruang menyusui). Selain itu, ruang ganti dan/ atau toilet pengelola dirancang dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan sehingga pengelola memperhatikan desain, pemilihan material bangunan, lokasi, dan cara pemeliharaan fasilitas ruang ganti dan/atau toilet yang optimal.

Konsep dasar dalam pembangunan ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan pariwisata Pantai Tamarunang antara lain: 1) aspek fisik dari ruang ganti dan/atau toilet; 2) aspek kebutuhan wisatawan terhadap ruang ganti dan/ atau toilet; 3) aspek ramah

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

lingkungan dari ruang ganti dan/atau toilet; 4) aspek perencanaan dari ruang ganti dan/ atau toilet; dan 5) aspek pemeliharaan dari ruang ganti dan/ atau toilet.

Dalam rancangan ruang ganti dan/ atau toilet pada kawasan pariwisata Pantai Tamarunang, beberapa prinsip dan kaidah yang dijadikan pertimbangan antara lain:

- 1) Prinsip global mengacu kepada kebutuhan ruang ganti dan/atau toilet yang sesuai dengan standar internasional dan mengacu kepada aspek ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi yang dapat membantu penghematan air (kran sensor).
- 2) Dalam perancangan pembangunan fasilitas ruang ganti dan/ atau toilet memperhatikan aspek gender, dimana jumlah fasilitas yang diperlukan untuk wanita adalah 3 (tiga) kali lebih banyak daripada pria. Hal ini mengacu kepada data bahwa wanita menggunakan toilet 3 (tiga) kali lebih lama daripada pria.
- 3) Prinsip budaya yang disesuaikan dengan budaya Indonesia.

Adapun rencana pembangunan ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 57
Rencana Pengembangan Ruang Ganti/ Toilet
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dalam pembangunan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan Pantai Tamarunang, sangat memperhatikan prinsip higienis karena kerentanan penyebaran penyakit melalui fasilitas ini sangat tinggi. Penyakit yang menyebar melalui udara dapat bertahan

hingga satu jam lamanya. Oleh sebab itu, fasilitas ruang ganti dan/atau toilet harus bersih, sehat, kering, dan higienis.

Fungsi dari ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan Pantai Tamarunang dirancang untuk memenuhi sebagai tempat wisatawan untuk buang air besar; sebagai tempat bagi wisatawan untuk buang air kecil; sebagai tempat bagi wisatawan yang membawa bayi (menyusui, memompa ASI dan mengganti popok bayi); sebagai tempat bagi wisatawan untuk mencuci tangan, membasuh wajah, atau aktivitas lain yang membutuhkan air; dan sebagai tempat untuk mengganti pakaian;

Manfaat dari dari ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan Pantai Tamarunang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan secara psikologis, ketika mereka mengetahui bahwa jika sewaktu-waktu mereka perlu untuk buang air kecil maupun besar maka sudah tersedia toilet yang memadai.

Ruang ganti dan/ atau toilet di Kawasan Pariwisata Pantai Tamarunang dirancang dan dibangun sesuai ketentuan teknis standar, yaitu :

- 1) Besaran ruang luas ruang ganti dan/ atau toilet pada kawasan pariwisata terdiri dari lantai, dinding dan atap.
 - a) Lantai tahan terhadap gesekan, tidak licin, tidak menyerap air, dan mudah dibersihkan.
 - b) Dinding pembatas antara ruang toilet satu dengan lainnya tahan air dan menggantung 20 cm dari atas lantai.
 - c) Atap terletak pada posisi ketinggian dinding dengan penentuan besaran minimal yang menutupi luasan ruang.
- 2) Sirkulasi Udara Sirkulasi udara yang baik sangat diperlukan pada area ruang ganti dan/ atau toilet. Ruang toilet yang basah mempunyai kelembaban yang sangat tinggi mencapai 40–50%, karena itu sirkulasi udara yang baik dibutuhkan untuk mengatasi kelembaban tersebut. Untuk mengatasi kelembaban tersebut, beberapa alternatif yang digunakan antara lain dengan menggunakan *exhaust fan* atau kipas pengering di atas *washtafel* yang dapat membantu proses pengeringan lantai di sekitarnya. Sirkulasi udara sangat penting untuk menjaga udara ruang ganti dan/atau toilet bebas dari bau, jamur dan bakteri serta zat kimia berbahaya lainnya.
- 3) Pencahayaan Standar pencahayaan pada ruang ganti dan/atau toilet adalah 200 lumen (TOTO). Pencahayaan dilakukan dengan memanfaatkan pencahayaan buatan maupun pencahayaan alami. Pencahayaan alami yang baik, selain dapat menghemat energi juga dapat memberikan kesan positif, sedangkan pencahayaan yang buruk akan memberikan kesan kusam, gelap, dan kotor pada ruang ganti dan/atau toilet.
- 4) Pintu yang digunakan menggunakan material tahan air seperti bahan fiber yang dilaminasi dengan bahan tahan air maupun terbuat dari aluminium.

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

- 5) Bentuk langit-langit atau plafon berupa datar atau mengikuti kemiringan atap dan tahan air agar tidak terjadi kebocoran saat hujan.
- 6) Fasilitas *washtafel* di area ruang ganti dan/ atau toilet menyediakan sabun cair, cermin, dan kran air yang digunakan pada ruang ganti dan/ atau toilet adalah kran otomatis (kran sensor) yang hemat air atau kran dengan menggunakan tuas putar (*lever handle*).

Ruang Ganti dan/ atau toilet di kawasan pariwisata Pantai Tamarunang dibangun sesuai pedoman Kementerian Pariwisata tentang fasilitas yang harus disediakan pada ruang ganti dan/atau toilet umum yang akan dibangun, yaitu :

Tabel 13
Ketersediaan Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet

No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
1	Kloset (WC)	Duduk
2	Urinoir	Ada
No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
3	Washtafel	Ada
4	<i>Handicap</i>	Dua untuk Pria dan Wanita
5	<i>Toilet Paper</i>	Ada
6	<i>Jetspray/ Washlet</i>	Disamakan
7	Pengering Tangan/ <i>Tissue</i>	Ada
8	Cermin	Ada
9	Gayung dan Tempat Air	Ada
10	Tempat Sampah	Ada
11	Saluran Pembuangan	Ada
12	Penjaga Toilet	Ada
13	<i>Janitor</i>	Ada

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selain pemenuhan terhadap standar tersebut di atas, ukuran standar juga menjadi hal yang perlu dipenuhi agar kebutuhan dan kenyamanan wisatawan dalam menggunakan ruang ganti dan/atau toilet menjadi maksimal. Berikut tabel standar ukuran fasilitas pada ruang ganti dan/atau toilet

Tabel 14
Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet

No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
1	Pintu Masuk Utama	110-120 cm
2	Kubikal	90 x 150 cm
No	Fasilitas	Standar Rekomendasi

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

3	Jarak antara Pintu dengan Tempat Duduk Toilet	60 cm
4	Jarak Dinding Urinal	80 cm
5	Pintu Toilet untuk orang berkebutuhan khusus	120 cm
6	Sirkulasi untuk orang berkebutuhan khusus	180 cm
7	Sirkulasi jarak antara kubikal ke dinding	120 cm
8	Sirkulasi jarak antara kubikal dengan washtafel	140 cm
9	Daya Tampung dan luasan lantai	4,3 m dari luas lantai

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selain fasilitas regular standar, wisatawan berkebutuhan khusus juga harus menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan pariwisata. Berikut standar ukuran fasilitas ruang ganti dan/atau toilet bagi wisatawan berkebutuhan khusus.

Tabel 15
Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet Bagi
Wisatawan Berkebutuhan Khusus

No	Fasilitas	Ukuran
Ukuran Toilet :		
1	Ukuran Ruangan	Minimal 167 x 185 cm
2	Ukuran Pintu	Lebar 81 cm
3	Ruang Bebas Bergerak	122 x 142 cm
4	Penerangan	Minimal 200 lumen
No	Fasilitas	Ukuran
5	Pintu	Pintu geser
Washtafel :		
1	Ketinggian Washtafel	76 cm
2	Ketinggian kran	86 cm
3	Ruang Bebas Bergerak	120 cm
Ruang Urinal :		

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

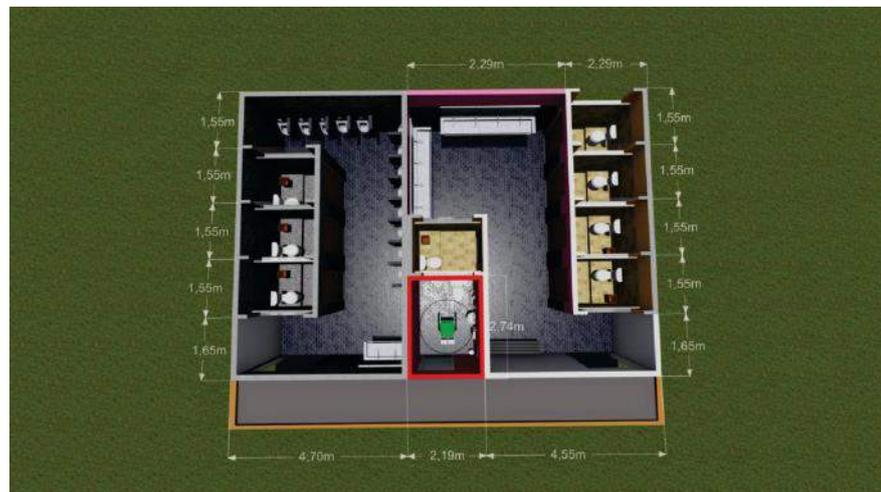
1	Tinggi Urinal	Dewasa maksimal 43 cm, Anak maksimal 35,6 cm. Setiap ruangan urinal harus menyediakan <i>handrail</i> untuk membantu pemakai
2	Lain-lain : a. Tersedia tempat sampah untuk pembalut, tissue toilet dan sabun. b. Tombol alarm disamping toilet c. Lantai dan rata tidak licin	

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Setiap fasilitas ruang ganti dan/atau toilet harus menggunakan desain yang mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dengan menyesuaikan kondisi daerah dan kearifan lokal.

Penempatan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang tidak mengganggu bangunan disekitarnya dan mudah terlihat. Selain itu, ruang ganti dan/atau toilet dihiasi dengan tanaman yang menambah nilai estetika serta mengikuti pedoman konstruksi sesuai dengan standar toilet umum Indonesia (kering itu sehat).

Gambar 58
Rencana Desain Ruang Ganti/ Toilet
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Standar teknis ruang ganti dan/atau toilet pada daya tarik wisata Pantai Tamarunang dibagi menjadi :

- 1) Kemiringan minimum lantai 1% dari panjang atau lebar lantai. Bahan pelapis lantai terbuat dari ubin keramik, semen plester/ acian/ batu alam yang kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Jenis lapisan lantai alternatif dapat menggunakan jenis vinyl.

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

- 2) Dinding dengan warna terang untuk memudahkan mengontrol kebersihan ruang ganti dan/ atau toilet. Ubin keramik dijadikan pilihan untuk melapisi dinding yang terbuat dari gypsum tahan air atau batu bata yang telah diberi lapisan tahan air atau dinding dengan bahan batako yang dilapisi cat tahan air.
- 3) Langit-langit atau plafon terbuat dari bahan yang cukup kaku dan rangka yang kuat, sehingga memudahkan dalam perawatan dan tidak mudah kotor.
- 4) Kloset maupun sanitari memiliki bentuk leher angsa untuk menghindari bau yang tidak sedap. Sanitari berwarna putih yang dapat membantu mendeteksi kotoran seperti air seni atau tinja.
- 5) Pintu dan jendela ventilasi pada ruang ganti/toilet terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, agar ringan, tidak lapuk dan mudah dibersihkan. Untuk daun pintu kloset memiliki kunci yang dapat dikunci dari dalam. Daun pintu terpasang disebelah kanan dan membuka kearah dalam agar menghindari benturan dengan aktifitas di luar ruangan dan menyediakan gantungan pakaian atau tas yang diletakkan pada sisi dalam pintu.
- 6) Lampu diletakkan pada posisi strategis seperti di dekat cermin sehingga tidak menyilaukan.
- 7) Pipa saluran air (*plumbing*) terdiri dari pemipaan air bersih, pemipaan air kotor, dan air kotor padat.
- 8) Estetika dibuat dengan berbagai variasi sesuai dengan fungsinya dan tidak terikat oleh bangunan disekitarnya yaitu bentuk bangunan, elemen-elemen bangunan dalam ruang ganti yang dapat dirancang adalah bidang dinding dan atap.
- 9) Penggunaan warna-warna mencolok, eksentrik maupun lembut akan membuat kesan yang berbeda.
- 10) Asesoris bangunan yang digunakan berupa konsol atap, bingkai-bingkai pintu dan menggunakan bahan-bahan alami, tradisional maupun modern.

Tata ruang dan bangunan rancangan lansekap sangat menentukan kualitas keindahan, dan kenyamanan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang, yang mampu dirasakan oleh wisatawan dan dapat meningkatkan citra kawasan. Lansekap ruang ganti dan/atau toilet dirancang memenuhi kriteria :

- 1) Tidak merusak keindahan lingkungan;
- 2) Mudah diketahui dan dicapai keberadaannya;
- 3) Memberikan kenyamanan dan perasaan aman;
- 4) Keadaan sekitar ruang ganti dan/atau toilet tertata indah, asri, bersih dan nyaman; dan
- 5) Mudah dalam proses pemeliharaan kebersihan.

Penataan lansekap di sekitar ruang ganti dan/atau toilet dengan bentuk fisik yang disarankan adalah:

- 1) Tidak menanam pohon yang rindang dengan jarak yang dekat untuk membantu mengurangi kelembaban di dalam ruang ganti dan/atau toilet;

- 2) Menanam tanaman pohon semak dan rumput yang ditata untuk memberikan kesan asri pada ruang ganti dan/atau toilet; dan
- 3) Memiliki ruang luar yang terbuka yang bertujuan memberikan sirkulasi udara yang baik

c) Menara Pandang/ Menara Pantau

Menara pandang merupakan struktur bangunan tinggi yang berfungsi untuk melihat area dengan cakupan yang luas. Menara pandang yang direncanakan untuk dibangun pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah *Observation tower*, yaitu menara pandang yang digunakan sebagai pos penjagaan atau pos observasi untuk melihat keseluruhan area. Menara pandang ini merupakan fasilitas untuk mengamati gejala alam yang berbahaya bagi keselamatan wisatawan seperti ombak dan angin sekaligus mengamati wisatawan yang sedang beraktivitas di laut pada area bagian dalam *waterbreak/* talud dan membutuhkan bantuan atau pertolongan.

Manfaat menara pandang di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai pos penjagaan untuk menjaga keselamatan wisatawan, dan sebagai fasilitas penunjang aktivitas wisatawan untuk menikmati kawasan dalam *birdview*.

Sedangkan fungsi dari menara pandang adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan, menciptakan pengalaman lebih kepada pengunjung dengan adanya aktivitas *sightseeing* yang dapat diberikan di menara pandang tanpa mengganggu kehidupan di sekitarnya.

Beberapa bentuk pengembangan menara pandang dengan desain yang lebih artistik tetapi tetap memperhatikan fungsi dari menara pandang. Secara umum, dalam pembangunan dan pengelolaan menara pandang adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tinggi bangunan minimal 3 m dengan luas bangunan minimal 20 m².
- 2) Berupa bangunan semi permanen dengan fondasi.
- 3) Memiliki alat komunikasi.
- 4) Dilengkapi dengan beberapa peralatan tambahan seperti teropong pandang, pengeras suara dll.

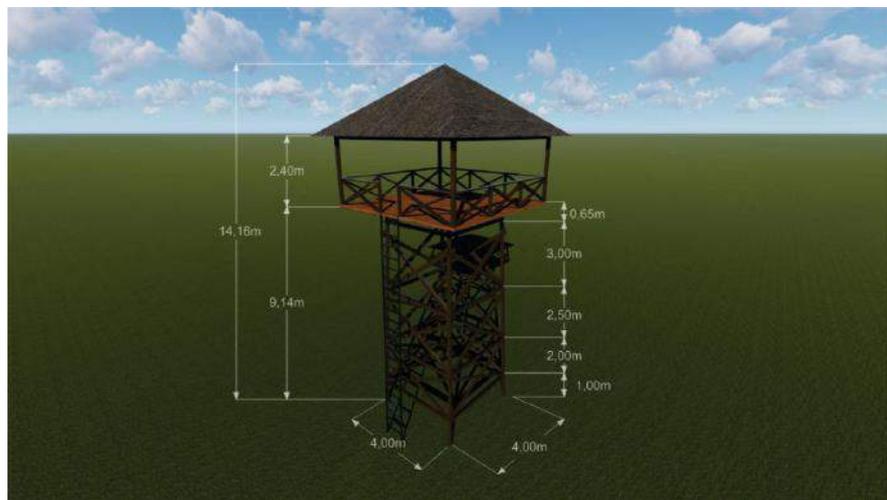
Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembangunan menara pandang di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dengan tata cara perencanaan pembangunan menara pandang terkait dengan faktor *the client and the program* yang terkait dengan aspek kuantitatif pembangunan, yaitu: ukuran, tinggi, daya dukung, akses tangga, material yang digunakan, anggaran atau dana yang tersedia, penempatan (hubungan dengan ruang terbuka, bangunan lain dan lahan parkir), tujuan (keagamaan, pendidikan, kepentingan umum), desain interior yang diusulkan, dan waktu penggunaan.

Beberapa hal juga diperhatikan dalam perencanaan pembangunan menara pandang dengan mengadaptasi bangunan

menara yaitu perencanaan dimensi diperhitungkan secara akurat untuk menentukan persyaratan minimum ruang dan ruang untuk instalasi serta pemeliharaan. Selanjutnya penentuan tipe konstruksi untuk menentukan kapasitas daya tampung dengan memperhitungkan tebal dinding, ukuran struktur, tebal lantai dan lainnya yang bisa dianalisis untuk struktur kapasitas menara.

Adapun gambaran rencana pengembangan menara pandang/ menara pantau di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 59
Rencana Desain Menara Pandang/ Menara Pantau
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Pertimbangan lebih lanjut adalah memperkirakan jumlah tingkatan menara yang disesuaikan dengan tinggi menara. Tangga akses menara juga disesuaikan dengan jumlah tingkatan dan tinggi menara. Pencahayaan terdapat di tangga akses dan di ruangan, begitu pula dengan ventilasi dan pengatur suhu ruangan.

Menurut *International Code Building* (ICB) 2007, menara pandang merupakan bangunan dengan klasifikasi kepemilikan dan kegunaan bangunan dengan fungsi tertentu atau bangunan lain. Sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada, dalam pembangunan menara pandang harus memiliki daftar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengikuti kaidah pembangunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di kabupaten Jeneponto.

d) Souvenir/ Gift Shop

Cenderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh wisatawan ke tempat tinggalnya sebagai oleh-oleh, *souvenir*, tanda mata, atau kenang-kenangan. Kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang memiliki ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan destinasi wisata lainnya dan menunjukkan identitas dari destinasi wisata tersebut. Selain menyediakan cinderemata khas Pantai

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

Tamarunang, daya tarik wisata ini juga menyediakan cinderamata khas kabupaten Jeneponto dan provinsi Sulawesi Selatan.

Pertimbangan yang dijadikan dalam dalam perancangan souvenir/ gift shop pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah :

- 1) Mudah diakses ;
- 2) Luas ruangan sesuai kebutuhan jenis *souvenir*;
- 3) Bentuk rak adalah rak *single wall minimarket* dan rak *double* dengan ukuran panjang papan antara 30 cm – 40 cm;
- 4) Jenis bahan ideal untuk *souvenir* adalah besi dengan ketebalan plat antara 0.5 mm – 0.6 mm dan mampu menahan berat barang sebesar 30 kg – 50 kg;
- 5) Pintu menghadap ke ruang kosong, tidak boleh ada lemari, tirai atau furnitur yang menghalangi pengunjung masuk;
- 6) Panjang lemari dan meja dalam kios harus sesuai dengan sudut letak lemari;
- 7) Tidak menempatkan lemari dan meja pada sisi tajam yang mengarah ke pintu masuk;
- 8) Memiliki sistem sirkulasi udara atau *air conditioner* (ac) dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar harus sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Petunjuk arah dan papan nama kios cinderamata memiliki tulisan yang terbaca dengan jelas dan mudah terlihat.

Design produk yang dipasarkan pada *souvenir/ gift shop* di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sesuai unsur keunikan, merepresentasikan tempat wisata, dan kekhasan budaya atau kearifan lokal masyarakat kabupaten Jeneponto dan dilengkapi dengan tempat sampah tertutup yang terdiri atas: tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik; instalasi listrik/ genset; akses khusus darurat dan tempat berkumpul; dan instalasi kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik.

Adapun rencana pengembangan pusat penjualan cinderamata (*souvenir/ gift shop*) pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 60
Rencana Pengembangan Pusat Penjualan Cenderamata
Pada Obyek Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

e) Tempat Parkir

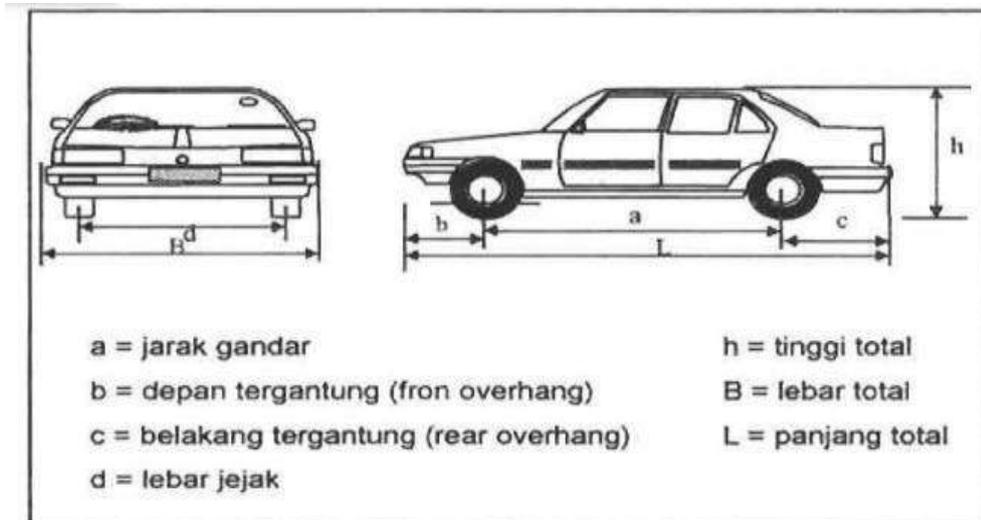
Tempat parkir merupakan fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap minat berkunjung wisatawan karena selain berhubungan dengan kemudahan akses, pengaturan parkir yang baik, aman dan nyaman juga akan menimbulkan kesan yang baik termasuk dalam hal keamanan dan keselamatan kendaraan dan barang-barang pengunjung yang di simpan di dalam kendaraan pada area parkir. Dengan pengaturan dan pengelolaan area parkir yang baik, juga akan memberikan potensi pemasukan bagi pengelola kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang.

Kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam merancang tempat atau pelataran parkir adalah Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD); keselamatan dan kelancaran lalu lintas; kelestarian lingkungan; kemudahan bagi pengguna jasa; tersedianya tata guna lahan; dan letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

Satuan Ruang Parkir (SRP) digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Untuk menentukan SRP pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan sebagaiberikut :

- 1) Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang

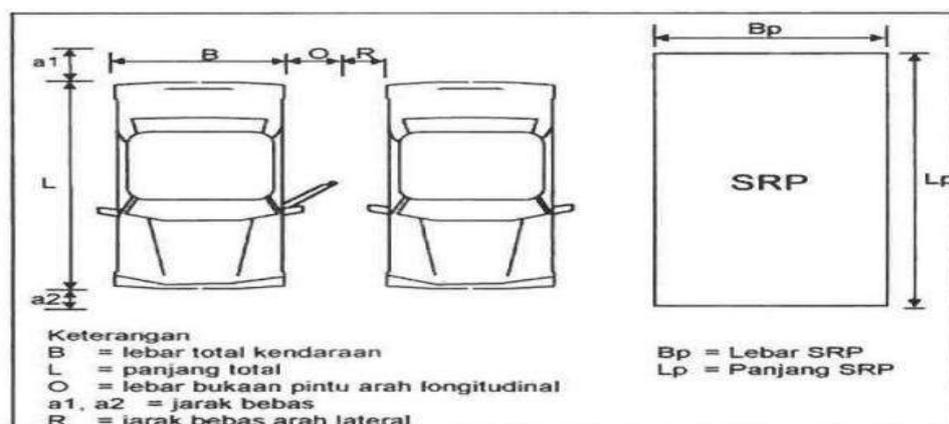
Gambar 61
Ilustrasi Dimensi Kendaraan Standar
Untuk Mobil Penumpang



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan *longitudinal* kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada posisis pintu kendaran terbuka, yang diukur dari ujung paling luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (*aisle*). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.
- 3) Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Gambar 62
Ilustrasi SRP Untuk Mobil Penumpang (dalam cm)

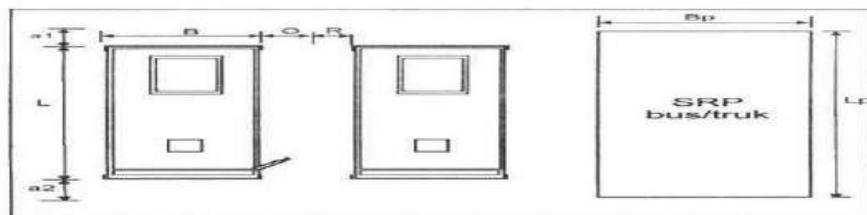


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Penentuan SRP untuk kendaraan penumpang dibagi tiga jenis antara lain:

- 1) Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang
- 2) Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk bus atau truk besarnya dipengaruhi oleh besarnya kendaraan yang akan parkir, baik ukuran kecil, sedang, ataupun besar.

Gambar 63
Ilustrasi Konsep Sebagai Acuan Penetapan SRP



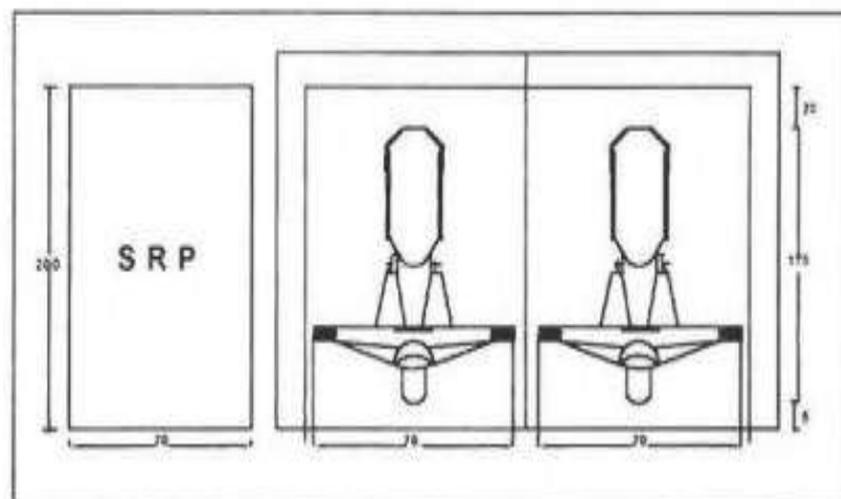
Gambar: SRP untuk Bus/Truk (dalam cm)

<p>Gol I : B = 170 O = 55 R = 5</p> <p>Gol II : B = 170 O = 75 R = 5</p> <p>Gol III : B = 170 O = 80 R = 50</p>	<p>a1 = 10 L = 470 a2 = 20</p> <p>a1 = 10 L = 470 a2 = 20</p> <p>a1 = 10 L = 470 a2 = 20</p>	<p>$B_p = 230 = B + O + R$ $L_p = 500 = L + a1 + a2$</p> <p>$B_p = 250 = B + O + R$ $L_p = 500 = L + a1 + a2$</p> <p>$B_p = 300 = B + O + R$ $L_p = 500 = L + a1 + a2$</p>
--	--	--

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk sepeda motor ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 64
Ilustrasi SRP Untuk Sepeda Motor

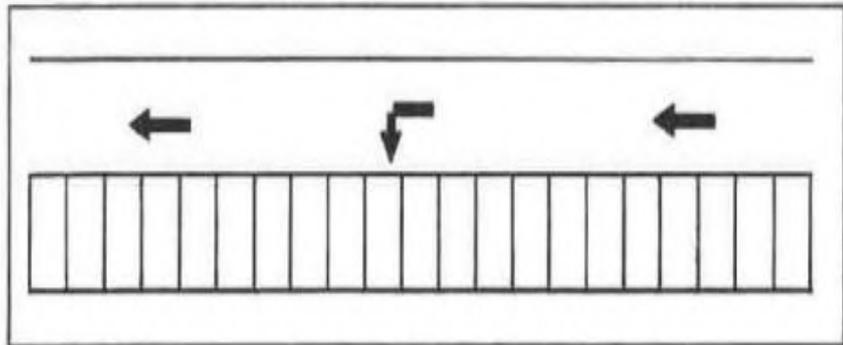


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Terdapat beberapa pola parkir mobil penumpang, antara lain :

- 1) Parkir kendaraan satu sisi, pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit di suatu tempat kegiatan.
 - a) Membentuk sudut 90° , pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90° .

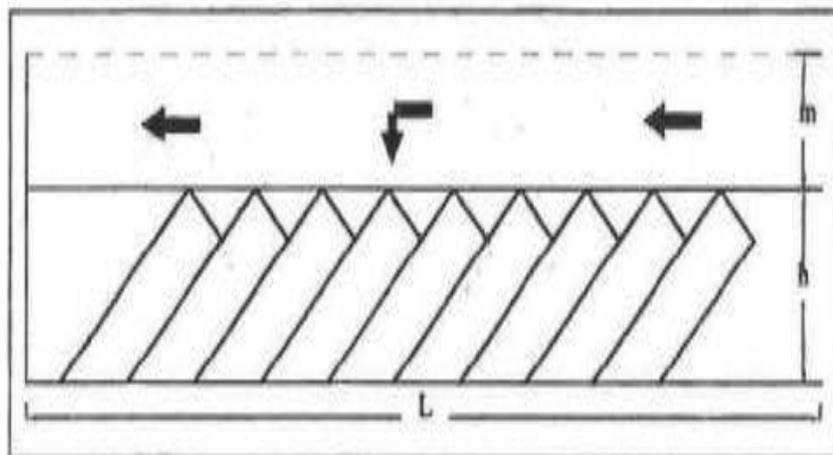
Gambar 65
Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Membentuk sudut 30° , 45° , 60° , pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan, dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90° .

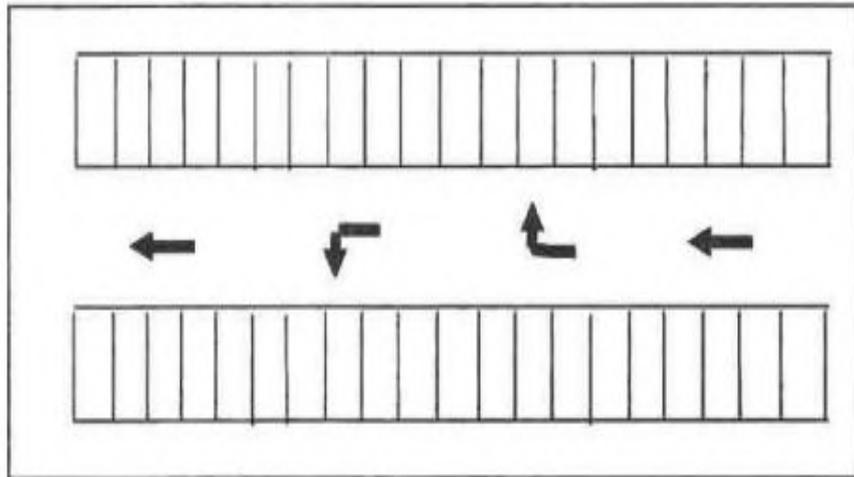
Gambar 66
Ilustrasi Pola Parkir Sudut



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Parkir kendaraan dua sisi, pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.
 - a) Membentuk sudut 90° , pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.

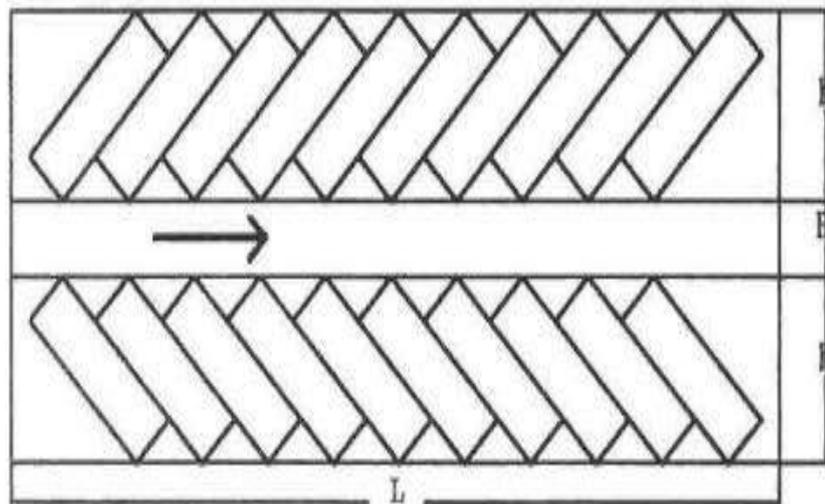
Gambar 67
Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus Yang Berhadapan



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Membentuk sudut 30° , 45° , 60°

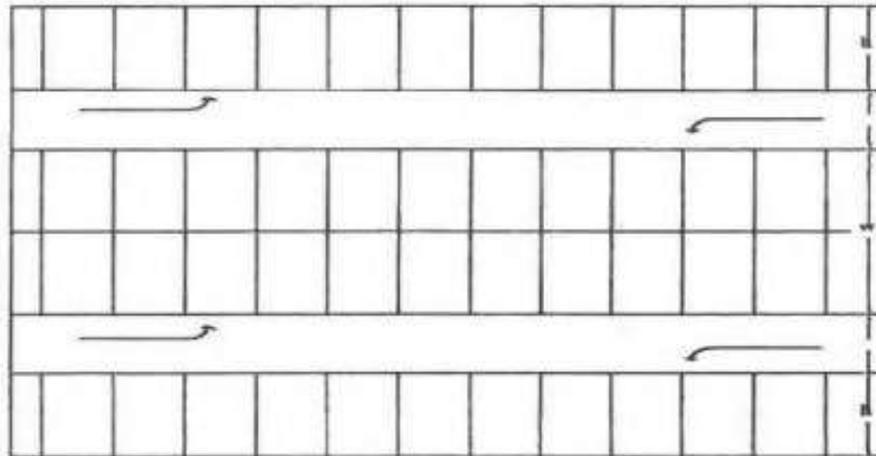
Gambar 68
Ilustrasi Pola Parkir Sudut Yang Berhadapan



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) Pola Parkir Pulau, diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas
 - a) Membentuk sudut 90° :

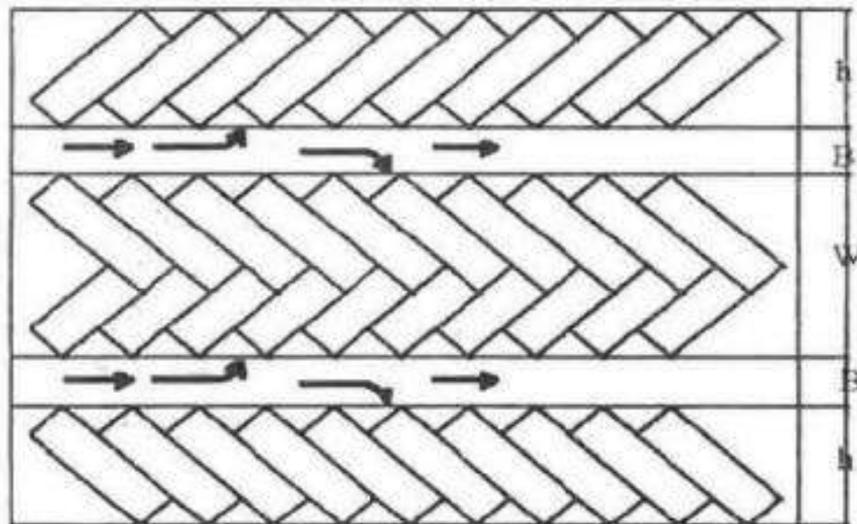
Gambar 69
Ilustrasi Taman Parkir Tegak Lurus Dengan Dua Gang



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

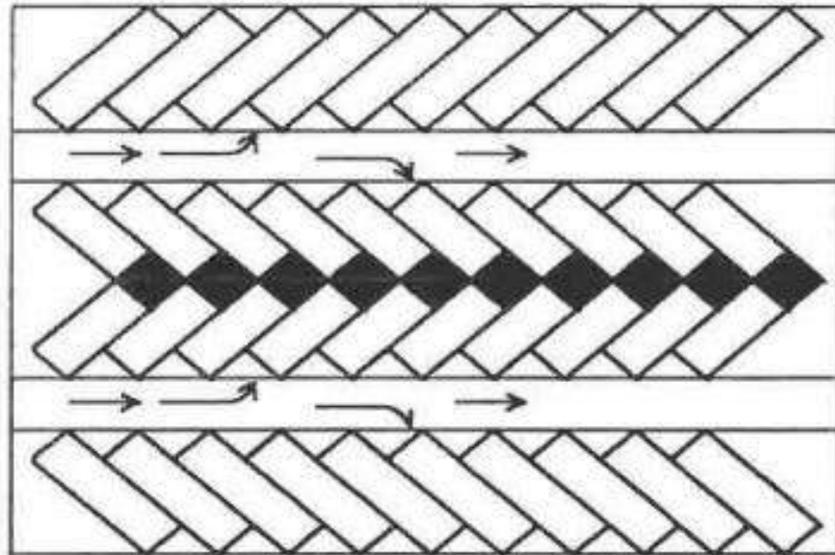
- b) Membentuk sudut 45° :

Gambar 70
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe A



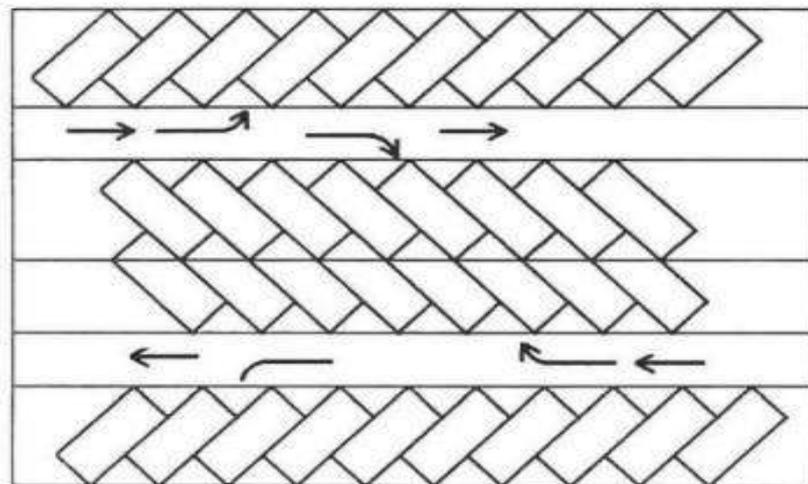
Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Gambar 71
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe B



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

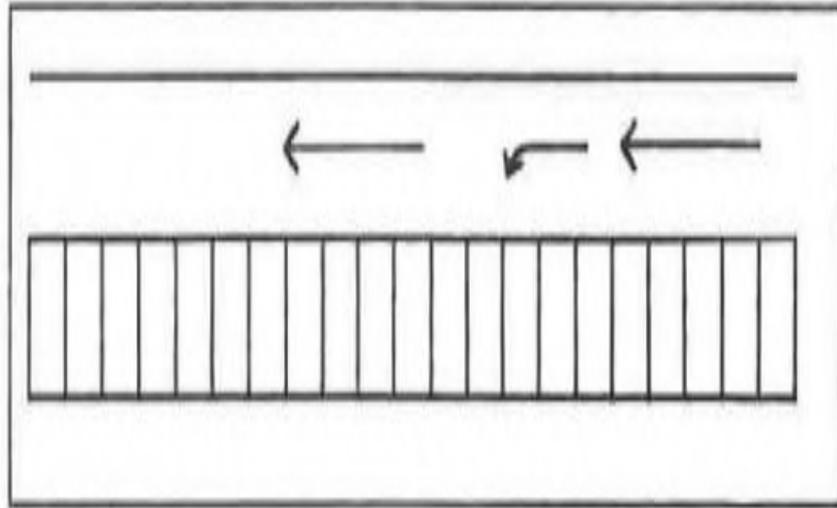
Gambar 72
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe C



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) Pola Parkir Bus/Truk, posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60° ataupun 90° tergantung dari luas areal parkir. Dari segi efektivitas ruang, posisi sudut 90° lebih menguntungkan.
 - a) Pola Parkir Satu Sisi

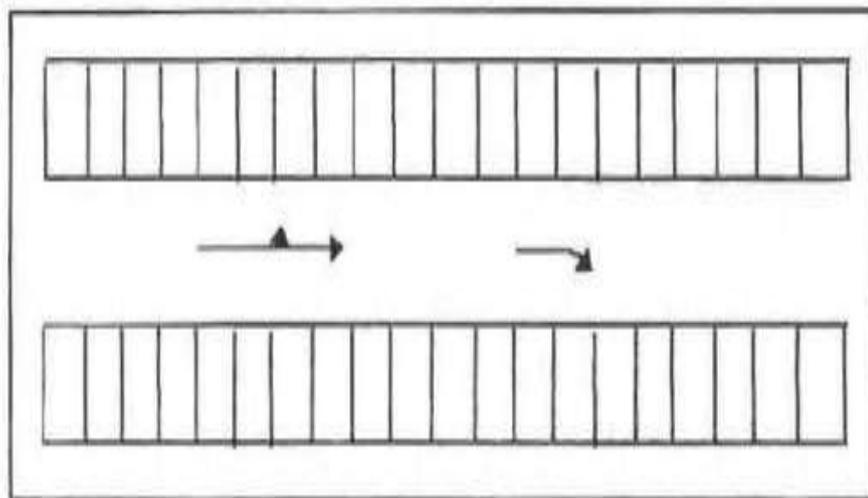
Gambar 73
Ilustrasi Pola Parkir Satu Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

b) Pola Parkir Dua Sisi

Gambar 74
Ilustrasi Pola Parkir Dua Sisi

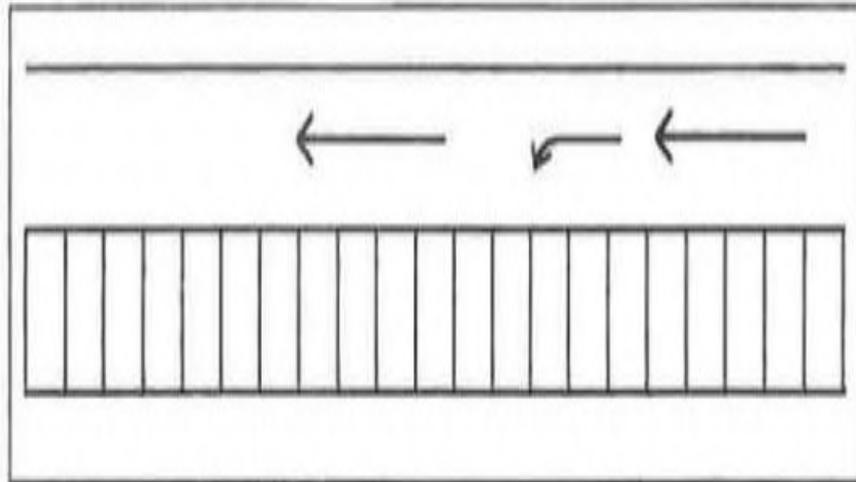


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

5) Pola Parkir Sepeda Motor, pada umumnya posisi kendaraan adalah 90° . Dari segi efektivitas ruang, posisi sudut 90° paling menguntungkan.

a) Pola Parkir Satu Sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit.

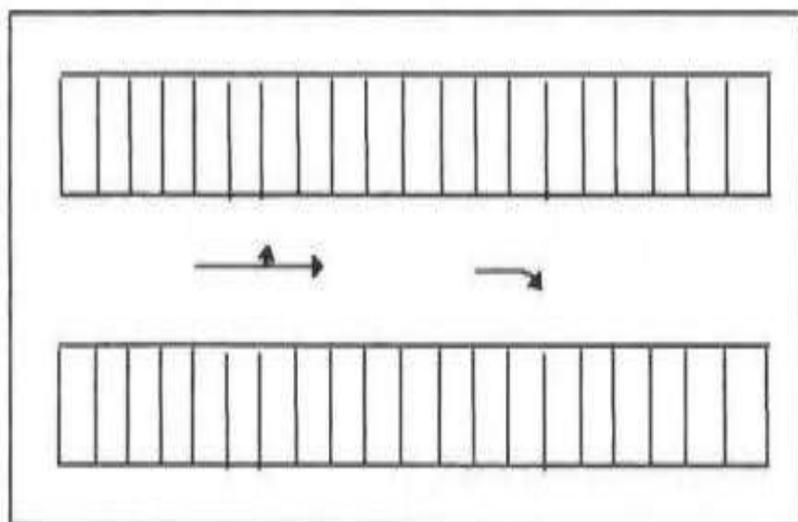
Gambar 75
Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Satu Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Pola Parkir Dua Sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas > 5,6 meter).

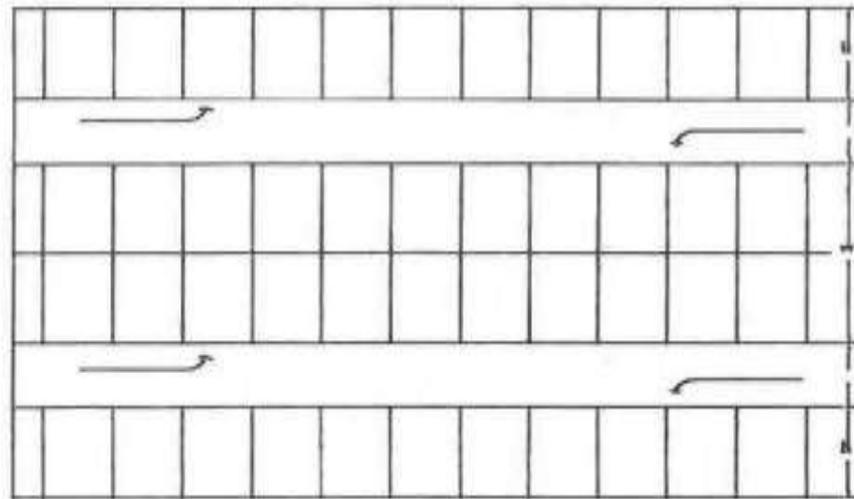
Gambar 76
Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Dua Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- c) Pola Parkir Pulau, Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.

Gambar 77
Ilustrasi Parkir Sepeda Motor Pola Pulau



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Adapun ilustrasi rancangan tempat parkir pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

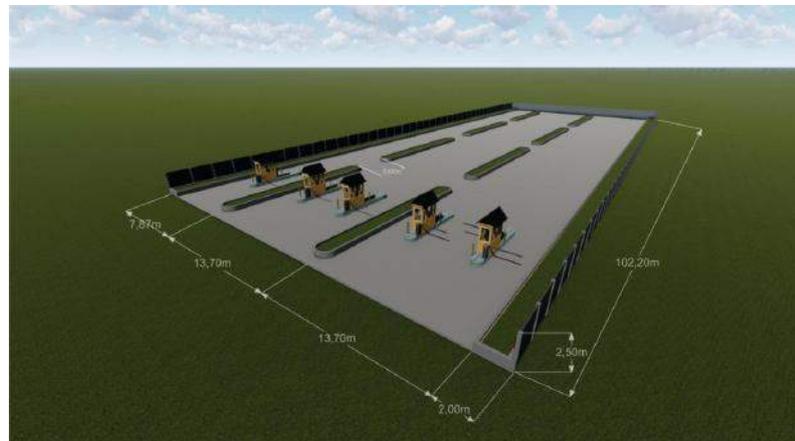
Gambar 78
Ilustrasi Tempat Parkir
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

Detail rancangan tempat parkir pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 79
Detail Rancangan Tempat Parkir
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



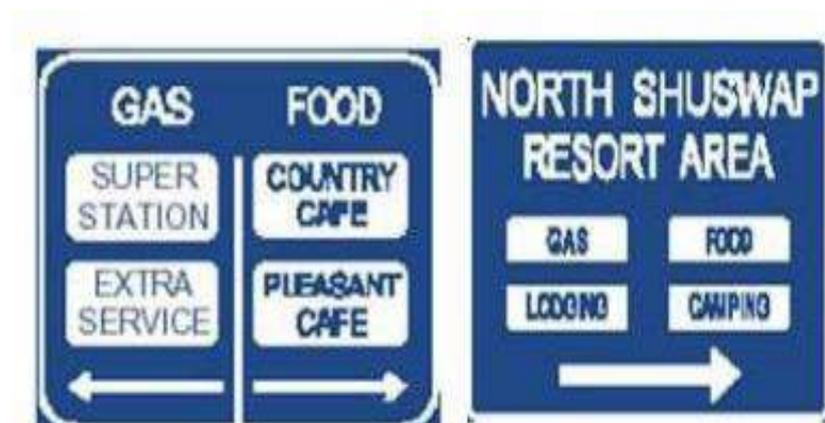
Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

f) **Signage**

Instrumen internasional rambu-rambu petunjuk arah yang ditetapkan secara internasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Rambu Panduan dan Informasi, merupakan jenis tanda yang umum dipergunakan, seperti rambu lalu lintas di jalan raya sebagai panduan menuju suatu tujuan. Pada umumnya, standar warna yang digunakan adalah berlatar belakang hijau dengan tulisan berwarna putih (dipergunakan di Inggris), sedangkan di Indonesia, menggunakan latar belakang berwarna putih dengan tulisan berwarna merah.

Gambar 80
Ilustrasi Contoh Rambu Panduan Informasi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Rambu Atraksi dan Layanan Pariwisata, dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait arah dan daya tarik wisata di destinasi pariwisata. Selain itu, rambu ini juga digunakan untuk mengidentifikasi fasilitas pariwisata yang tersedia di destinasi

pariwisata dengan dilengkapi nama perusahaan penyedia, arah, sekaligus jarak yang harus ditempuh. Fungsi dari rambu atraksi dan layanan pariwisata ini antara lain: 1) menunjukkan lokasi dan arah; 2) menunjukkan pesan sekaligus memberikan opsi terhadap atraksi dan layanan pariwisata; dan 3) mengarahkan wisatawan mulai dari jalan raya sampai menuju destinasi pariwisata.

Gambar 81
Ilustrasi Contoh Rambu Atraksi Layanan Pariwisata



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) *Tourism Orientation Directional Sign* (TODS), merupakan ramburambu yang berisi petunjuk layanan kepariwisataan. TODS tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, misalnya TODS yang khusus berfungsi untuk menunjukkan arah harus disertai dengan informasi yang lengkap terkait jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sedangkan TODS yang lainnya mencakup informasi mengenai tanda-tanda yang diakui secara nasional. Pada umumnya, rambu-rambu dibuat dengan latar belakang berwarna biru dan tulisan berwarna putih, kecuali tanda untuk rumah sakit dan bandara yang berlatar belakang hijau. Rambujenis TODS ini biasanya hanya digunakan untuk menunjukkan arah dan jarak serta tidak diperuntukkan bagi sarana promosi pelayanan maupun atraksi wisata.

Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe utama adalah :

- Huruf (Utama) : 200 mm
- Huruf (Arah) : 150 mm
- Garis Pinggir : 15 mm dari ujung
- Warna : Tulisan – putih
- Garis Pinggir : Putih
- Latar Balakang : Coklat
- Bahan : *Aluminum Panels*
- Tampilan: *Type III High Intensity Retro-Reflective Sheeting*

Gambar 82
Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe Utama



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selanjutnya untuk Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe B (*regular sign*) adalah :

- Tulisan : 150 mm *Series D* – Putih
- Latar Belakang : Coklat
- Garis Pinggir luar : 15 mm *edge* – Putih
- Garis Dalam : 10 mm *line* – Putih
- Ukuran Simbol : 600 mm x 600 mm
- Bahan : *Panel Alumunium*

Gambar 83
Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe B (Regular Sign)



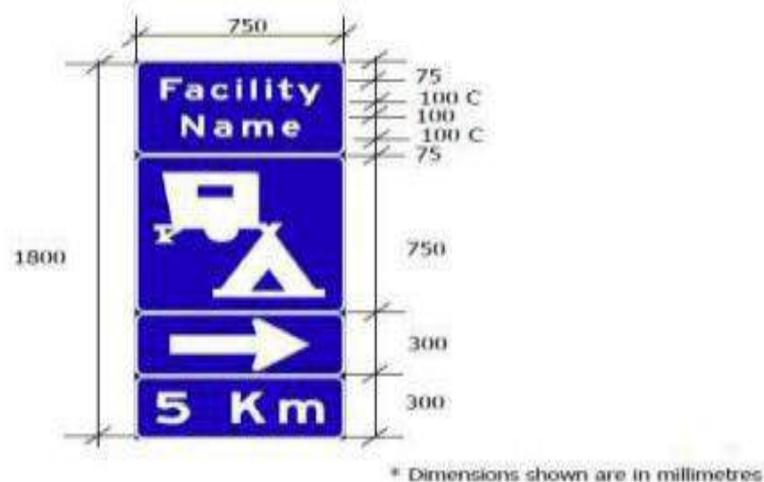
Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Untuk Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe C (*Blazer*) adalah :

- Tulisan Utama : 200 mm *Series D* – Putih
- Tulisan Pendukung : 150 mm *Series D* – Putih
- Garis Horisontal : Ketebalan 10 mm
- Latar Belakang : Coklat

- e) Garis Pinggir : 38 mm *edge* – Putih
- f) Sudut : 25 mm radius
- g) Bahan : Aluminium

Gambar 84
Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe C (Blazer)



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) Rambu-Rambu Berlogo, berfungsi untuk menunjukkan arah terhadap layanan penting seperti gas, tempat makan dan minum, serta penginapan yang tersedia di sepanjang jalan maupun di dalam destinasi pariwisata. Yang membedakan rambu ini dengan TODS adalah bahwa rambu-rambu ini dilengkapi dengan nama/ logo/ simbol penyedia layanan tersebut.
- 5) Rambu Interpretasi, pada umumnya ditempatkan pada taman-taman alam, di jalan atau pada situs-situs sejarah budaya maupun alam. Fungsi utama rambu ini adalah sebagai sarana pendidik dan komunikasi interaktif kepada wisatawan terkait dengan lokasi wisata yang dikunjungi.

Menurut jenisnya, rambu ini terbagi menjadi *Interpretative signs* dan *wayside exhibits*, dimana *wayside exhibits* merupakan rambu kombinasi antara kata-kata dengan gambar dalam dua dimensi.

Standar internasional dan kebijakan pembangunan rambu-rambu penunjuk arah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan rambu penunjuk arah pada konteks kepariwisataan harus memiliki bentuk maupun format yang berbeda dari rambu lalu lintas pada umumnya. Rambu tersebut harus memiliki format yang konsisten yang ditetapkan secara resmi. Secara idealnya, rambu-rambu ini tidak berbahasa namun menggunakan simbol yang standar dan mudah dikenali oleh semua wisatawan;
- 2) Rambu harus meliputi semua fasilitas wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan, termasuk didalamnya rambu keberadaan

- bandara, pelabuhan, fasilitas informasi, atraksi dan aktivitas rekreasi, akomodasi dan lain-lain;
- 3) Fasilitas yang harus ditempatkan pada rambu-rambu tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti jenis fasilitas, kapasitas, kualitas, waktu operasional, dll. Jenis aksesibilitas akan membedakan jenis rambu, sebagai contoh pada jalan utama hanya fasilitas utama yang akan diinformasikan;
 - 4) Skema arahan yang ditunjukkan di rambu-rambu penunjuk harus mudah diikuti dan dimengerti oleh wisatawan;
 - 5) Autorisasi pengelolaan rambu-rambu penunjuk arah akan berbeda dari di setiap negara/ wilayah/ destinasi pariwisata. Pengelola perhubungan, pada umumnya merupakan pengelola rambu-rambu penunjuk arah. Dalam hal ini pengelola perhubungan diharapkan dapat berkordinasi dan bekerjasama dalam menetapkan kebutuhan maupun pengelolaan terhadap rambu-rambu penunjuk arah pada destinasi pariwisata;
 - 6) Skema pengelolaan dapat merupakan bagian dari perhubungan atau secara mandiri, dimana pengelola fasilitas atau atraksi wisata dapat membiayai terhadap pembuatan, pemasangan dan pengelolaan rambu-rambu penunjuk arah pada destinasi pariwisata.

Standar maupun kebijakan terkait dengan pemasangan rambu-rambu penunjuk arah sebagai berikut:

- 1) Warna dan bentuk dari rambu-rambu harus konsisten untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan;
- 2) Ukuran legenda harus optimal agar mudah dipahami secara cepat oleh pengendara pada kecepatan berkendara;
- 3) Penggunaan jumlah kata-kata dan simbol harus seminimal dan seoptimal mungkin sehingga secara mudah dan cepat dipahami oleh pengendara/wisatawan;
- 4) Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah tidak menimbulkan bahaya.

Pembangunan dan pemasangan rambu-rambu penunjuk arah harus memberikan kontribusi kepada citra dari destinasi serta pengalaman berwisata bagi wisatawan. Adapun standar kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tampilan Rambu (*Sign Faces*), menyapa pengunjung dan mengekspresikan identitas dari destinasi. Permukaan merupakan hiasan yang terbagi atas warna, jenis huruf dan simbol yang diterapkan untuk efek maksimum.
- 2) Panel Rambu (*Sign Panel*), dibuat dari bahan logam, *fibre glass*, kayu, beton atau plastik. Bahan-bahan ini akan membuat rambu-rambu penunjuk arah lebih menarik dan terlihat hidup dengan mengkombinasikan dengan warna, pencahayaan, tekstur dan bentuk.
- 3) Tiang Penyangga (*Sign Support*), perlu dikembangkan lebih dari sebuah tanda. Rambu harus dapat menginterpretasikan sebuah destinasi dengan memberikan fitur yang unik dari ciri khas sebuah destinasi

Dalam ketentuan teknis dan standar dalam rambu-rambu penunjuk arah, telah ditetapkan yaitu latar belakang coklat dan tulisan putih. Bentuk seperti ini akan mampu mengekspresikan daya tarik yang bersifat rekreatif maupun budaya. Berbagai standar yang bersifat teknis dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) *Gateway Signs* (Huruf putih dengan latar belakang coklat) ditempatkan di dekat pintu masuk dari kota atau wilayah geografis yang dapat memberikan informasi terkait dengan tema utama dari destinasi pariwisata. *Gateway Sign* juga dapat termasuk deretan putih pada simbol biru untuk menunjukkan ketersediaan layanan termasuk informasi pengunjung.

Gambar 85
Ilustrasi Contoh Gateway Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) *Advance Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), menyediakan informasi terkait dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari daya tarik wisata atau layanan pariwisata.

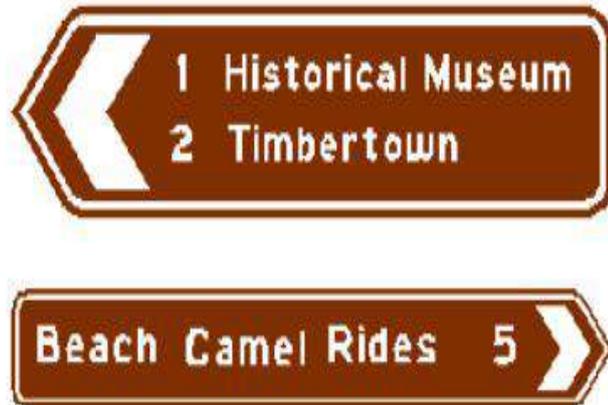
Gambar 86
Ilustrasi Contoh Advance Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) *Intersection Sign* (Rambu Persimpangan, huruf putih dengan latar belakang coklat), ditempatkan di persimpangan untuk menunjukkan arah belokan atau arah berputar untuk satu atau lebih atraksi wisata atau pelayanan wisata.

Gambar 87
Ilustrasi Contoh Intersection Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) *Position Sign* (Rambu Tanda Masuk, huruf putih dengan latar belakang coklat), untuk menunjukkan posisi masuk menuju destinasi pariwisata atau pelayanan wisata.

Gambar 88
Ilustrasi Contoh Position Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 5) *Reassurance Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), untuk memastikan tujuan kepada wisatawan/ pengguna apabila destinasi atau pelayanan wisata masih pada jarak yang cukup jauh. Seringkali dipasang pada jalan persimpangan, sehingga memastikan wisatawan/ pengguna pada arah yang tepat.

Gambar 89
Ilustrasi Contoh Reassurance Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 6) *Routes Marker* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), dapat ditempatkan guna menggantikan *intersaction sign* yang pada umumnya lebih mahal, karena *routes marker* umumnya bentuknya lebih kecil. Rambu ini pada umumnya didukung oleh aktivitas pemasaran atau promosi dari pelayanan wisata.

Gambar 90
Ilustrasi Contoh Route Marker



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 7) *Temporary Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), penunjuk arah ini dipasang menuju destinasi pariwisata atau layanan pariwisata namun terbatas pada periode tertentu. Pada umumnya dipasang pada musim-musim atau *event* pada waktu-waktu tertentu

Gambar 91
Ilustrasi Contoh Temporary Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

g) Gapura Identitas

Konsep dasar pembangunan gapura adalah menyediakan fasilitas layanan informasi lokasi atraksi wisata yang akurat kepada wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan jaman, maka fungsi gapura dapat ditambahkan menjadi tempat untuk memberikan layanan lain bagi wisatawan.

Adapun prinsip dan kaidah pembangunan gapura identitas adalah :

- 1) Kemanfaatan,kepatutan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/ keselarasan bangunan dengan lingkungan dan budaya daerah kabupaten Jeneponto;
- 2) Hemat, kewajaran, ekonomis tidak berlebihan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
- 3) Terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi setiap pengguna bangunan gedung;
- 4) Informatif; dan
- 5) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/ potensi nasional.

Fungsi dan manfaat gapura di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah antara lain: sebagai penanda lokasi pintu masuk di kawasan Pariwisata serta pemberi ucapan selamat datang kepada wisatawan yang datang berkunjung; sebagai identitas/ icon dari sebuah objek wisata/ daerah; sebagai tempat pemberian informasi kepada wisatawan yang datang berkunjung, mengenai sarana dan prasarana umum serta fasilitas yang tersedia didalam dan aktivitas wisata yang dapat dilakukan. termasuk memberikan informasi mengenai hal yang harus dipatuhi oleh wisatawan selama berada di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang; dan sebagai satu kesatuan fasilitas manajemen pengelolaan.

Penempatan gapura di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang berada di lokasi masuk daya tarik wisata yang terhubung dengan jalur lalu lintas utama. Lokasi penempatan gapura identitas dibuat strategis, mudah terlihat dan sebagai identitas/ penanda sebuah kawasan pariwisata atau daya tarik wisata.

Gambar 92
Ilustrasi Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata
Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Standar pembangunan gapura identitas pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sesuai ketentuan teknis dimensi gapura identitas yaitu :

- 1) Tinggi gapura proporsional dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas bagi kendaraan yang lewat;
- 2) Lebar tiang gapura: proporsional dengan dengan tinggi gapura;
- 3) Jarak antar tiang menyesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang serta lahan yang tersedia.

Gambar 93
Rancangan Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata
Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

h) Loket

Loket merupakan salah satu fasilitas pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan kawasan daya tarik wisata yang profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengembangan informasi jumlah pengunjung pada waktu kunjungan tertentu serta pendapatan yang diterima melalui kunjungan wisatawan.

Pengelolaan pengunjung yang baik melalui penyediaan sarana loket yang nyaman beserta fasilitas pendukung yang memadai akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan serta keberlanjutan pemeliharaan dan perawatan fasilitas kawasan wisata termasuk manfaat ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Gambar 94
Ilustrasi Loket Kawasan Daya Tarik Wisata
Pantai Tamarunang



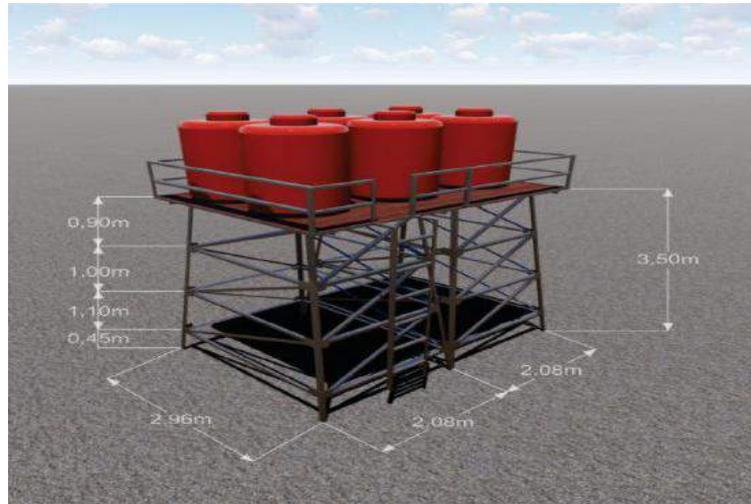
Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

i) Reservoir

Untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang, selain menyediakan dan mengembangkan fasilitas dan atraksi wisata, juga harus diyakini ketersediaan air bersih khususnya untuk konsumsi air minum bagi wisatawan selama berada di daya tarik wisata. Untuk itu diperlukan fasilitas *reservoir*.

Desain bangunan *reservoir* pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 95
Desain Bangunan Reservoir Pada
Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Fungsi utama *reservoir* adalah menyeimbangkan antara debit produksi dan debit pemakaian air yang berfluktuasi selama 24 jam. Pada saat jumlah produksi air bersih lebih besar dari pada jumlah pemakaian air maka untuk sementara kelebihan air disimpan dalam *reservoir* dan digunakan kembali untuk memenuhi kekurangan air pada saat jumlah produksi air bersih lebih kecil dari pada jumlah pemakaian air. Berdasarkan fungsinya, *reservoir* dalam sistem distribusi dibagi menjadi dua kategori yaitu *reservoir* pelayanan dan *reservoir* penyeimbang.

Reservoir pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang merupakan bangunan penampungan air sebelum dilakukan pendistribusian ke fasilitas-fasilitas yang membutuhkan air bersih dalam melayani kebutuhan wisatawan seperti di kamar, toilet, pusat kuliner, dan ruang ibadah. Bangunan *reservoir* diletakkan pada ketinggian yang cukup untuk mengalirkan air secara baik dan merata ke seluruh fasilitas distribusi.

Fasilitas penampungan air distribusi terletak di tanah berupa tangki, dimana tingginya lebih besar dari diameternya (bentuk silinder). *Reservoir* lebih umum dipakai untuk tempat penampungan yang lebih besar, biasanya berupa kolam, danau ataupun suatu tempat yang dibuat secara natural ataupun dikonstruksikan dengan menggunakan geografi alami dari alam sekitarnya. (sebagian besar *reservoir* berskala besar digunakan sebagai penampungan air baku, tidak untuk penampungan air bersih dalam sistem distribusi).

Material konstruksi *reservoir* dari beton dan baja adalah bahan yang paling banyak dipergunakan. Pengoperasian vasilitas penampungan biasanya berjalan secara otomatis sesuai dengan disain operasinya untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan dan pasokan. Tangki akan terisi apabila pasokan air melebihi

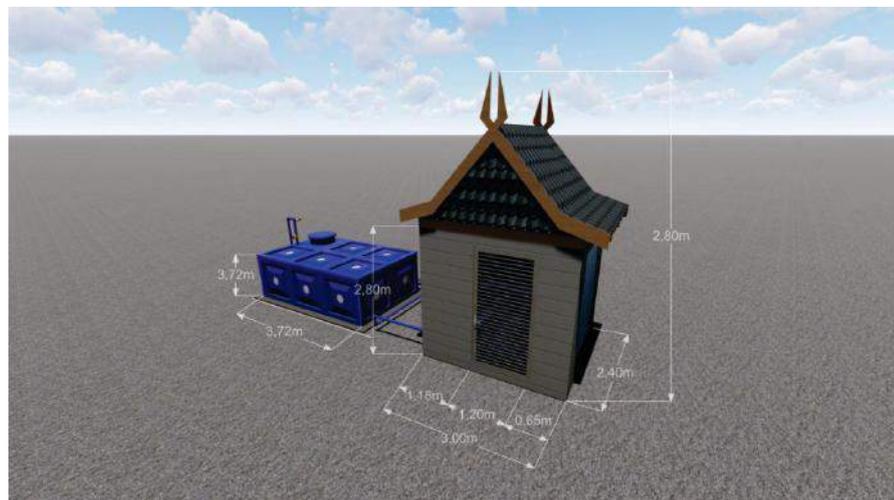
kebutuhan dan akan menjadi kosong apabila pasokan air lebih rendah dari kebutuhan.

Optimalisasi sistem *reservoir* merupakan kegiatan pengalokasian sistem *supply* jaringan distribusi berdasarkan acuan letak dan kapasitas *reservoir* yang terbangun guna meningkatkan kualitas pelayanan distribusi dengan pendekatan besarnya beban-beban kebutuhan air pelayanan. Kegiatan optimalisasi *reservoir* dilakukan melalui pendekatan-pendekatan terhadap : a) estimasi kebutuhan air bersih wilayah pelayanan; b) kondisi kapasitas aliran ke wilayah pelayanan; c) kondisi dan kapasitas sistem *supply* ke *reservoir*; dan d) jangkauan dan elevasi serta sistem pengaliran.

Konstruksi *reservoir* direncanakan berdasarkan standar-standar yang berlaku di Indonesia. Dalam pertimbangan teknis penentuan *reservoir* harus mempertimbangan kondisi geografis. Tingkat kesulitan teknis akan tercermin dalam nilai biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Dari segi ekonomis, karena daya tahan beton lebih lama maka akan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil dari pada baja. Sehingga apabila penyusutan dikuantifikasi ke biaya, *reservoir* beton akan lebih murah dari pada *reservoir* baja.

Desain bak penampungan *reservoir* pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 96
Desain Bak Penampungan Reservoir Pada
Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Reservoir ini harus ditutup untuk mencegah masuknya air hujan atau sampah/ kotoran ke dalamnya dan untuk melindungi dari gangguan manusia ataupun binatang. Konstruksi beton bertulang dimulai dari dinding bagian dalam yang menentukan bentuknya dan kawat/ besi *press stressed* baja yang dipasang membungkus bagian dalam. *Reservoir* yang telah selesai kemudian dilapisi dengan lapisan beton hidrolis. Desain dan

konstruksi dari beton *press stressed* yang baik akan memberikan keuntungan antara lain : harga yang murah, relatif lebih kedap dan tidak memerlukan pengecatan ataupun *catodhic protection*. Kekuatan tariknya yang besar, maka konstruksi ini dibuat lebih tipis dan lebih sedikit tulangan baja dibanding dengan beton cetakan.

j) ATM Center

ATM center adalah salah satu fasilitas perbankan yang saat ini menjadi salah satu amenities utama yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan wisata. Kebutuhan akan fasilitas tersebut didasari oleh perubahan pola hidup wisatawan dan masyarakat modern saat ini yang cenderung tidak lagi membawa uang tunai dalam melakukan perjalanan termasuk perjalanan berwisata.

Adapun rencana pengembangan fasilitas anjungan ATM pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 97
Ilustrasi Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik
Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Untuk dapat melayani kebutuhan transaksi perbankan, baik berupa pembayaran dengan kartu kredit (*credit card*) maupun kartu debit (*debit card*), maka dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dilengkapi dengan fasilitas anjungan ATM (ATM center) bekerjasama dengan berbagai bank yang beroperasi di kabupaten Jeneponto.

Fasilitas anjungan ATM, diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin menarik tunai dan atau melakukan transaksi perbankan melalui kartu. Selain itu, untuk memberikan pelayanan pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu maka pada fasilitas utama seperti kamar, plaza kuliner, dan gerai cinderamata akan dilengkapi dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC).

k) **Water Break/ Talud**

Pantai Tamarunang merupakan kawasan pantai di kabupaten Jeneponto yang menghadapi tantangan alam berupa hempasan ombak dan arus kencang pada musim barat. Hal ini mengakibatkan kawasan pinggir pantai yang telah dibangun tanggul, mengalami degradasi dan kerusakan yang sangat parah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kawasan daya tarik pariwisata Pantai Tamarunang direncanakan untuk membangun *breakwater/ talud* sehingga kerugian ekonomis akibat kondisi alam tersebut dapat diatasi, sekaligus menambah ruang aktivitas wisata olah raga perairan di area bagian dalam *breakwater/ talud*.

Daerah pantai atau pesisir merupakan kawasan yang paling produktif, selain memiliki keanekaragaman hayati, pantai juga menyediakan ruang dengan untuk kegiatan transportasi, industri, pariwisata dan pemukiman. Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi masalah apabila pemanfaatan daerah pantai tidak disesuaikan dengan kondisi pantai, sehingga pada akhirnya menyebabkan kerusakan/perubahan kualitas lingkungan fisik dan biofisik.

Kerusakan daerah pantai yang sering terjadi adalah erosi pantai. Erosi pantai dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu penyebab buatan (tindakan manusia) seperti penambangan pasir laut, perusakan pelindung alam (*mangrove*) dan transportasi pantai dan penyebab alami yang terjadi karena gelombang badai, naiknya permukaan laut dan perubahan suplai sedimen. Identifikasi penyebab kerusakan daerah pantai secara dini sangat diperlukan agar dapat memberikan alternatif solusi penanganan dan perlindungan sesuai dengan kondisi pantai.

Perlindungan dan penanganan pantai bertujuan terutama untuk melindungi dan mengamankan, antara lain: masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai, dataran pantai dan terhadap pencemaran lingkungan.

Untuk dapat menentukan bangunan pelindung pantai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya angin yang bertiup dan arah datangnya angin ke pantai;
- b. Keadaan gelombang (tinggi gelombang, arah gelombang, periode gelombang);
- c. Pemanfaatan pantai: pemukiman, kota, pelabuhan, tempat wisata, perkebunan/pertanian/perikanan, jalan raya/fasilitas umum, industri/ sumber energi, cagar alam;
- d. Arus yang terjadi apakah sejajar pantai atau tegak lurus pantai;
- e. Pasang surut air laut untuk menentukan tinggi konstruksi;
- f. Laju kerusakan pantai pada daerah tertentu dengan persyaratan:
 - (1) amat sangat berat > 10 m/ tahun
 - (2) sangat berat 5 – 10 m/ tahun
 - (3) berat 2 – 5 m/ tahun
 - (4) sedang 2 – 5 m/ tahun

- (5) ringan < 0,5 m/ tahun
- g. Kontur tanah dasar perairan: datar, landai dan terjal;
- h. Sosial budaya masyarakat sekitarnya; dan
- i. Kekuatan tanah disekitar lokasi rencana proyek.

Secara umum bangunan pelindung pantai dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai;
- b. Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan berhubungan dengan pantai;
- c. Konstruksi yang dibangun sejajar dengan garis pantai.

Salah satu konstruksi bangunan pelindung pantai adalah talud. Talud merupakan tumpukan batuan pada suatu lereng yang berfungsi melindungi suatu tebing alur pantai atau permukaan lereng dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur pantai. Talud juga dapat diartikan sebagai bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai, yang terutama berfungsi sebagai dinding pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang ke darat.

Daerah yang dilindungi adalah daratan tepat di belakang bangunan. Permukaan bangunan yang menghadap arah datangnya gelombang dapat berupa sisi vertikal atau miring. Talud di tempatkan di tebing pantai untuk menyerap energi air yang masuk guna melindungi suatu tebing alur pantai atau permukaan lereng tanggul terhadap erosi dan limpasan gelombang ke darat. Talud digunakan untuk perlindungan terhadap gelombang yang relatif kecil.

Jenis-jenis talud, dibedakan sesuai materialnya, antara lain:

- a. Talud dari susunan blok beton, bangunan ini digunakan untuk menahan gelombang besar dan tanah dasar relatif kuat (misalnya terdapat batu karang). Selain itu bangunan ini juga digunakan untuk melindungi bangunan (jalan raya) yang berada sangat dekat dengan garis pantai;
- b. Talud dengan turap baja, bangunan ini didukung oleh fondasi tiang dan dilengkapi dengan turap baja yang berfungsi untuk mencegah erosi tanah fondasi oleh serangan gelombang dan piping oleh aliran air tanah. Pondasi bangunan harus direncanakan dengan baik untuk menghindari terjadinya penurunan tidak merata yang dapat menyebabkan pecahnya konstruksi.
- c. Talud dari tumpukan bronjong, bronjong adalah anyaman kawat berbentuk kotak yang didalamnya diisi batu. Bangunan ini bisa menyerap energi gelombang sehingga elevasi puncak bangunan bisa rendah. Kelemahan bronjong adalah korosi dari kawat anyaman yang merupakan factor pembatas dari umur bangunan. Supaya bisa lebih awet, kawat anyaman dilapisi dengan plastic (PVC).
- d. Talud dari tumpukan batu pecah, bangunan ini biasanya dibuat dalam beberapa lapis. Lapis terluar merupakan lapis

pelindung yang terbuat dari batu dengan ukuran besar yang direncanakan mampu menahan serangan gelombang. Bangunan ini merupakan konstruksi fleksibel yang dapat mengikuti penurunan atau konsolidasi tanah datar.

- e. Talud dari tumpukan pipa beton, bangunan pelindung pantai dari susunan beton telah banyak digunakan di Indonesia. Bangunan ini terbuat dari pipa beton berbentuk bulat, yang banyak dijumpai di pasaran dan biasanya digunakan untuk membuat gorong-gorong, sumur gali, dan sebagainya. Pipa disusun secara berjajar atau bertumpuk dan didalamnya dapat diisi dengan batu atau beton siklop.

Adapun ilustrasi *breakwater/ talud* pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut :

Gambar 98
Ilustrasi Breakwater/ Talud Pada Kawasan
Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

b. Rencana Penataan Lingkungan

1) Rencana Penanganan Sampah

Sampah yang dihasilkan pada kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang dihasilkan dari beberapa sumber yaitu, sampah yang berasal dari wisatawan, sampah yang berasal dari pengelola (restoran/ dapur dan kemasan) dan sampah yang berasal dari alam dan dibawa secara langsung oleh laut ke wilayah pantai, pepohonan di kawasan, budidaya rumput laut petani ,maupun oleh angin.

Penanganan sampah wisatawan di kawasan wisata Pantai Tamarunang dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan wisatawan dengan memasang tanda-tanda pada titik-titik strategis untuk menganjurkan kepada wisatawan agar mereka membuang sampah pada tempat yang telah disediakan menurut jenisnya. Hal ini juga harus dibarengi dengan penyiapan wadah-wadah penampungan sampah yang standar

sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan non-organik.

Gambar 99
Ilustrasi Penyediaan Tanda dan Wadah Sampah
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Penanganan sampah harus dibarengi dengan ketersediaan petugas untuk mengontrol sampah yang diatur berdasarkan area pemungutan sampah agar sampah tidak bertumpuk. Demikian pula dengan sampah yang dihasilkan dari outlet bisnis kawasan wisata Pantai Tamarunang seperti sampah dapur, sampah restoran, sampah kamar tamu dan lainnya memerlukan tanda petunjuk dan tempat sampah yang standar, dan demi mendukung *sustainable tourism* dan *Zero Plastic Single Use*.

Selanjutnya penjadwalan pengangkutan sampah harus dilakukan untuk mengangkut sampah-sampah keluar dari kawasan agar sampah tidak bertumpuk pada kawasan untuk dibuang ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian khusus karena akan menyangkut pada citra daya tarik wisata Pantai Tamarunang ke depan. Untuk itu pihak pengelola seharusnya mengurangi penggunaan plastik agar tidak memberikan dampak pada wilayah tersebut (*Zero Plastic Single Use*).

Sampah yang dihasilkan oleh alam melalui kiriman/bawaan dari laut, proses alami pepohonan dan binatang merupakan masalah yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Cara penanganan utama adalah menyediakan petugas

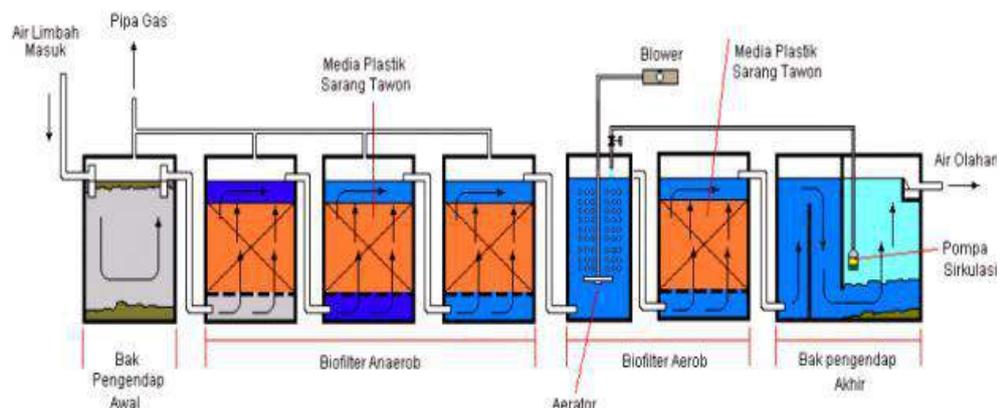
kebersihan yang akan aktif dalam mengumpulkan sampah-sampah dan melakukan pembersihan sampah pada pagi hari dan menanam sampah organik yang dapat terurai cepat pada tempat yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembersihan dan mencegah penumpukan sampah di kawasan daya tarik wisata.

2) Pengelolaan Limbah

Limbah yang berasal dari sampah dapat dijadikan produk-produk daur ulang yang bermanfaat. Untuk itu pelatihan pengelolaan limbah sampah bagi masyarakat sekitar akan dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengolah limbah sampah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu pengolahan limbah cair di kawasan daya tarik wisata Pantai Tamarunang harus menyesuaikan dengan jenis akomodasi dan amenities yang ada di sekitar pantai. Untuk area obyek wisata Pantai Tamarunang, sesuai dengan master plan akan dibangun sebuah resort yang memiliki sejumlah kamar, *meeting room* dan restoran. selain itu akan dibuat toilet umum untuk pengunjung pantai. Jenis limbah cair yang akan di olah berasal dari dapur hotel, restoran, kamar tamu, dan toilet umum. Sistem pengolahan limbahnya akan bermuara ke satu sumber penampungan yang letaknya berada di belakang resort yang jauh dari rumah masyarakat. Pipa yang berasal dari *outlet-outlet* tadi akan menuju ke satu penampungan pengolahan limbah dengan sistem pengolahan limbah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 100
Sistem Pengolahan Limbah Cair
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

BAB - 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Obyek wisata Pantai Tamarunang memiliki potensi yang dapat menarik wisatawan minat khusus saat ini secara spesifik wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata berupa berenang di kolam permandian dan *waterboom*, wisata pantai, dan *watersport recreation* serta olah raga hiburan lainnya. Potensi yang sudah ada perlu pengembangan yang baik dan inovatif untuk menjadikan obyek wisata Pantai Tamarunang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan berbagai tipologi dengan mengembangkan potensi yang ada. Kondisi alam seperti pantai, laut, dermaga, hutan rindang dan wilayah daratan yang memiliki ruang memadai dapat menjadi potensi utama untuk mengembangkan obyek wisata dengan tema *Family Recreation, MICE and Urban Tourism* dengan 5 (lima) aspek yaitu aksesibilitas, atraksi, aktivitas, akomodasi dan amenitas.

1. Pengembangan Aksesibilitas berfokus pada perbaikan jalan masuk dari gerbang kawasan ke kawasan inti obyek wisata Pantai Tamarunang, dermaga untuk akses laut dan jalan tapak daya tarik wisata.
2. Pengembangan Atraksi berfokus pada revitalisasi wilayah pantai yakni dermaga, *waterbreak/* talud, panorama laut, sunset, dan pohon rindang.
3. Pengembangan aktivitas berfokus pada olahraga perairan, *outbound, meeting*, pertunjukan, renang, olah raga, dan berjemur.
4. Pengembangan amenitas berfokus pada penguatan sarana sarana pendukung yakni toilet, menara pandang, sarana olah raga, gazebo, ATM, area parkir, *photo spot, sport and recreation facilities*, dan gerbang. Amenitas yang sudah ada seperti tempat ibadah, dilakukan dengan merevitalisasi bangunan yang sudah ada agar tetap terintegrasi dengan perencanaan penambahan fasilitas.
5. Pengembangan akomodasi berfokus pada pengembangan pusat kuliner, cinderamata dan *meeting room*. Pengembangan fasilitas hotel akan direncanakan terpisah setelah masa pengelolaan dengan pihak ketiga telah berakhir.

B. Saran

Adapun saran-saran sehubungan dengan pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang adalah sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto

1. Pengembangan obyek wisata Pantai Tamarunang yang berkualitas harus selalu mengutamakan kelestarian lingkungan yaitu lingkungan hidup dan lingkungan sosial sekitar pada kawasan tersebut hal ini demi keberlangsungan pariwisata itu sendiri (*Sustainable Tourism*).
2. Pembangunan sarana dan prasarana harus mengacu pada standar-standar yang ada sehingga obyek wisata tersebut memiliki standar internasional.
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk promosi yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan *e-commerce*, pengembangan WEB dan audio *visual online*, sehingga calon pengunjung dapat melihat profile obyek wisata Pantai Tamarunang melalui jaringan multimedia dan teknologi informasi (wireless, WAP, WEB dan jaringan WAP 3G).
4. Masyarakat sekitar diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola daya tarik wisata berupa Pelatihan Bahasa Inggris Percakapan, Pelatihan Pembuatan Paket Wisata, dan Pelatihan Pemanduan Wisata.
5. Diperlukan peningkatan aksesibilitas kawasan wisata yang diarahkan pada peningkatan akses jalan, terutama jalan akses menuju kawasan wisata melalui pengembangan obyek wisata yang berorientasi pada kualitas dan berwawasan lingkungan hal ini diperlukan sinergi antara pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, P.A.**, 1986, *Tourism and Its Significance in Local Development*, Michigan State University.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2017.** Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2018.** Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2018
- Briguglio, Lino**, dkk, 1996, *Sustainable Tourism in Island and Small States : Issues and Policies*, Biddles Limited, Guildford and Kings Lynn.
- Cook, S.D Stewart E, Ripass K**, 1992, *Tourism and the Environment. Travel Industry Association of America*, Washington DC.
- Cool, Mc. SF.** 1995, *Linking Tourism the Environment and Concepts of Sustainability Setting the Stage. The Annual Meeting of the Nation Recreation and Park Association.* Minneapolis MN.
- Gartner, William.** 1996. *Tourism Development: Principles, Process, and Policies.* Van Nostrand Reinhold, New York.
- Gunn, Clare.** 1994. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 3rd ed.*, Taylor & Francis, Washington DC.
- Inskeep, Edward.** 1993. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach.* Van Nostrand Reinhold, New York.
- Harrison, David.** 1992, *Tourism and the Less Development Countries*, Halsted Press. New York.
- Jhonson, Peter, Barry Thomas**, 1993, *Perspectives on Tourism Policy*, Biddles Ltd. Guildford & Kings Lynn.
- Kusudianto, Hadinoto**, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press. Jakarta
- Lea, Jhon**, 1993, *Tourism and Development in the Third World*, Routledge. London. New York.

- Mowforth, Martin** dan **Land Munt**, *Tourism and Sustainability; Development and New Tourism In The Third World*; Second Edition, Reutledge Taylor & Francis Group, 2003.
- Pearce, Douglass**, 1994, *Tourist Development*, Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011**, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016**, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/ Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 .
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019**, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015**, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006**, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014**, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018
- Smith, Valene L dan William R Eadington**, 1992, *Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism*, John Wiley & Sons. New York.
- Tisdell, Clement A dan Kartik C Roy**, 1998, *Tourism and Development : Economic, Social, Political and Environment Issues*, Nova Science Inc. USA.

**Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang
Kabupaten Jeneponto**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Weaver, D.B, 2001, *Ecotourism as Mass Tourism : Contradiction or Reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, Edisi April, Ithaca. NY.

IDENTITAS PENULIS



Muhammad Arifin, Lahir di Enrekang pada tanggal 7 Januari 1963.. Menyelesaikan Pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1988, kemudian melanjutkan Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2002.

Pada tahun 2010 memperoleh Sertifikat Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada Bidang Ilmu Manajemen Perhotelan dari Universitas Hasanuddin. Selain itu menjadi Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2008, Asesor Lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dari tahun 2014 dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta berbagai aktivitas *benchmark* pada perguruan tinggi terkemuka di Malaysia, Singapura, Hongkong, Belanda, Australia, Kanada dan Arab Saudi. Saat ini aktif sebagai Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Sertifikasi pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA), Peneliti dan penulis kajian Pariwisata dan menjabat sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Makassar sejak tahun 2019 sampai sekarang.



Syamsu Rijal, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1968. Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013, menyelesaikan program S3 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada program

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Pada tahun 2019 memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI). Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti CBT/CBA The Best Quality Framework di Canberra Institute of Tafe-Australia, Competency Based Assessment di Queensland Tafe-Australia, Quality Tourism pada Centro Superior de Hosteleria the Galicia (CSHG) Santiago Decampostella Spanyol, Sandwich Like Program pada Northern Illinois University-Amerika Serikat, serta berbagai aktivitas *benchmark* pada perguruan tinggi terkemuka di Hongkong, Belanda, New Zealand, Australia, dan Kanada Saat ini aktif dalam berbagai asosiasi profesi, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Phinisi, peneliti dan penulis pariwisata, Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Tamarunang Kabupaten Jeneponto



Syafruddin, Lahir di Makassar pada 06 maret 1966. Menyelesaikan Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1990 jurusan Hukum Administrasi Negara. Menyelesaikan Program Pasca Sarjana Pada Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia.

Sebagai penggiat Ekowisata dari tahun 1998 hingga saat ini. Aktif sebagai Dosen pada Program Studi MICE di Politeknik Pariwisata Makassar. Sebagai Assessor LSP.



Andri Machmury, Lahir di Kendari pada tanggal 15 November 1984. Menyelesaikan strata satu mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia tahun 2008, kemudian melanjutkan Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun dan mendapat gelar Magister Sains Akuntansi tahun 2019.

Saat ini aktif sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Phinisi dan tercatat sebagai Assesor Profesi Pariwisata dari Badan Sertifikasi Profesi (BNSP). Kemudian terlibat dalam penelitian bidang Pariwisata baik perorangan maupun kelompok. Sebagai penggiat Pariwisata sejak tahun 2018 aktif sebagai konsultan Pariwisata pada *Zavier Counsultan*, dan kajian Lintas Budaya La Kawan Institute.